



# LKIP 2020

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



PEMERINTAH

KABUPATEN CIAMIS



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN ANGGARAN 2020**

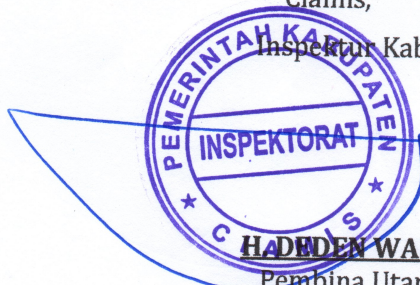
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Ciamis, Maret 2021

Inspektur Kabupaten Ciamis



**HADEDEN WAHIDIN, SE., MM**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19610807 198703 1 015

## KATA PENGANTAR



**P**uji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Ciamis Tahun 2020 dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

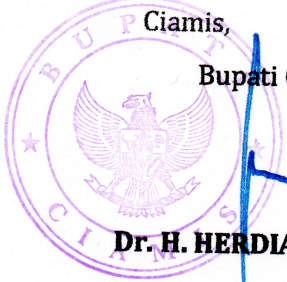
Penyusunan laporan kinerja merupakan perwujudan kewajiban Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020, sebagai komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis tahun 2020 yang telah disepakati sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 diharapkan dapat memberikan gambaran informasi yang memadai dan terukur atas realisasi kinerja dan capaian kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan terwujudnya kinerja sasaran, serta tercapainya hasil program

Pemerintah Kabupaten Ciamis

dan hasil kegiatan sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020.

Keberhasilan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak terlepas dari kerjasama dan peran serta seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Selama tahun 2020 telah banyak prestasi dan penghargaan yang diraih oleh Kabupaten Ciamis baik pada tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Kinerja yang belum tercapai serta hal-hal yang masih dirasa kurang, menjadi catatan dan bahan evaluasi bagi seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Ciamis dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja ke arah yang lebih baik ke depannya.

Ciamis,           Maret 2021  
Bupati Ciamis,  
  
**Dr. H. HERDIAT SUNARYA**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

**A**kuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis serta program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun secara periodik.

Penyusunan LKIP Kabupaten Ciamis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Kabupaten Ciamis Tahun 2020 disusun untuk memberikan gambaran informasi yang memadai dan terukur mengenai tingkat capaian kinerja sasaran berdasarkan realisasi dan target dari setiap indikator kinerja sasaran yang termuat dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2020 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Ciamis.

LKIP Kabupaten Ciamis Tahun 2020 memuat ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran

yang disertai dengan penjelasan memadai atas pencapaian kinerja serta perbandingan capaian indikator kinerja sasaran. Laporan ini menyajikan informasi yang relevan menyangkut keberhasilan dan atau kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan pencapaian sasaran strategis serta program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 telah ditetapkan 18 sasaran dengan 25 indikator sasaran. Secara umum pencapaian kinerja sasaran menunjukkan keberhasilan sesuai dengan target kinerja yang disepakati, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 83,29 %, dengan capaian kinerja setiap sasaran sebagai berikut:

No	Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1.	Terwujudnya SDM yang cerdas, kreatif dan inovatif serta berakhlak mulia	2	100,36
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	100
3.	Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak perempuan dan anak	2	99,81
4.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB dan ketahanan keluarga	1	100
5.	Berkurangnya jumlah penduduk miskin	1	100,26
6.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	1	100,18
7.	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi	1	100,263
8.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pengelolaan Sumber Daya Air	1	102,022
9.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1	-8,48
10.	Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat	1	104,00
11.	Meningkatnya kesejahteraan petani	1	99,23

12.	Meningkatnya investasi di daerah	1	-178
13.	Meningkatnya daya saing pariwisata	1	109,47
14.	Terwujudnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan	1	118,06
15.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	112,98
16.	Meningkatnya ketahanan dan adaptasi terhadap bencana	1	115,71
17.	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	6	110,11
18.	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah desa, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa	1	113,18
	<b>Jumlah (Rata-rata)</b>	<b>25</b>	<b>83,29</b>

Untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Ciamis, dialokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Rp. 1.107.270.364.834,- terealisasi sebesar Rp. 1.023.660.197.308,- atau 92,45 %. Dengan demikian terdapat efisiensi/sisa anggaran Rp. 83,610,167,526,- atau sebesar 7,55 % dari total anggaran yang ada.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran masih terdapat beberapa capaian kinerja sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut menjadi catatan dan bahan evaluasi bagi seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Ciamis dalam memperbaiki manajemen kinerja pemerintahan di masa mendatang.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif .....	iii
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Grafik .....	xi
Daftar Gambar .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 GAMBARAN UMUM DAERAH .....	2
1.2.1 Kondisi Wilayah dan Geografis .....	2
1.2.2 Kondisi Demografis/Penduduk .....	5
1.2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	9
1.2.4 Perekonomian .....	14
1.2.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	14
1.2.4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi .....	20
1.2.4.3 Inflasi .....	22
1.3 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH .....	23
1.4 KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH .....	24
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>27</b>
2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) .....	27
2.1.1 Visi Pembangunan Daerah .....	27
2.1.2 Misi Pembangunan Daerah .....	29
2.1.3 Tujuan dan Sasaran .....	30
2.2 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) .....	32
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	43



2.4	PERJANJIAN KINERJA .....	45
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>		<b>49</b>
3.1	KERANGKA PENGUKURAN KINERJA .....	49
3.2	PENGUKURAN, EVALUASI, DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS .....	52
3.3	REALISASI ANGGARAN .....	136
3.4	PRESTASI DAN PENGHARGAAN .....	142
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>148</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Data Administratif dan Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Ciamis Tahun 2020.....	3
1.2 Jumlah dan Komposisi Penduduk Kabupaten Ciamis Tahun 2018-2020 .....	6
1.3 Perkembangan IPM Kabupaten Ciamis Tahun 2018-2020 .....	12
1.4 PDRB AdHB Kabupaten Ciamis Tahun 2018-2020 .....	14
1.5 PDRB AdHK Kabupaten Ciamis Tahun 2018-2020 .....	18
1.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Menurut Lapangan Usaha Atas dasar Harga Konstan Kabupaten Ciamis Tahun 2018-2020..	20
2.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 .....	30
2.2 Prioritas Pembangunan, Sasaran Daerah dan Program Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2020 .....	33
2.3 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020.....	43
2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 .....	46
3.1 Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 .....	53
3.2 Rekapitulasi Tingkat Pencapaian Sasaran pada Masing-Masing Misi RPJMD Berdasarkan Jumlah Indikator Kinerja Tahun 2020..	56
3.3 Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya SDM yang Cerdas, Kreatif dan Inovatif serta Berakhlak Mulia .....	59
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terwujudnya SDM yang Cerdas, Kreatif dan Inovatif serta Berakhlak Mulia Tahun 2020 dengan Target RPJMD .....	60
3.5 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat .....	65
3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2020 dengan Target RPJMD .....	66
3.7 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Peran Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan serta Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak .....	69
3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Peran Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan serta Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Tahun 2020 dengan Target RPJMD .....	71
3.9 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Peserta KB dan Ketahanan Keluarga.....	74

3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Peserta KB dan Ketahanan Keluarga Tahun 2020 dengan Target RPJMD .....	75
3.11	Capaian Kinerja Sasaran Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin .....	76
3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2020 dengan Target RPJMD .....	77
3.13	Realisasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja.....	80
3.14	Perbandingan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja Tahun 2020 dengan Target RPJMD.	81
3.15	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Transportasi .....	83
3.16	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Transportasi Tahun 2020 dengan Target RPJMD.....	84
3.17	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air .....	86
3.18	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2020 dengan Target RPJMD .....	87
3.19	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi .....	89
3.20	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 dengan Target RPJMD .....	90
3.21	Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat .....	92
3.22	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Tahun 2020 dengan Target RPJMD .....	93
3.23	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani ....	95
3.24	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani Tahun 2020 dengan Target RPJMD .....	96
3.25	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Investasi di Daerah.....	99
3.26	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Investasi di Daerah Tahun 2020 dengan Target RPJMD .....	100
3.27	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Saing Pariwisata.....	101
3.28	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Tahun 2020 dengan Target RPJMD .....	102
3.29	Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Ketahanan Pangan Menuju Kemandirian Pangan.....	103
3.30	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terwujudnya Ketahanan Pangan Menuju Kemandirian Pangan Tahun 2020 dengan Target RPJMD .....	104
3.31	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan	107

	Hidup .....	
3.32	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020 dengan Target RPJMD .....	107
3.33	IKLH Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2020 Berdasarkan Variabel .....	108
3.34	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketahanan dan Adaptasi Terhadap Bencana .....	111
3.35	Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Ketahanan dan Adaptasi Terhadap Bencana Tahun 2020 dengan Target RPJMD.	112
3.36	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah .....	113
3.37	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dengan Target RPJMD .....	115
3.38	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah Diukur Melalui IKM .....	124
3.39	Nilai IKM Setiap OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 .....	126
3.40	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Diukur Melalui IKM dengan Target RPJMD .....	129
3.41	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah Diukur Melalui SPBE .....	132
3.42	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Desa, Kesejahteraan dan Kemandirian Desa.....	134
3.43	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Desa, Kesejahteraan dan Kemandirian Desa Tahun 2020 dengan Target RPJMD .....	135
3.44	Komposisi Belanja Langsung dan Tidak Langsung APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2020.....	136
3.45	Anggaran Untuk Mewujudkan Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	137
3.46	Efektifitas Dan Efisiensi Anggaran Dalam Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020.....	139
3.47	Daftar Prestasi dan Penghargaan yang diraih Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 .....	142

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik</b>	<b>Halaman</b>
1.1	Komposisi Penduduk Kabupaten Ciamis menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2020..... 6
1.2	Piramida Penduduk Kabupaten Ciamis Tahun 2020..... 8
1.3	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Ciamis berdasarkan Kategori Pekerjaan Tahun 2018-2020 ..... 9
1.4	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018-2020 ..... 10
1.5	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Ciamis Tahun 2018-2020 ..... 12
1.6	Distribusi Persentase PDRB AdHB Kabupaten Ciamis Tahun 2018-2020 ..... 16
1.7	Distribusi Persentase PDRB AdHK Kabupaten Ciamis Tahun 2018-2020 ..... 19
1.8	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ..... 21
1.9	Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2020 ..... 22
3.1	Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020 .... 54
3.2	Presentase Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020 ..... 55
3.3	Perkembangan RLS di Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2020 .. 62
3.4	Perkembangan HLS di Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2020..... 63
3.5	Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2020 ..... 67
3.6	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ..... 78
3.7	Persentase Capaian Kemantapan Jalan dan Jembatan Kabupaten Tahun 2014-2020 ..... 84
3.8	Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2020 ..... 87
3.9	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2020..... 93
3.10	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2020..... 97
3.11	Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020 ..... 104
3.12	Perkembangan IKLH Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2020 .... 108
3.13	Persentase Dimensi Indeks Desa Membangun di Kabupaten Ciamis Tahun 2020 ..... 135

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>		<b>Halaman</b>
1.1	Peta Administratif Wilayah Kabupaten Ciamis .....	3
2.1	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional .....	32

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, bahwa berdasarkan laporan kinerja tahunan SKPD, Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun untuk memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja sasaran berdasarkan target dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Pemerintah kabupaten Ciamis Tahun 2020 ditetapkan dengan mengacu dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2020, serta Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Ciamis Tahun 2020 diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai dan terukur atas realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran serta indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan

terwujudnya kinerja, serta tercapainya hasil program dan hasil kegiatan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020.

## 1.2 GAMBARAN UMUM DAERAH

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu Daerah di Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat. Dalam perkembangannya, Kabupaten Ciamis telah 2 (dua) kali mengalami pemekaran daerah yaitu dibentuknya Kota Banjar pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, serta dibentuknya Kabupaten Pangandaran pada tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Pemekaran daerah ini membawa perubahan terhadap kondisi umum Kabupaten Ciamis dalam berbagai aspek terutama kondisi wilayah/geografis, penduduk/demografis dan perekonomian serta aspek-aspek lainnya. Secara umum gambaran mengenai kondisi Kabupaten Ciamis pada saat ini adalah sebagai berikut:

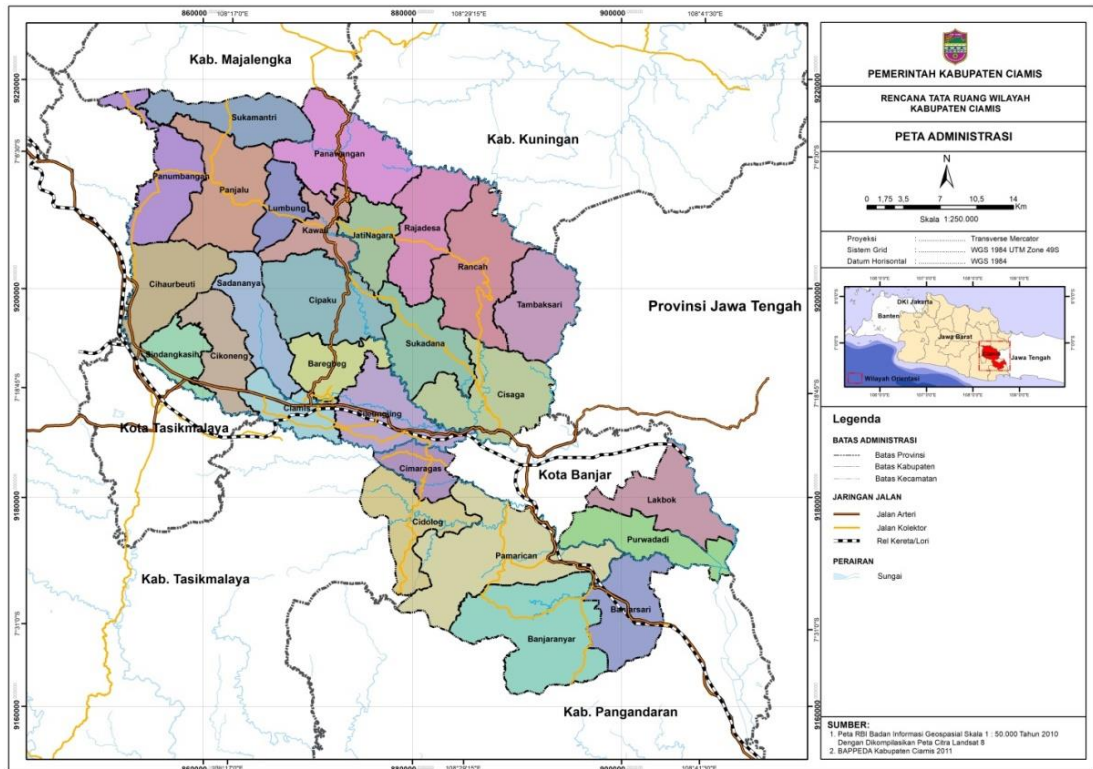
### 1.2.1 Kondisi Wilayah dan Geografis

Secara geografis letak wilayah Kabupaten Ciamis berada pada 108°19' sampai dengan 108°43' bujur timur dan 7°03'39" sampai dengan 7°39'36" lintang selatan, berada di ujung timur Provinsi Jawa Barat, yang berjarak sekitar 121 km dari ibu kota Provinsi, serta mempunyai posisi strategis yang dilalui jalan Nasional lintas Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan jalan Provinsi lintas Ciamis – Cirebon – Jawa Tengah, dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan
- Sebelah Barat : Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya
- Sebelah Timur : Kota Banjar dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pangandaran



**Gambar 1.1**  
**Peta Administratif Wilayah Kabupaten Ciamis**



Sumber : RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

Kabupaten Ciamis memiliki luas wilayah 1.597,67 km<sup>2</sup> dan secara administratif terdiri dari 27 kecamatan, 7 kelurahan, 258 desa, 1.225 dusun, 2.918 RW dan 9.151 RT.

**Tabel 1.1**  
**Data Administratif dan Luas Wilayah per-Kecamatan Tahun 2020**

No	Kecamatan	Desa	Dusun	RW	RT	Luas (Km <sup>2</sup> )	(%)
1	Lakbok	10	31	77	327	57,70	3,61
2	Pamarican	14	52	121	455	124,48	7,79
3	Cidolog	6	31	64	161	56,34	3,53
4	Cimaragas	5	22	48	140	26,47	1,66
5	Cijeungjing	11	58	162	415	60,75	3,80
6	Cisaga	11	43	123	343	80,13	5,02
7	Tambaksari	6	37	78	233	60,26	3,77
8	Rancah	13	67	194	496	86,76	5,43
9	Rajadesa	11	56	125	388	61,68	3,86

No	Kecamatan	Desa	Dusun	RW	RT	Luas (Km <sup>2</sup> )	(%)
10	Sukadana	6	43	71	224	57,98	3,63
11	Ciamis	12	21	168	614	33,85	2,12
12	Cikoneng	9	52	117	340	47,22	2,96
13	Cihaurbeuti	11	67	114	343	64,15	4,02
14	Sadananya	8	26	55	222	46,24	2,89
15	Cipaku	13	64	179	431	78,66	4,92
16	Jatinagara	6	32	61	207	34,34	2,15
17	Panawangan	18	70	182	537	82,38	5,16
18	Kawali	11	49	124	367	36,08	2,26
19	Panjalu	8	68	132	317	77,40	4,84
20	Panumbangan	14	75	153	414	59,23	3,71
21	Sindangkasih	9	51	108	355	29,79	1,86
22	Baregbeg	9	32	96	370	38,29	2,40
23	Lumbung	8	41	99	292	27,94	1,75
24	Purwadadi	9	29	56	276	50,94	3,19
25	Sukamantri	5	30	61	167	50,59	3,17
26	Banjarsari	12	38	83	390	58,12	3,64
27	Banjaranyar	10	40	67	327	109,90	6,88
<b>JUMLAH</b>		<b>258</b>	<b>1.225</b>	<b>2.918</b>	<b>9.151</b>	<b>1.597,67</b>	<b>100</b>

Sumber : RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2037

Wilayah Kabupaten Ciamis dialiri oleh sungai utama yaitu Sungai Citanduy yang mengalir mulai dari Gunung Cakrabuana (hulu) di Kabupaten Tasikmalaya dan bermuara di Sagara Anakan Provinsi Jawa Tengah dengan anak-anak sungainya terdiri dari Sungai Cimuntur, Cijolang dan Ciseel. Sebagian besar wilayah Kabupaten Ciamis termasuk ke dalam Daerah Aliran Sungai Citanduy dengan luas 173.529,51 Ha. Daerah Aliran Sungai Citanduy terbagi ke dalam Sub Daerah Aliran Sungai Citanduy Hulu seluas 22.279,38 Ha, Sub Daerah Aliran Sungai Ciseel seluas 77.421,08 Ha, Sub Daerah Aliran Sungai Cimuntur seluas 55.163,06 Ha dan Sub Daerah Aliran Sungai Cijolang seluas 18.665,99 Ha. Daerah Aliran Sungai Citanduy secara nasional dikategorikan sebagai Daerah Aliran Sungai kritis dengan indikator kekritisannya antara lain fluktuasi debit sungai, tingkat erosi dan sedimentasi yang cukup tinggi ( $\pm 5$  juta ton/tahun terbawa oleh Sungai Citanduy).

Dari aspek topografis Kabupaten Ciamis terletak pada lahan dengan keadaan morfologi datar bergelombang sampai pegunungan. Kemiringan lereng berkisar antara 0 - >40% dengan sebaran 0 - 2% terdapat di bagian tengah - timur laut ke selatan dan 2 - >40% tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan. Struktur daratan wilayah Kabupaten Ciamis secara garis besar terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah. Bagian utara merupakan pegunungan dengan ketinggian 500-1000 mdpl (19%), Bagian tengah ke arah barat merupakan perbukitan dengan ketinggian 100-500 mdpl (49%), sedangkan bagian tengah ke arah timur merupakan daerah dataran rendah dan rawa dengan ketinggian 25-100 mdpl (14%).

### 1.2.2 Kondisi Demografis/Penduduk

Berdasarkan data Tabel 1.2 yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, jumlah penduduk Kabupaten Ciamis tahun 2020 tercatat sebanyak 1.430.262 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Ciamis rata-rata 895,22 jiwa/Km<sup>2</sup> dengan jumlah keluarga sebanyak 510.258 Kepala Keluarga.

Masih berdasarkan sumber yang sama, diketahui Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kabupaten Ciamis tahun 2018 adalah sebesar 0,51% per tahun dengan Angka Beban Tanggungan (ABT) sebesar 0,45 dan LPP tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 0,70% per tahun dengan ABT yaitu sebesar 0,46. Sedangkan LPP tahun 2020 sebesar 0,84% per tahun dengan ABT sebesar 0,46 sama dengan tahun sebelumnya. LPP tersebut dihitung berdasarkan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Faktor yang mempengaruhi LPP antara lain adanya migrasi dan kelahiran (*fertilitas*). Sedangkan ABT dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif (penduduk usia muda dan penduduk usia lanjut) dengan jumlah penduduk usia produktif.

Kondisi demografis Kabupaten Ciamis lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

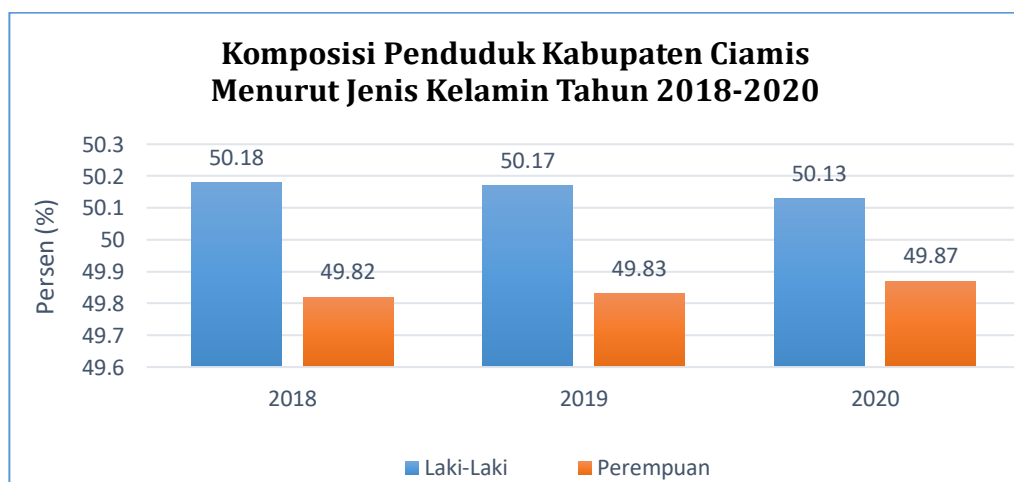
**Tabel 1.2**  
**Jumlah dan Komposisi Penduduk Kabupaten Ciamis**  
**Tahun 2018-2020**

No	Uraian	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.408.507	1.418.301	1.430.262
2	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	881,60	887,73	895,22
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,51	0,70	0,84
4	Angka Beban Tanggungan	0,45	0,46	0,46
5	Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin (jiwa)			
	- Laki-laki	706.856	711.598	717.052
	- Perempuan	701.651	706.703	713.210

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2020

Dari tabel diatas diketahui bahwa dari tahun 2018-2020 jumlah penduduk di Kabupaten Ciamis terus mengalami kenaikan dengan komposisi penduduk tertinggi didominasi oleh jenis kelamin laki-laki sebanyak 717.052 orang (50,13 %) sedangkan perempuan sebanyak 713.210 orang (49,87 %). Komposisi penduduk Kabupaten Ciamis menurut jenis kelamin Tahun 2018-2020 lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Grafik 1.1**



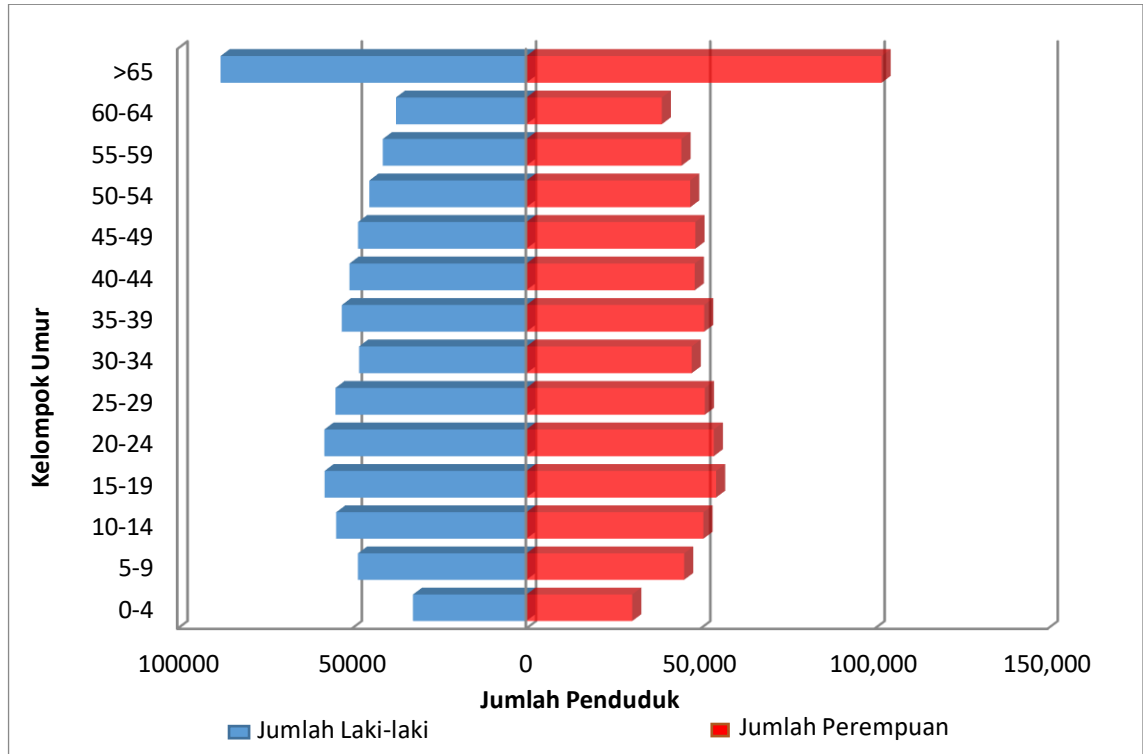
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2020

Penyebaran penduduk di Kabupaten Ciamis terkonsentrasi di wilayah yang relatif telah berkembang karena ketersediaan akses untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan. Wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2020 terdapat di Kecamatan Ciamis, Sindangkasih, Banjarsari, Cikoneng dan Kawali. Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Tambaksari dan Cidolog. Kepadatan penduduk dihitung dari hasil bagi jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk merupakan indikator awal untuk mendeteksi tingkat perkembangan wilayah beserta seluruh kemungkinan dampak yang di timbulkan.

Menurut struktur umur, penduduk di Kabupaten Ciamis tahun 2020 didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 978.919 orang (68,44 %), kelompok usia muda (0-14 tahun) sebanyak 261.726 orang (18,30 %), dan usia tua (65 tahun keatas) sebanyak 189.617 orang (13,26 %). Berdasarkan data tersebut maka Angka Beban Tanggungan pada tahun 2020 adalah sebesar 0,46 persen.

Piramida penduduk dapat menggambarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin pada setiap kelompok umur berbeda. Piramida penduduk Kabupaten Ciamis tahun 2020 dapat diilustrasikan pada grafik berikut ini :

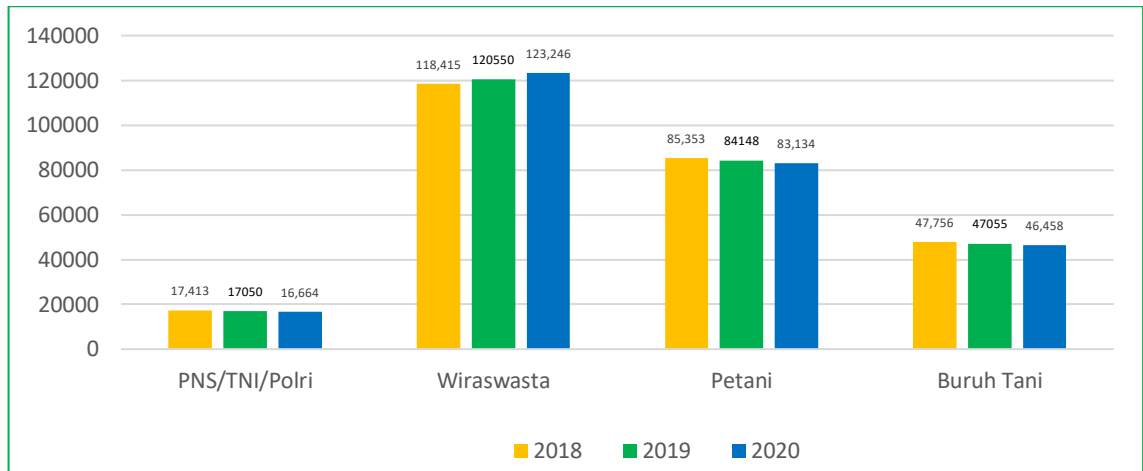
**Grafik 1.2**  
**Piramida Penduduk Kabupaten Ciamis**  
**Tahun 2020**



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2020

Pada tahun 2020, mayoritas penduduk di Kabupaten Ciamis memiliki mata pencaharian di sektor wiraswasta yakni sebanyak 123.246 orang, petani sebanyak 83.134 orang, buruh tani sebanyak 46.458 orang, dan PNS/TNI/Polri sebanyak 16.664 orang. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Ciamis berdasarkan kategori pekerjaan pada tahun 2018-2020 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

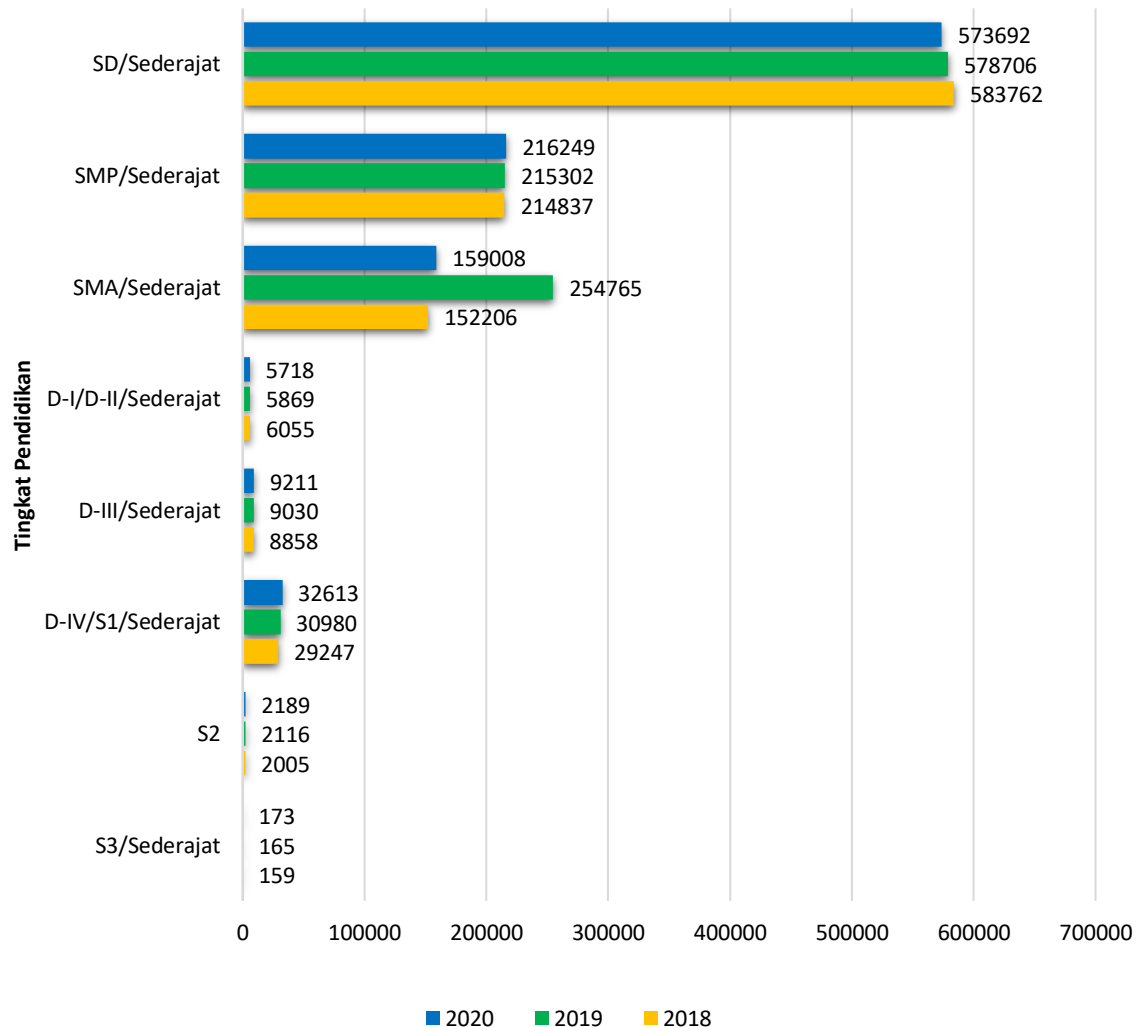
**Grafik 1.3**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kategori Pekerjaan**  
**Tahun 2018-2020**



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2020

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa dari tahun 2018 ke tahun 2020 jumlah penduduk dengan kategori pekerjaan buruh tani, petani serta PNS/TNI/Polri mengalami penurunan, sedangkan penduduk dengan pekerjaan wiraswasta mengalami peningkatan dari 118.415 orang menjadi 123.246 orang. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Ciamis dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2018-2020 dapat dilihat pada grafik di berikut ini:

**Grafik 1.4**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Tahun 2018-2020**



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2020

Dari grafik di atas diketahui bahwa pada tahun 2020 terdapat 573.692 orang (40,11%) yang memiliki ijazah tertinggi SD/ sederajat, 216.249 orang (15,12%) memiliki ijazah tertinggi SMP/ sederajat, 159.008 orang (11,12%) memiliki ijazah tertinggi SMA/ sederajat, 5.718 orang (0,40%) memiliki ijazah tertinggi DI/DII/ sederajat, 9.211 orang (0,64%) memiliki ijazah tertinggi D-III/ sederajat, 32.613 orang (2,28 %) memiliki ijazah tertinggi D-IV sederajat dan S-1, 2.189 orang (0,15 %) memiliki ijazah tertinggi S2, serta 173 orang (0,01%) memiliki ijazah tertinggi S3.



Selama periode tahun 2018-2020, penduduk yang memiliki ijazah tertinggi SD/ sederajat, SMA/ sederajat dan D-I/D-II sederajat mengalami penurunan, sedangkan penduduk yang memiliki ijazah SMP, D-III, D-IV/S-1, S-2 dan S3/ Sederajat cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Ciamis terhadap pentingnya pendidikan semakin meningkat.

### 1.2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu pengukuran yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar antara lain umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Oleh karena itu IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

Perkembangan IPM Kabupaten Ciamis setiap tahunnya senantiasa menunjukkan peningkatan. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2018-2020) IPM mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,43 poin (0,617 % per tahun). Selama periode tahun 2020 pencapaian IPM Kabupaten Ciamis menunjukkan tren yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, IPM beberapa kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan (sumber data: <http://bps.go.id>). Kondisi ini menggambarkan bahwa indikator makro pembangunan Kabupaten Ciamis juga mengalami peningkatan. Hal ini diharapkan menjadi salah satu indikasi bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan IPM ini didasari oleh peningkatan indeks parsial pembentuk IPM itu sendiri yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Pengeluaran. Perkembangan IPM di Kabupaten Ciamis Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini:

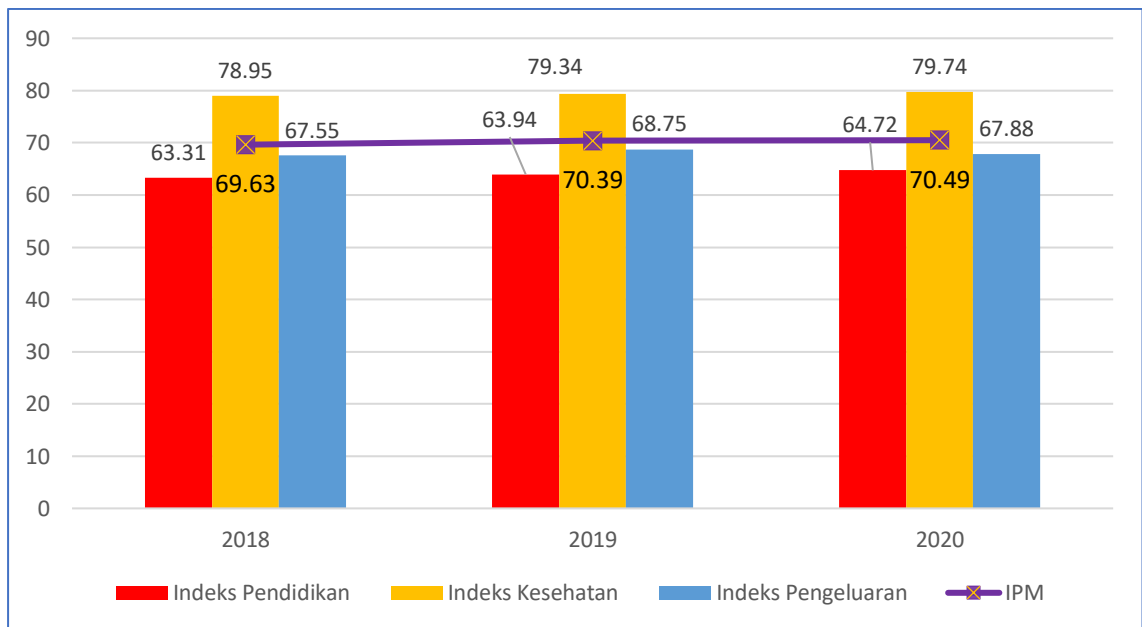
**Tabel 1.3**  
**Perkembangan IPM Kabupaten Ciamis**  
**Tahun 2018-2020**

Aspek IPM	Tahun		
	2018	2019	2020*)
<b>Skor IPM</b>	<b>69,63</b>	<b>70,39</b>	<b>70,49</b>
1. Indeks Pendidikan	63,31	63,94	64,72
a. Angka Harapan Lama Sekolah (th)	13,67	13,79	14,06
b. Angka Rata-rata Lama Sekolah (th)	7,60	7,69	7,70
2. Indeks Kesehatan	78,95	79,34	79,74
• AHH(th)	71,32	71,57	71,83
3. Indeks Pengeluaran	67,55	68,75	67,88
• Daya Beli Masyarakat (Rp.)	9.190	9.557	9.288

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

Keterangan: \*) Angka Sangat Sementara (BPS), data bulan Agustus 2020

**Grafik 1.5**  
**Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia**  
**Di Kabupaten Ciamis Tahun 2018-2020**



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis Tahun 2020

Indeks Pendidikan dihitung berdasarkan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Indeks Pendidikan pada tahun

2018-2020 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,70 poin (1,107 % per tahun). Salah satu faktor pendorong meningkatnya Indeks Pendidikan adalah adanya upaya pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan juga turut mendorong terhadap peningkatan Indeks Pendidikan di Kabupaten Ciamis.

Indeks Kesehatan dihitung berdasarkan Angka Harapan Hidup (AHH). Pada tahun 2018-2020, Indeks Kesehatan di Kabupaten Ciamis mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,39 poin (0,498 %) setiap tahunnya. Peningkatan ini menggambarkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Ciamis semakin membaik dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya. Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk terus dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan sarana dan fasilitas kesehatan serta kualitas pelayanannya. Selain itu, kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap pola hidup sehat dan penggunaan fasilitas kesehatan secara optimal juga turut mendorong peningkatan Indeks Kesehatan di Kabupaten Ciamis.

Demikian halnya dengan Indeks Pengeluaran yang dihitung berdasarkan Daya Beli Masyarakat. Pada tahun 2018-2020, Indeks Pengeluaran di Kabupaten Ciamis menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 0,16 poin (0,256 %) setiap tahunnya. Peningkatan Indeks Pengeluaran tersebut menggambarkan bahwa tingkat kemampuan masyarakat untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan, baik makanan maupun non makanan, mengalami peningkatan setiap tahunnya. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan daya beli masyarakat antara lain melalui upaya peningkatan akses masyarakat ke pusat-pusat ekonomi serta pengendalian harga-harga kebutuhan pokok sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menjangkau kebutuhan hidupnya.

## 1.2.4 Perekonomian

### 1.2.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan perekonomian daerah dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB, baik PDRB Atas dasar Harga Berlaku (AdHB) maupun Atas dasar Harga Konstan (AdHK). PDRB AdHB menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Struktur ekonomi dapat dilihat dari distribusi persentase PDRB sektoral yang menunjukkan peranan dan kontribusi masing-masing kategori terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu kategori semakin besar pula pengaruh kategori terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian dari suatu daerah. Sementara PDRB AdHK berguna untuk menunjukkan LPE secara keseluruhan maupun sektoral (lapangan usaha) dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar. Nilai dan kontribusi berdasarkan lapangan usaha PDRB AdHB Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel dan Grafik berikut:

**Tabel 1.4**  
**PDRB AdHB Kabupaten Ciamis**  
**Tahun 2018-2020**

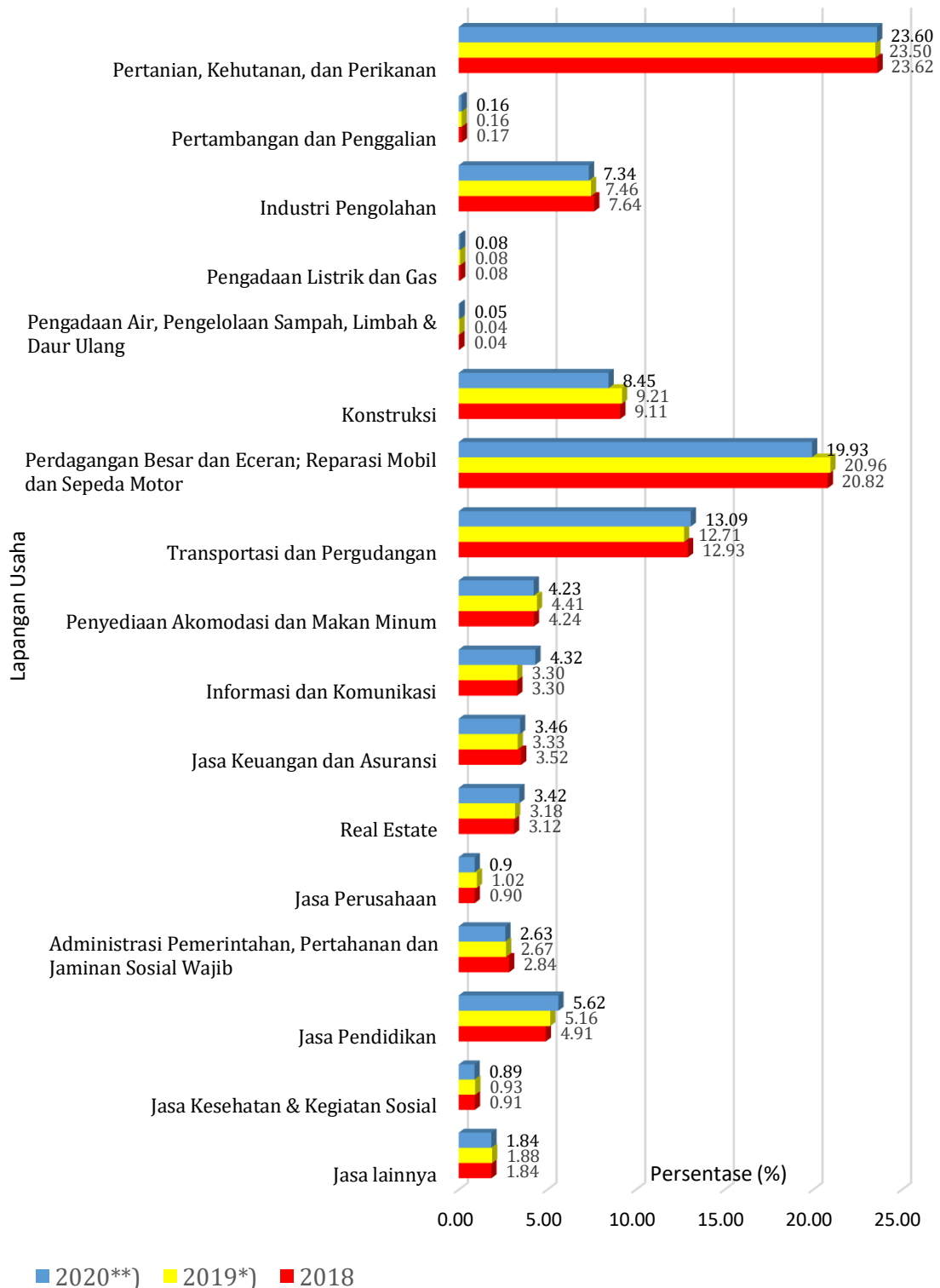
Kategori	Lapangan Usaha	PRDB AdHB (Juta Rp)		
		2018	2019*)	2020**)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.871.780,33	7.412.341,87	7.545.446,25
B	Pertambangan dan Penggalian	50.303,70	50.013,4	51.358,26
C	Industri Pengolahan	2.221.217,70	2.351.619,64	2.348.430,42
D	Pengadaan Listrik dan Gas	23.737,80	25.195,98	25.698,21
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	11.596,91	13.329,21	14.688,48
F	Konstruksi	2.651.168,30	2.903.977,65	2.700.373,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.058.070,70	6.608.815,41	6.371.489,89
H	Transportasi dan Pergudangan	3.761.950,80	4.008.472,17	4.185.223,71
I	Penyediaan Akomodasi dan	1.234.668,10	1.389.999,40	1.351.325,92

Kategori	Lapangan Usaha	PRDB AdHB (Juta Rp)		
		2018	2019*)	2020**)
	Makan Minum			
J	Informasi dan Komunikasi	958.928,60	1.039.411,88	1.380.607,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.023.213,20	1.050.529,33	1.107.700,27
L	Real Estate	908.244,70	1.003.794,97	1.093.788,99
M,N	Jasa Perusahaan	262.427,70	322.386,07	288.748,99
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	827.014,00	841.914,20	839.695,43
P	Jasa Pendidikan	1.428.325,20	1.627.633,90	1.797.152,10
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	263.648,60	293.052,57	284.524,23
R,S,T,U	Jasa lainnya	534.165,50	593.616,35	588.152,33
<b>PDRB AdHB</b>		<b>29.090.461,84</b>	<b>31.536.104,02</b>	<b>31.974.405,03</b>

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, Tahun 2020

\*) Angka Sementara \*\*) Angka Sangat Sementara

**Grafik 1.6**  
**Distribusi Persentase PDRB AdHB Tahun 2018-2020**



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, Tahun 2020  
Keterangan :\*) Angka Sementara , \*\*) Angka Sangat Sementara

Data pada tabel dan grafik tersebut menunjukkan bahwa PDRB AdHB Kabupaten Ciamis setiap tahun menunjukkan peningkatan. PDRB AdHB Kabupaten Ciamis tahun 2019 meningkat sebesar 8,41 % dari tahun 2017 dan pada tahun 2020 meningkat sebesar 1,30 % dari tahun 2019. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor unggulan Kabupaten Ciamis. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berdasarkan harga berlaku pada tahun 2020 terhadap perekonomian Kabupaten Ciamis, yaitu sebesar 23,60 %. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2020 mengalami sedikit kenaikan dari tahun 2019 (23,50 %) tetapi mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2018 (23,62 %).

Kontribusi sektor perekonomian terbesar kedua berdasarkan harga berlaku pada tahun 2020 adalah sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor yang memberikan kontribusi sebesar 19,93 %. Perkembangan sektor ini pada tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 (20,96 %) dan tahun 2018 (20,82 %).

Kontribusi sektor terbesar ketiga berdasarkan harga berlaku pada tahun 2020 adalah sektor transportasi dan pergudangan yang memberikan kontribusi sebesar 13,09 %. Perkembangan sektor ini pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019 yang berkontribusi sebesar 12,71 % dan tahun 2018 yang berkontribusi sebesar 12,93 %.

Selanjutnya, perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Ciamis dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas dasar Harga Konstan (PDRB AdHK) menunjukkan adanya penurunan dari sebesar 22 trilyun pada 2019 menjadi 21,97 trilyun pada tahun 2020. Tetapi, pertumbuhan PDRB AdHK tahun 2020 (21,97 trilyun) tersebut masih diatas pertumbuhan PDRB AdHK tahun 2018 (20,87 trilyun).

**Tabel 1.5**  
**PDRB AdHK Kabupaten Ciamis**  
**Tahun 2018 - 2020**

Kategori	Lapangan Usaha	PDRB AdHK (Juta Rp)		
		2018	2019*)	2020**)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.234.706,9	4.356.420,0	4.420.522,3
B	Pertambangan dan Penggalian	39.370,9	38.367,9	38.585,5
C	Industri Pengolahan	1.664.729,9	1.748.890,0	1.720.352,4
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14.746,2	15.429,8	15.817,8
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.518,0	8.230,0	9.030,4
F	Konstruksi	2.029.803,6	2.156.546,2	1.996.808,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.615.621,2	4.885.267,8	4.620.386,3
H	Transportasi dan Pergudangan	2.498.027,2	2.661.209,2	2.650.256,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	886.759,5	959.691,1	884.121,2
J	Informasi dan Komunikasi	955.362,1	1.043.444,0	1.385.806,5
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	753.863,6	759.469,9	800.614,1
L	Real Estate	704.323,8	771.602,9	835.150,4
M,N	Jasa Perusahaan	199.693,9	217.880,3	189.316,2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	677.877,4	685.868,1	678.833,6
P	Jasa Pendidikan	989.158,6	1.040.270,9	1.093.664,8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	203.797,5	220.493,6	208.666,7
R,S,T,U	Jasa lainnya	403.329,1	432.158,2	422.476,9
<b>PDRB AdHK</b>		<b>20.878.689,3</b>	<b>22.001.239,9</b>	<b>21.970.410,4</b>

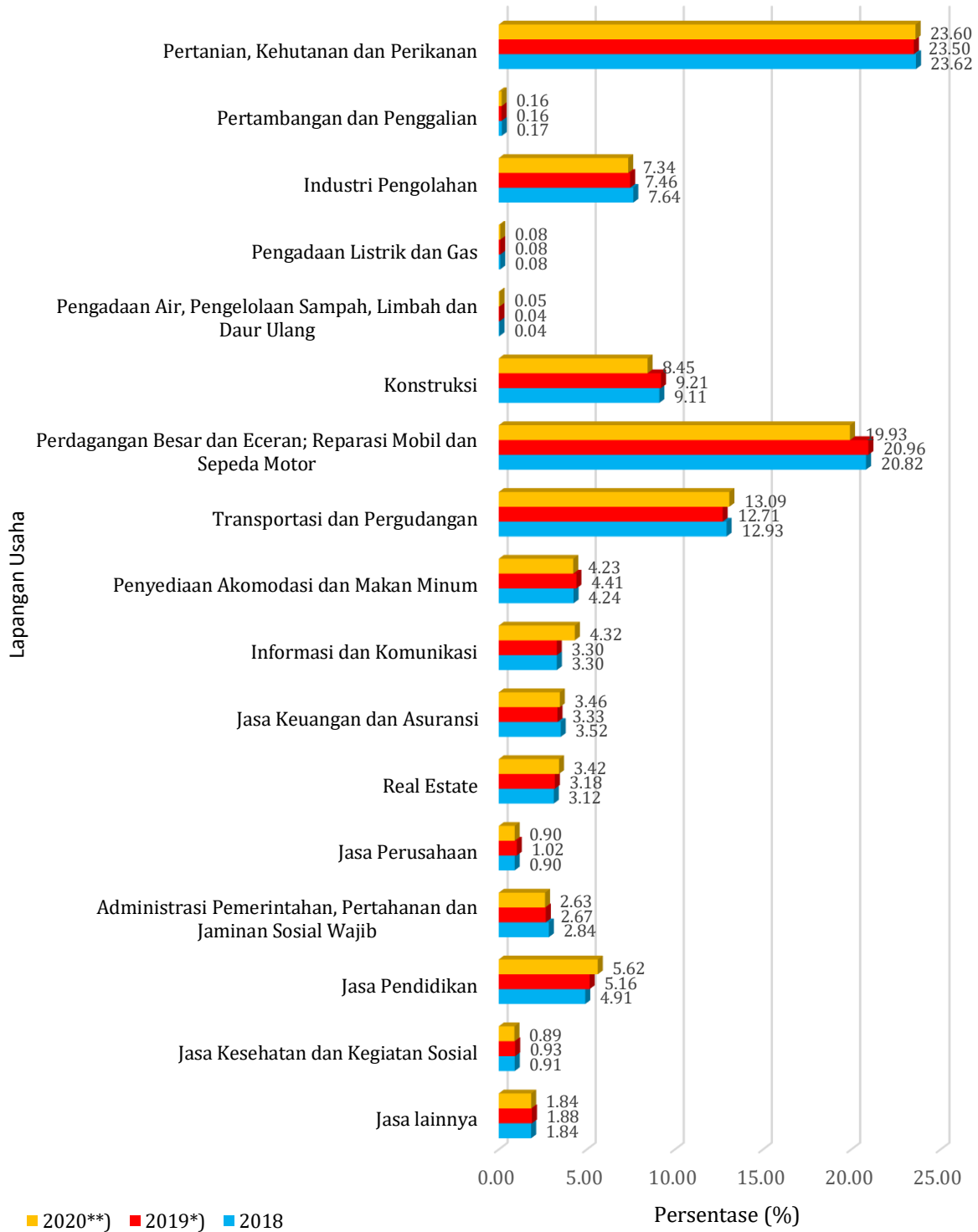
Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, Tahun 2020

\*) Angka Sementara

\*\*) Angka Sangat Sementara



**Grafik 1.7**  
**Distribusi Persentase PDRB AdHK Kabupaten Ciamis**  
**Tahun 2018 - 2020**



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, Tahun 2020  
 Keterangan : \*) Angka Sementara  
 \*\*) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, diketahui bahwa distribusi PDRB AdHK Kabupaten Ciamis Tahun 2020 didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta transportasi dan pergudangan dengan kontribusi sebesar 56,61 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 (57,17 %) dan tahun 2018 (57,38 %) sektor tersebut cenderung menunjukkan penurunan. Penurunan besarnya kontribusi ini diduga terjadi karena adanya peningkatan kontribusi di sektor lain dengan jumlah yang relatif lebih besar.

#### 1.2.4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. LPE digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan ekonomi, sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional, serta sebagai dasar pembuatan perkiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan. LPE Kabupaten Ciamis tahun 2018-2020 dapat dilihat dalam dan grafik berikut :

**Tabel 1.6**

**LPE Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan  
Kabupaten Ciamis Tahun 2018 - 2020**

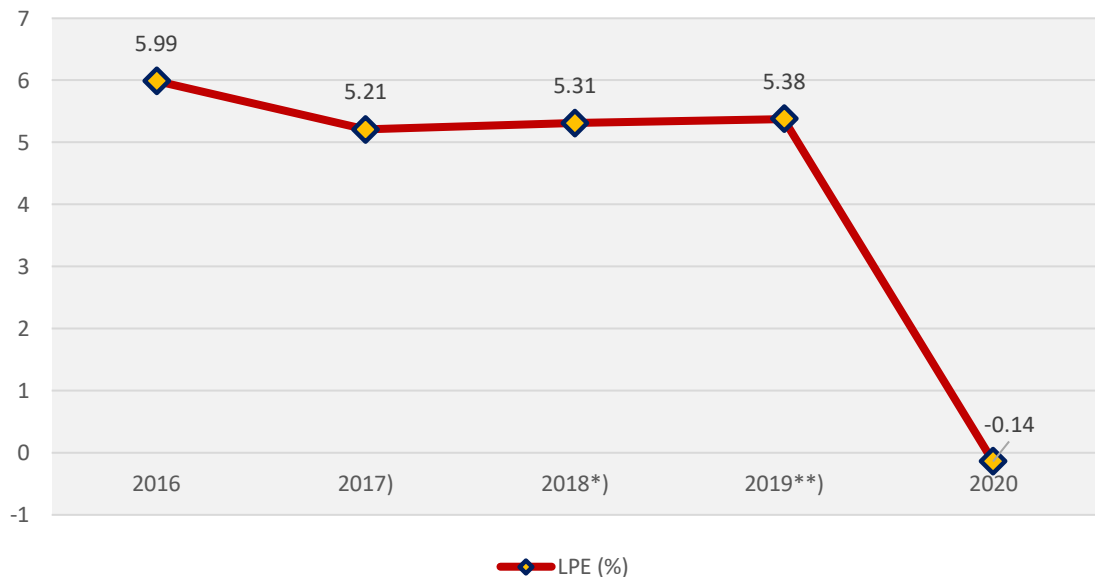
Kategori	Lapangan Usaha	LPE (%)		
		2018	2019	2020*)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,67	2,87	1,47
B	Pertambangan dan Penggalian	2,99	-2,55	0,57
C	Industri Pengolahan	7,14	5,06	-1,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,77	4,64	2,51
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,90	9,47	9,72
F	Konstruksi	9,25	6,24	-7,41
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,99	5,84	-5,42
H	Transportasi dan Pergudangan	5,72	6,53	-0,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,90	8,22	-7,87
J	Informasi dan Komunikasi	9,13	9,22	32,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,05	0,74	5,42
L	Real Estate	9,62	9,55	8,24
M,N	Jasa Perusahaan	8,99	9,11	-13,11

Kategori	Lapangan Usaha	LPE (%)		
		2018	2019	2020*)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,10	1,18	-1,03
P	Jasa Pendidikan	5,99	5,17	5,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,09	8,19	-5,36
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,71	7,15	-2,24
Laju Pertumbuhan Ekonomi		5,31	5,38	-0,14

Sumber : BPS Kabupaten Ciamis (2020)  
 Keterangan : \*) Angka Sangat Sementara

Grafik 1.8

Perkembangan LPE Kabupaten Ciamis Tahun 2016 - 2020



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis

Data pada tabel dan grafik tersebut menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Ciamis tahun 2020 berada pada angka -0,14 %. Perkembangan LPE Kabupaten Ciamis pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5,52 % dibandingkan LPE tahun 2019 (5,38 %). Dampak Covid-19 menyebabkan hampir seluruh sektor lapangan usaha mengalami kontraksi terutama pada sektor transportasi dan pergudangan, konstruksi, perdagangan serta penyediaan akomodasi makanan dan minuman akibat adanya pembatasan mobilitas masyarakat. Sektor yang tumbuh positif diantaranya pertanian, kehutanan dan perikanan, pengadaan air, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, *real estate* dan jasa pendidikan.

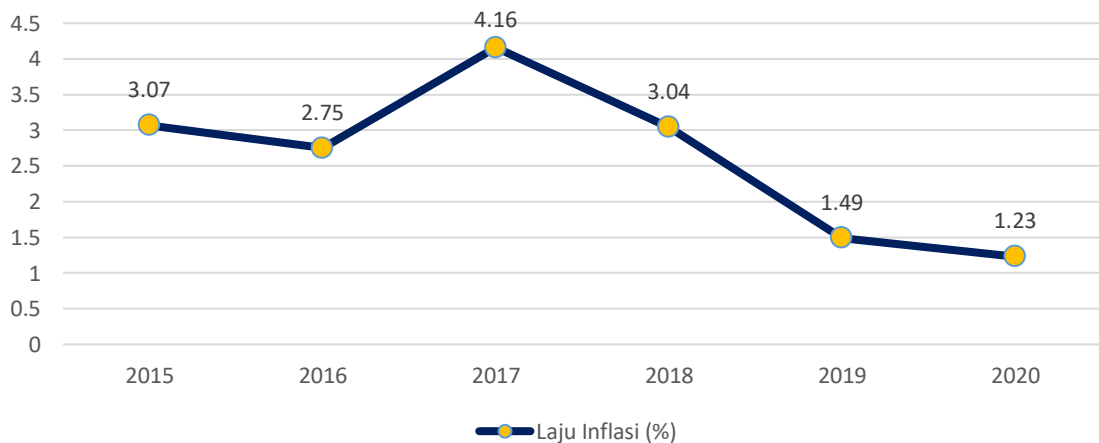
Distribusi terbesar untuk LPE tahun 2020 di Kabupaten Ciamis berasal dari lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 32,81 %, diikuti oleh lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 9,72 % serta lapangan usaha *Real Estate* sebesar 8,24 %.

### 1.2.4.3 Inflasi

Laju inflasi Kabupaten Ciamis pada tahun 2020 sebesar 1,23 %. Angka tersebut menunjukkan bahwa inflasi di Kabupaten Ciamis tergolong inflasi ringan atau inflasi merayap (*creeping inflation*) yang masih wajar dan belum mengganggu perekonomian secara menyeluruh. Laju inflasi pada tahun 2020 mengalami perlambatan sebesar 0,26 % dibandingkan tahun 2019. Kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2019 yang mengalami perlambatan sebesar 1,55 % dibandingkan tahun 2018. Tingkat Inflasi Kabupaten Ciamis tiga (3) tahun terakhir terus mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun 2017 yang merupakan tingkat inflasi tertinggi selama lima (5) tahun terakhir. Perkembangan tingkat inflasi di Kabupaten Ciamis tahun 2015-2020 dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 1.9**

**Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2020**



Sumber : BPS Kabupaten Ciamis, Tahun 2020

### 1.3 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah baik dalam jangka panjang, menengah maupun tahunan. Hal ini dikarenakan analisis isu-isu strategis merupakan salah satu dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan secara moral dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika birokrasi.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi kegagalan dalam pembangunan daerahnya. Isu strategis pembangunan Kabupaten Ciamis berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kesempatan pendidikan.
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
3. Peningkatan daya beli masyarakat.
4. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.
5. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur.
6. Peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.
7. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana alam.
8. Peningkatan kapasitas keuangan daerah.
9. Pemberdayaan masyarakat dan desa.
10. Peningkatan pengembangan kawasan pertumbuhan.
11. Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan.

Berbagai isu strategis tersebut dipertimbangkan dengan memperhatikan identifikasi permasalahan Kabupaten Ciamis, isu dunia internasional serta penelaahan kebijakan pembangunan nasional (Nawacita) dan daerah lain di sekitar Kabupaten Ciamis agar dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

## 1.4 KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Kewenangan Daerah kabupaten/kota meliputi 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Urusan Wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terdiri dari 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Ciamis melaksanakan seluruh urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah melaksanakan penataan dan pembentukan organisasi perangkat daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016. Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;

4. Dinas daerah, terdiri dari:
  - a. Dinas Pendidikan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Sosial;
  - d. Dinas Tenaga Kerja;
  - e. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - g. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
  - h. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
  - i. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan;
  - j. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  - k. Dinas Peternakan dan Perikanan;
  - l. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - o. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
  - p. Dinas Perhubungan;
  - q. Dinas Pariwisata;
  - r. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - s. Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Badan Daerah, terdiri dari :
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
  - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Perangkat Daerah Lain :
  - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - b. Rumah Sakit Umum Daerah.
7. Kecamatan

Landasan pemikiran pembentukan perangkat daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan pengkajian dan analisis terhadap:

1. Kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah;

3. Intensitas beban tiap-tiap urusan pemerintahan;
4. Kemampuan keuangan daerah;
5. Ketersediaan sumber daya aparatur;
6. Efektifitas dan efisiensi.



## BAB II

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Ciamis Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2020, serta Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020.

### 2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

#### 2.1.1 Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi obyektif dan potensi yang dimiliki serta mempertimbangkan kesinambungan pembangunan sesuai tahapan pembangunan jangka panjang daerah, ditetapkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah “**Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera untuk Semua**”. Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

**Mantapnya  
Kemandirian  
Ekonomi**

: Bahwa dalam 5 tahun ke depan, perekonomian Kabupaten Ciamis dalam kondisi yang mantap dalam arti kokoh dan kuat terutama dalam menghadapi tantangan perekonomian nasional dan global. Perekonomian Kabupaten Ciamis diupayakan harus mencapai pertumbuhan yang tinggi, dimana secara simultan akan berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan daya beli masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi secara signifikan. Oleh karenanya perekonomian dibangun dengan pola pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi rakyat dengan memanfaatkan potensi unggulan lokal dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah dan mengurangi ketergantungan kepada daerah lain.

**Sejahtera  
Untuk  
Semua**

: Bahwa pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemandirian ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harus dinikmati oleh semua secara adil dan merata.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 merupakan visi yang selaras dengan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, yaitu “Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera Tahun 2025”. Kriteria capaian Visi Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, secara jelas direfleksikan pada Visi “Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”.

### 2.1.2 Misi Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Ciamis, Tahun 2019-2024, ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

**Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**

Bahwa untuk tercapainya kemandirian ekonomi, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mempunyai kemampuan untuk mengolah sumber daya ekonomi yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan.

**Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah**

Bahwa untuk mendukung aktivitas perekonomian, diperlukan ketersediaan infrastruktur yang akan menunjang perkembangan ekonomi wilayah.

**Misi 3 : Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal**

Bahwa perekonomian daerah dibangun dengan memberdayakan masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha ekonomi rakyat sesuai dengan potensi- potensi unggulan lokal guna memperkuat struktur perekonomian daerah.

**Misi 4 : Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan**

Bahwa sumber daya alam dan Lingkungan Hidup sebagai modal pembangunan ekonomi harus digunakan secara bijaksana dengan memperhatikan aspek-aspek kelestariannya sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan.

**Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien**

Bahwa untuk mendukung tercapainya kemandirian ekonomi, diperlukan tata kelola Pemerintahan yang semakin efektif dan efisien untuk tercapainya pelayanan publik yang berkualitas.

**Misi 6 : Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa**

Bahwa otonomi desa sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diperkuat dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dan desa untuk mencapai kemandirian, baik kemandirian sosial maupun ekonomi.

**2.1.3 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran merupakan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dilakukan untuk menyusun dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang ingin diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran pada setiap Misi pembangunan Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024**

Misi		Tujuan		Sasaran	
1.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1.1	Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia	1.1.1	Terwujudnya SDM yang cerdas, kreatif dan inovatif serta berakhlak mulia
				1.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
				1.1.3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Atlet olahraga, pelaku seni dan budaya
				1.1.4	Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak perempuan dan anak
				1.1.5	Meningkatnya kualitas dan kuantitas peserta KB dan ketahanan keluarga
				1.1.6	Berkurangnya jumlah penduduk miskin
				1.1.7	Meningkatnya daya saing tenaga kerja

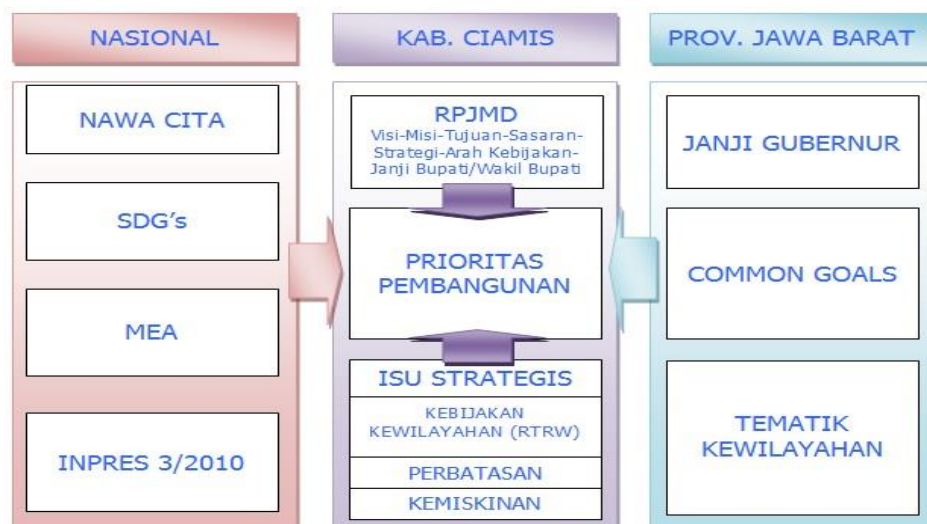
Misi		Tujuan		Sasaran	
2.	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah	2.1	Terwujudnya Infrastruktur daerah yang menunjang perkembangan wilayah	2.1.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi
				2.1.2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pengelolaan Sumber Daya Air
				2.1.3	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman
3.	Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal	3.1	Meningkatnya pembangunan ekonomi inklusif dan berdaya saing	3.1.1	Meningkatnya daya saing usaha koperasi, IKM dan UMKM
				3.1.2	Terbentuknya BUMD
				3.1.3	Meningkatnya daya saing usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan
				3.1.4	Meningkatnya investasi di daerah
				3.1.5	Meningkatnya daya saing pariwisata
				3.1.6	Meningkatnya transaksi pada sector perdagangan
				3.1.7	Terwujudnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan
4.	Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	4.1	Terpeliharanya kelestarian fungsi LH sebagai penyangga sistem kehidupan	4.1.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
				4.1.2	Meningkatnya ketahanan dan adaptasi terhadap bencana
				4.1.3	Terwujudnya penataan ruang wilayah sesuai dengan kemampuan dan daya dukung lingkungan
5.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	5.1	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	5.1.1	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah
				5.1.2	Meningkatnya kondusifitas wilayah
6.	Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa	6.1	Mewujudkan Desa yang maju, mandiri dan sejahtera	6.1.1	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa, Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat Desa

## 2.2 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

Prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2020 disusun berdasarkan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan dan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2019, serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2020. Penetapan prioritas pembangunan juga memperhatikan tantangan dan isu pembangunan nasional tahun 2020 serta isu strategis Provinsi Jawa Barat serta isu strategis Kabupaten Ciamis. Keterkaitan kebijakan pembangunan Kabupaten Ciamis dengan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.1**

### **Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional**



Prioritas, sasaran dan program pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 adalah sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Prioritas Pembangunan, Sasaran Daerah dan Program Pembangunan**  
**Kabupaten Ciamis Tahun 2020**

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan
1.	Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia	Terwujudnya SDM yang cerdas, kreatif dan inovatif serta berakhlak mulia	Program Pendidikan Anak Usia Dini
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
			Program Pendidikan Non Formal
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
			Program Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Upaya kesehatan masyarakat
			Program pengendalian penyakit
			Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan
			Program Pelayanan Kesehatan
			Program Pengembangan/Standarisasi Sumber Daya dan Pembiayaan Kesehatan di RSUD Ciamis
			Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata di RSUD Ciamis

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas Atlet olahraga, pelaku seni dan budaya	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
			Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
			Program Pembinaan Olahraga
			Program Pengelolaan Keragaman Budaya
			Program Pengembangan kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
		Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak perempuan dan anak	Program Pembinaan Kepemudaan
			Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
			Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
			Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan
			Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas peserta KB dan ketahanan keluarga	Program Keluarga Berencana
			Program Pengendalian Penduduk
			Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga



No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan
		Berkurangnya jumlah penduduk miskin	<p>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya</p> <p>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</p> <p>Program Pembinaan anak terlantar</p> <p>Program pembinaan panti asuhan/panti jompo</p> <p>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</p>
		Meningkatnya daya saing tenaga kerja	<p>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <p>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</p> <p>Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</p>
2.	Terwujudnya Infrastruktur daerah yang menunjang perkembangan wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi	<p>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</p> <p>Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong</p> <p>Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</p> <p>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</p> <p>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</p> <p>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</p> <p>Program Peningkatan dan</p>

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan
			Pengamanan Lalu Lintas
			Program Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
			Program Peningkatan Promosi Keselamatan LLAJ
			Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pengelolaan Sumber Daya Air	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
			Program Pengendalian daya rusak air
		Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
			Program Pengembangan Perumahan
			Program Kawasan Kumuh Perkotaan
3.	Meningkatnya pembangunan ekonomi inklusif dan berdaya saing	Meningkatnya Daya Saing Usaha Koperasi, IKM dan UMKM	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
			Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
			Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
			Program Pengembangan Industri Kawasan Agropolitan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan
			Program Peningkatan dan Pengembangan Promosi Produk Agropolitan
		Terbentuknya BUMD	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
		Meningkatnya Daya Saing Usaha Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
			Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
			Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu hasil Tanaman Pangan
			Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Hotikultura Ramah Lingkungan
			Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
			Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian
			Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan
			Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian
			Program Pengembangan Kawasan Agropolitan
		Program Penyediaan dan	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan
			Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian
			Pengembangan Agropolitan Bidang Perikanan
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan
			Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
			Pengembangan Agropolitan Bidang Peternakan
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan
			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
		Meningkatnya investasi di daerah	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
			Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana
			Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
		Meningkatnya daya saing pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
			Program Pengembangan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan
			Destinasi Pariwisata
			Program Pengembangan Kemitraan
		Meningkatkan Transaksi pada Sektor Perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
		Terwujudnya Ketahanan Pangan menuju Kemandirian Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan
4.	Terpeliharanya kelestarian fungsi LH sebagai penyangga sistem kehidupan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
			Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
		Meningkatnya ketahanan dan adaptasi terhadap bencana	Program Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim
			Program Mitigasi Bencana
			Program Penyebarluasan Informasi kebencanaan dan Penguatan Peran Masyarakat
			Program Pengannganan Darurat dan Evakuasi Korban Bencana
			Program Pengelolaan Logistik dan Peralatan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan
			Penunjang Penanganan Bencana
			Program Pemulihan Pasca Bencana
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Terwujudnya penataan ruang wilayah sesuai dengan kemampuan dan daya dukung lingkungan	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
			Program Perencanaan Tata Ruang
			Program Pemanfaatan Ruang
5.	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian
			Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya
			Program Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
			Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
			Program Pengembangan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan
			Komunikasi, Informasi dan Media Massa
			Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
			Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
			Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (PPIPDA)
			Program Penganggaran Keuangan Daerah
			Program Pelaporan Keuangan Daerah
			Program Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
			Program Penataan Administrasi Kependudukan
			Program Penataan Pelayanan Pencatatan Sipil
			Program Penataan Data Kependudukan
			Program Pemanfaatan Data Kependudukan
			Program pengembangan kompetensi aparatur
			Program pengembangan Karir, Mutasi dan Kepangkatan
			Program Penilaian kinerja

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program Pembangunan
			dan Pembinaan Disiplin Aparatur
			Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
		Meningkatnya kondusivitas wilayah	Program Peningkatan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama)
			Program pendidikan Politik Masyarakat
			Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Konflik
			Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
			Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal
			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
6.	Mewujudkan Desa yang maju, mandiri dan sejahtera	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa, Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
			Program Peningkatan Pembangunan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna
			Program Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa
			Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Desa



## 2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis. Tujuan ditetapkannya IKU adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		SKPD Penanggung Jawab
1	Terwujudnya SDM yang cerdas, kreatif dan inovatif serta berakhlak Mulia	1.1	Rata-rata Lama Sekolah	Dinas Pendidikan/BPS
		1.2	Harapan Lama Sekolah	Dinas Pendidikan/BPS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		SKPD Penanggung Jawab
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1	Usia Harapan Hidup	Dinas Kesehatan/BPS
3	Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak perempuan dan anak	3.1	Indeks Pembangunan Pemuda	Dinas P2KBP3A/BPS
		3.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas peserta KB dan ketahanan Keluarga	4.1	Total Fertility Rate (TFR)	Dinas P2KBP3A/BPS
5	Berkurangnya jumlah penduduk miskin	5.1	Persentase Penduduk Miskin	Dinas Sosial/BPS
6.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	6.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Dinas Tenaga Kerja
7.	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi	7.1	Kemantapan Jalan dan Jembatan Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
8.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pengelolaan Sumber Daya Air	8.1	Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
9.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	9.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Diskominfo/BPS
10.	Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat	10.1	Indeks Gini	Diskominfo/BPS
11.	Meningkatnya kesejahteraan petani	11.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Diskominfo/BPS
12.	Meningkatnya Investasi di Daerah	12.1	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Diskominfo/BPS /DPMPTSP
13.	Meningkatnya daya saing pariwisata	13.1	Indeks daya saing pariwisata	Diskominfo/BPS /Dinas Pariwisata
14.	Terwujudnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan	14.1	Skor PPH	Diskominfo/BPS / Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
15.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	15.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		SKPD Penanggung Jawab
			(IKLH)	Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
16.	Meningkatnya ketahanan dan adaptasi terhadap bencana	16.1	Indeks Risiko Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17.	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	17.1	Hasil Evaluasi SAKIP	Inspektorat/ Bagian Organisasi
		17.2	Hasil Evaluasi LPPD	Bagian Pemerintahan Umum Setda
		17.3	Opini BPK	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		17.4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi Setda
		17.5	Maturitas SPIP	Inspektorat
		17.6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Diskominfo
18.	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa	18.1	Indeks Desa Membangun (IDM)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

## 2.4 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2020 beserta perubahannya. Perjanjian Kinerja tersebut menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis merupakan wujud nyata komitmen untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, sebagai dasar bagi untuk pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja, serta sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis pada Tahun 2020 seperti terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.4**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis**  
**Tahun 2020**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Tahun 2020	
1	Terwujudnya SDM yang cerdas, kreatif dan inovatif serta berakhlak mulia	1.1	Rata-rata Lama Sekolah	7,70	Tahun
		1.2	Harapan Lama Sekolah	13,96	Tahun
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1	Usia Harapan Hidup	71,83	Tahun

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Tahun 2020	
3	Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak perempuan dan anak	3.1	Indeks Pembangunan Pemuda	0,558	Poin
		3.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,66	Poin
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas peserta KB dan ketahanan keluarga	4.1	Total Fertility Rate (TFR)	2,05	Angka
5	Berkurangnya jumlah penduduk miskin	5.1	Persentase Penduduk Miskin	7,13-7,64	%
6.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	6.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,56-5,67	%
7.	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi	7.1	Kemantapan Jalan dan Jembatan Kabupaten	72,22	%
8.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pengelolaan Sumber Daya Air	8.1	Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	49,548	%
9.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	9.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	1,65-2,96	%
10.	Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat	10.1	Indeks Gini	0,35	Poin
11.	Meningkatnya kesejahteraan petani	11.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	112,80	Poin
12.	Meningkatnya Investasi di Daerah	12.1	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	5,5	%
13.	Meningkatnya daya saing pariwisata	13.1	Indeks daya saing pariwisata	85	Poin
14.	Terwujudnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan	14.1	Skor PPH	77,50	Poin
15.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	15.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	54,99	Poin
16.	Meningkatnya ketahanan dan adaptasi terhadap bencana	16.1	Indeks Risiko Bencana	168	Poin

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Tahun 2020	
17.	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	17.1	Hasil Evaluasi SAKIP	BB	Predikat
		17.2	Hasil Evaluasi LPPD	Tinggi	Predikat
		17.3	Opini BPK	WTP	Predikat
		17.4	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,66	Poin
		17.5	Maturitas SPIP	3,00	Level
		17.6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1,66	Poin
18.	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa, Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat desa	18.1	Indeks desa Membangun (IDM)	0,6300	Poin

Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan kinerja untuk menggambarkan capaian kinerja dan menilai keberhasilan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020. Dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 tersebut diuraikan sasaran-sasaran dan indikator kinerja utama yang diprioritaskan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai tahun 2020, program-program, serta anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian sasaran.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

**A**kuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis, program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam memberikan pertanggungjawaban kepada yang memberikan amanah dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah dan perwujudan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna serta dalam rangka penerapan manajemen kinerja.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilakukan melalui tahapan proses pengumpulan data kinerja dari masing-masing SKPD sebagai penyedia data kinerja berdasarkan indikator sasaran serta dari instansi lainnya yang terkait dengan capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Ciamis Tahun 2020 dilakukan untuk memberikan gambaran yang memadai dan terukur mengenai tingkat capaian kinerja sasaran berdasarkan target dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang telah disepakati

dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2020 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Ciamis.

### 3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis dilakukan berdasarkan pengukuran capaian kinerja dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020. Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).
2. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut :

No	Persentase	Predikat
1	< 100 %	Tidak Tercapai
2	= 100%	Tercapai Sesuai Target
3	> 100 %	Melebihi Target

3. Membandingkan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun lalu sampai 2 (dua) tahun sebelumnya;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - 2024;



5. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional (jika ada, Misalnya SPM, target Provinsi, dan lain-lain);
6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Analisis capaian kinerja sasaran juga dikaitkan dengan program pembangunan yang mendukung upaya pencapaian sasaran dengan jumlah realisasi anggaran yang digunakan, beserta capaian *output* dan *outcome* dari keseluruhan program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran tersebut, sehingga diketahui sejauhmana program yang dilaksanakan telah mendukung pencapaian sasaran secara optimal.

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap capaian kinerja sasaran strategis, maka dilakukan pengungkapan (*disclosure*) yang memadai hasil analisis dan penjelasan terhadap pengukuran kinerja setiap indikator kinerja sasaran. Analisis terhadap setiap indikator sasaran diawali dengan penjelasan operasional serta rumus perhitungan dari masing-masing indikator sasaran guna mengukur realisasi dan capaian kinerja masing-masing indikator sasaran. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta perbandingan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam RPJMD. Berdasarkan hasil pengukuran realisasi kinerja dan capaian kinerja tersebut diungkapkan pula mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sasaran yang ditetapkan.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan (realisasi anggaran) untuk masing-masing sasaran, dalam akuntabilitas keuangan dihitung anggaran tiap-tiap sasaran sesuai jumlah program yang mendukung upaya pencapaian sasaran tersebut. Dengan adanya penjelasan program pendukung beserta besaran anggaran yang digunakan untuk masing-masing sasaran, akan lebih mudah untuk membuat akuntabilitas keuangan. Dalam akuntabilitas keuangan ini juga dilakukan analisa

dan penghitungan terhadap tingkat efisiensi penggunaan anggaran setiap sasaran yang menunjukkan capaian kinerja mencapai dan melebihi target sasaran.

### 3.2 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka pengukuran kinerja, peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja sasaran strategis. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis. Penyusunan Indikator Kinerja Utama dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan terutama indikator yang lebih baik dan berorientasi hasil.

Dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 terdapat 18 (delapan belas) sasaran yang terdiri atas 25 (dua puluh lima) indikator kinerja beserta target kinerja yang diperjanjikan. Dalam laporan ini, Pemerintah Kabupaten Ciamis memberikan gambaran mengenai realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran yang diukur dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 serta perbandingannya dengan target perencanaan jangka menengah yang tercantum dalam RPJMD tahun 2019-2024.

Pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Ciamis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis**  
**Pemerintah Kabupaten Ciamis**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Terwujudnya SDM yang cerdas, kreatif dan inovatif serta berakhlak Mulia	2	100,36	Melebihi Target
2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	100	Tercapai Sesuai Target
3	Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan Serta pemenuhan hak perempuan dan anak	2	99,81	Tidak Tercapai
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas peserta KB dan ketahanan keluarga	1	100	Tercapai Sesuai Target
5	Berkurangnya jumlah penduduk miskin	1	100,26	Melebihi Target
6	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	1	100,18	Melebihi Target
7	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi	1	100,263	Melebihi Target
8	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pengelolaan Sumber Daya Air	1	102,022	Melebihi Target
9	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1	-8,48	Tidak Tercapai
10	Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat	1	104,00	Melebihi Target
11	Meningkatnya kesejahteraan petani	1	99,23	Tidak Tercapai
12	Meningkatnya Investasi di Daerah	1	-178	Tidak Tercapai
13	Meningkatnya daya saing pariwisata	1	109,47	Melebihi Target
14	Terwujudnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan	1	118,06	Melebihi Target
15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	112,98	Melebihi Target
16	Meningkatnya ketahanan dan adaptasi terhadap bencana	1	115,71	Melebihi Target
17	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	6	110,11	Melebihi Target

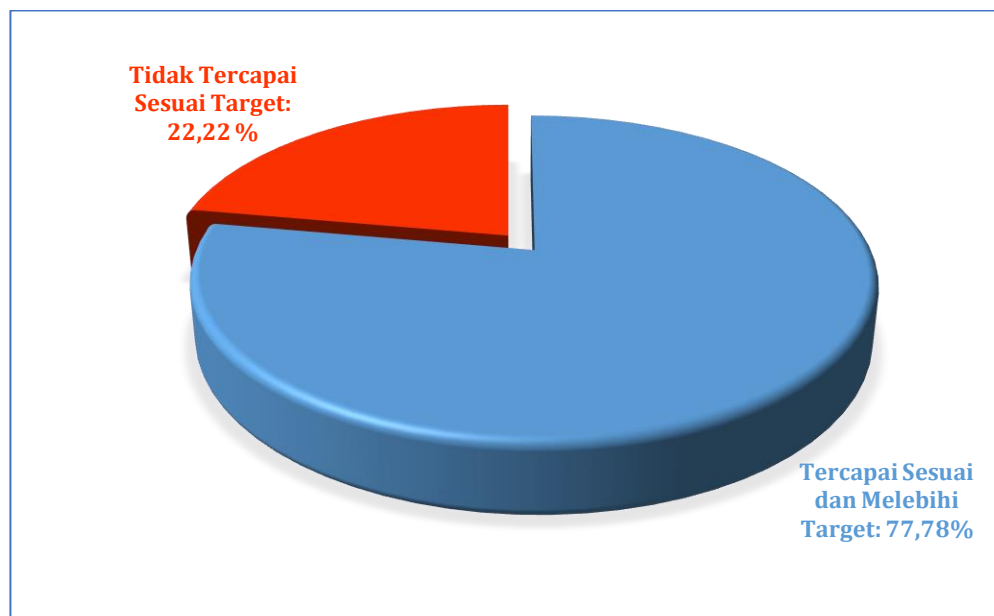
18	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa, Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat Desa	1	113,175	Melebihi Target
<b>Jumlah (Rata-rata)</b>		<b>25</b>	<b>83,29</b>	

Berdasarkan tabel di atas, maka rekapitulasi tingkat pencapaian target sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Ciamis menunjukkan bahwa dari 18 (delapan belas) sasaran strategis yang ditetapkan menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 83,29 % dengan rincian hasil pengukuran ketercapaian kinerja sasaran sebagai berikut:

- Sebanyak 14 sasaran (77,78 %) tercapai sesuai dan melebihi target ( $\geq 100\%$ )
- sebanyak 4 sasaran (22,22 %) tidak tercapai sesuai target ( $< 100\%$ ).

Persentase capaian kinerja sasaran strategis tersebut disajikan dalam grafik sebagai berikut:

**Grafik 3.1**  
**Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis**  
**Tahun 2020**



Apabila dilihat dari jumlah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja masing-masing sasaran strategis, dari sebanyak 25 (dua puluh lima) indikator kinerja menunjukkan capaian kinerja sebagai berikut:

- Sebanyak 13 indikator atau sebesar 52 % tercapai melebihi target (> 100 %);
- Sebanyak 8 indikator atau sebesar 32 % tercapai sesuai target (= 100%);
- Sebanyak 4 indikator atau sebesar 16 % tidak mencapai target (< 100%).

Persentase capaian kinerja indikator kinerja sasaran strategis tersebut disajikan dalam grafik sebagai berikut:

**Grafik 3.2**  
**Persentase Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020**



Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi misi pembangunan Kabupaten Ciamis yang tertuang dalam RPJMD 2019-2020 maka tingkat pencapaian target sasaran strategis pada masing-masing misi adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Rekapitulasi Tingkat Pencapaian Sasaran**  
**Pada Masing-Masing Misi RPJMD Berdasarkan Jumlah Indikator Kinerja**  
**Tahun 2020**

No	Misi	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi Target		Mencapai/ Sesuai Target		Tidak Mencapai Target	
				Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	6	8	3	37,50	4	50,00	1	12,50
2	Misi 2	2	2	2	100	-	-	-	-
3	Misi 3	6	6	3	50,00	-	-	3	50,00
4	Misi 4	2	2	2	100	-	-	-	-
5	Misi 5	1	6	2	33,33	4	66,67	-	-
6	Misi 6	1	1	1	100	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>52 %</b>	<b>8</b>	<b>32 %</b>	<b>4</b>	<b>16 %</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan rincian persentase tingkat pencapaian sasaran berdasarkan jumlah indikator yang dikelompokkan menurut masing-masing misi sebagai berikut:

**a. Misi 1 (Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia)**

Jumlah sasaran pada “Misi 1” sebanyak 6 sasaran dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 8 indikator, dengan tingkat pencapaian target sasaran berdasarkan jumlah indikator yaitu sebanyak 3 indikator (37,50 %) tercapai melebihi target, 4 indikator (50,00 %) mencapai sesuai target dan 1 indikator (12,50 %) tidak mencapai target.

**b. Misi 2 (Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Perkembangan Wilayah)**

Jumlah sasaran pada “Misi 2” sebanyak 2 sasaran dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 2 indikator, dengan tingkat pencapaian target sasaran berdasarkan jumlah indikator yaitu sebanyak 2 indikator (100 %) tercapai melebihi target.

**c. Misi 3 (Membangun Perekonomian Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Lokal)**

Jumlah sasaran pada “Misi 3” sebanyak 6 sasaran dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 6 indikator, dengan tingkat pencapaian target sasaran berdasarkan jumlah indikator yaitu sebanyak 3 indikator (50 %) tercapai melebihi target dan sebanyak 3 indikator (50 %) tidak mencapai target.

**d. Misi 4 (Memanfaatkan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Bijaksana untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan )**

Jumlah sasaran pada “Misi 4” sebanyak 2 sasaran dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 2 indikator, dengan tingkat pencapaian target sasaran berdasarkan jumlah indikator yaitu sebanyak 2 indikator (100 %) tercapai melebihi target.

**e. Misi 5 (Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien)**

Jumlah sasaran pada “Misi 5” sebanyak 1 sasaran dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 6 indikator, dengan tingkat pencapaian target sasaran berdasarkan jumlah indikator yaitu sebanyak 2 indikator (33,33 %) tercapai melebihi target dan sebanyak 4 indikator (66,67 %) mencapai sesuai target.

**f. Misi 6 (Penguatan Otonomi Desa Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian Masyarakat dan Desa)**

Jumlah sasaran pada “Misi 5” sebanyak 1 sasaran dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 1 indikator (100 %) tercapai melebihi target.

Uraian terhadap pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2020 setelah direviu adalah sebagai berikut:

**Sasaran 1****Terwujudnya SDM yang cerdas, kreatif dan inovatif serta berakhlak mulia**

Pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga dan memberikan dampak positif dalam berbagai aspek pembangunan. Oleh karenanya, meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan menjadi salah satu sasaran strategis yang ingin diwujudkan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Ciamis.

Salah satu kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam bidang pendidikan yaitu digulirkannya program “Ciamis Calakan” yang berarti Ciamis Pintar. Kebijakan ini ditujukan untuk melindungi pendidikan masyarakat miskin dengan bantuan pendidikan untuk siswa SMP yang *Drop Out* (DO) dan rawan *Drop Out*. Sasaran penerima program ini yaitu siswa SMP dari keluarga miskin (pemegang KKS/KPS, PKH, Anak Panti Asuhan dan Anak Yatim Piatu) diluar siswa yang menerima BSM/KIP). Melalui kebijakan program “Ciamis Calakan” pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Ciamis telah memberikan bantuan pendidikan kepada 1.000 siswa SMP berupa bantuan uang sebesar Rp. 750.000,- per siswa per tahun. Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswa untuk terus bersekolah dan tidak terjadi drop out, sehingga angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Ciamis juga meningkat.

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu (1) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan (2) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), dengan hasil pengukuran kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :



**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Terwujudnya SDM yang Cerdas, Kreatif dan Inovatif serta Berakhlak Mulia**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	RLS	Tahun	7,63	98,71	7,69	100,52	7,70	7,70	100
2	HLS	Tahun	13,68	93,32	13,79	100,43	13,96	14,06	100,72
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>		<b>%</b>		<b>96,01</b>		<b>100,47</b>			<b>100,36</b>

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kinerja sasaran terwujudnya SDM yang cerdas, kreatif dan inovatif serta berakhlak mulia tahun 2020 diukur melalui 2 (dua) indikator, dengan target dan realisasi kinerja sebagai berikut:
  - 1) Rata-rata Lama Sekolah (RLS), target 7,70 tahun, terealisasi sebesar 7,70 tahun, menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 %.
  - 2) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), target 13,96 tahun, terealisasi sebesar 14,06 tahun, menunjukkan capaian kinerja sebesar 100,72 %.

Capaian kinerja sasaran yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja dari setiap indikator menunjukkan bahwa indikator RLS tercapai sesuai target sedangkan indikator HLS melebihi target yang ditetapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,36 %.
- b. Perbandingan antara realisasi kinerja indikator RLS tahun 2020 dengan tahun sebelumnya, menunjukkan RLS tahun 2020 (7,70 tahun) meningkat sebesar 0,01 tahun dari realisasi tahun 2019 (7,69 tahun) dan meningkat sebesar 0,07 tahun dibandingkan realisasi tahun 2018 (7,63 tahun).
- c. Perbandingan antara realisasi kinerja indikator HLS tahun 2020 dengan tahun sebelumnya, menunjukkan HLS tahun 2020 (14,06 tahun) meningkat sebesar

0,27 tahun dari realisasi tahun 2019 (13,79 tahun) dan meningkat sebesar 0,38 tahun dibandingkan realisasi tahun 2018 (13,68 tahun).

Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2020 dengan target jangka menengah tahun 2020 yang tercantum dalam RPJMD 2019-2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran terwujudnya SDM yang cerdas, kreatif dan inovatif serta berakhlak mulia untuk indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah sebesar 7,75 tahun dengan realisasi tahun 2020 sebesar 7,70 tahun. Sedangkan target RPJMD untuk indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah sebesar 13,80 tahun dan terealisasi sebesar 14,06 tahun. Dengan demikian realisasi kinerja tahun 2020 untuk indikator RLS masih berada di bawah target RPJMD Tahun 2024 sedangkan untuk indikator HLS melebihi target RPJMD dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,62 % sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran**  
**Terwujudnya SDM yang cerdas, kreatif dan inovatif serta berakhlak mulia**  
**Tahun 2020 Dengan Target RPJMD**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja (%)
1.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,75	7,70	99,35
2.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,80	14,06	101,88
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>		<b>%</b>			<b>100,62</b>

Upaya pencapaian sasaran meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dilaksanakan melalui 8 (delapan) program yaitu :

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
- 3) Program Pendidikan Non Formal;
- 4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
- 6) Program Pelayanan Perpustakaan;

- 7) Program Pengembangan Budaya Baca dan pembinaan Perpustakaan;
- 8) Program Koordinasi dan Fasilitas Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan.

Penyerapan realisasi anggaran program secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 211.050.124.349,- atau sebesar 96,09 % dari total pagu anggaran Rp 219.629.718.464,- dengan capaian output sebesar 98,79 % dan capaian outcome sebesar 119,95 %.

Analisa capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan adalah sebagai berikut:

### 1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Perhitungan rumus RLS adalah sebagai berikut :

$$RLS/MYS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah penduduk}_i$$

RLS	: Rata-rata Lama Sekolah di Suatu Wilayah
Lama Sekolah penduduk <sub>i</sub>	: Lama Sekolah Penduduk ke- <i>i</i> di suatu wilayah
n	: Jumlah Penduduk ( <i>i</i> = 1, 2, 3, ....., n)

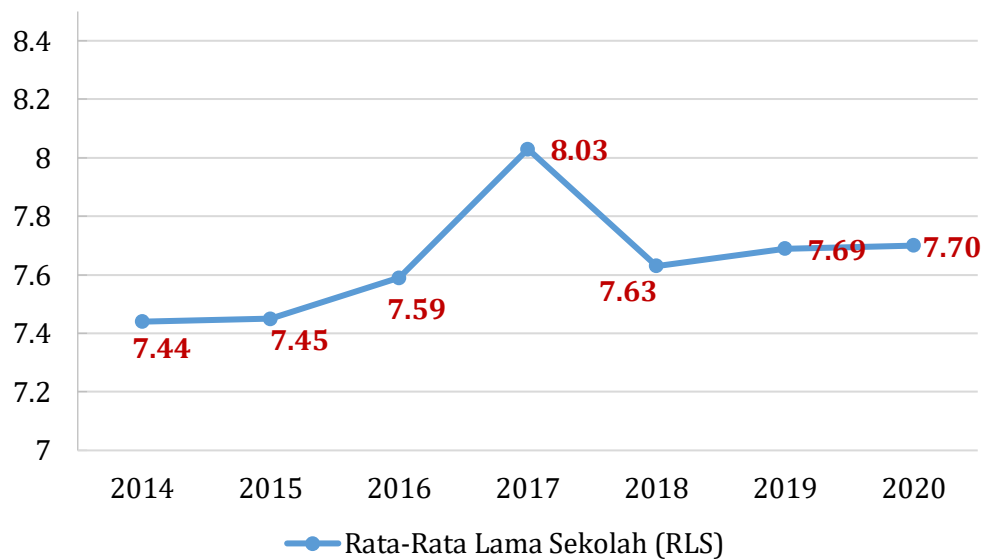
Berdasarkan metode perhitungan tersebut di atas diperoleh nilai RLS sebesar 7,70 tahun, tercapai sesuai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebesar 7,70 Tahun dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan angka RLS diantaranya adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan sehingga Angka RLS dapat mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan RLS tersebut antara lain kondisi ekonomi masyarakat kabupaten Ciamis yang tidak merata. Strategi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut

antara lain dengan memberikan bantuan kepada siswa yang tidak mampu atau miskin melalui kebijakan program “Ciamis Calakan”, serta pemberian Bantuan Operasional Sekolah, sehingga dapat meringankan beban orang tua siswa.

Perkembangan RLS di Kabupaten Ciamis selama 7 (tujuh) tahun terakhir dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

**Grafik 3.3**  
**Perkembangan RLS di Kabupaten Ciamis**  
**Tahun 2014 - 2020**



## 2. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa datang. HLS dihitung pada usia 7 (tujuh) tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Munculnya dimensi Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Untuk menghitung HLS berdasarkan rumus perhitungan BPS adalah sebagai berikut :

- HLS (Harapan Lamanya Sekolah) :

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^t \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

HLS : Harapan Lama Sekolah pada umur  $a$  di tahun  $t$

$E_i^t$  : Jumlah Penduduk usia  $i$  yang bersekolah pada tahun  $t$

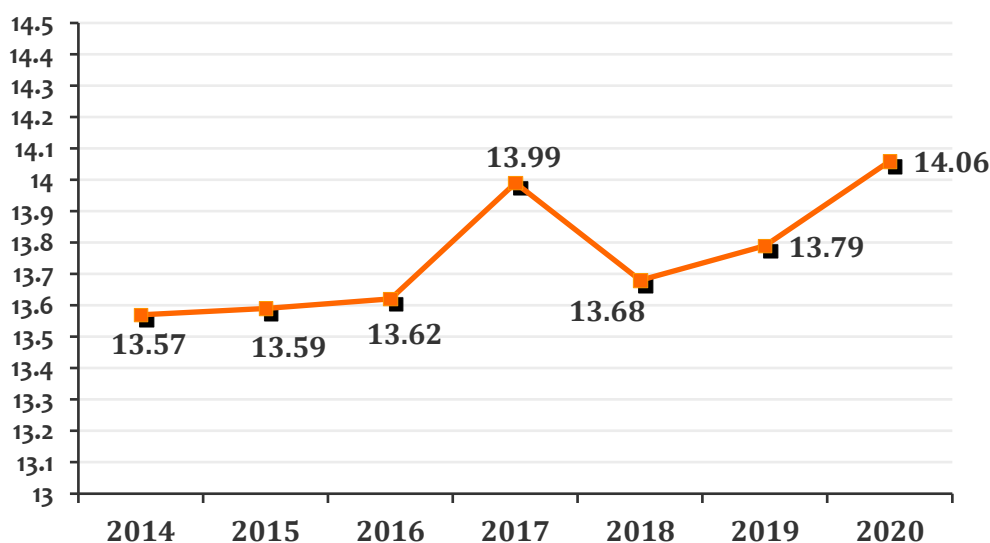
$P_i^t$  : Jumlah Penduduk usia  $i$  pada tahun  $t$

$i$  : Usia ( $a, a+1, \dots, n$ )

$FK$  : Faktor Koreksi Pesantren

Berdasarkan rumus perhitungan tersebut di atas diperoleh nilai HLS sebesar 14,06 tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebesar 13,96 tahun dengan capaian kinerja sebesar 100,72 %. Perkembangan capaian realisasi HLS setiap tahun seperti grafik di bawah ini :

**Grafik 3.4**  
**Perkembangan HLS Di Kabupaten Ciamis**  
**Tahun 2014 - 2020**



## Sasaran 2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Pembangunan bidang kesehatan khususnya peningkatan layanan kesehatan dilaksanakan melalui tiga pilar utama yaitu (1) Pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; (2) Penguatan

pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis resiko kesehatan; dan (3) Jaminan Kesehatan Nasional, yang dilaksanakan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan khususnya pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan yaitu :

1. Program Pengembangan/Standarisasi dan Pembiayaan Kesehatan melalui kegiatan Jaminan Kesehatan Daerah yang merupakan program perlindungan/jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin diluar kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) Nasional Jamkesmas/KIS. Sasaran penerima program ini yaitu masyarakat miskin dan kurang mampu diluar Penerima Bantuan Iuran (PBI) Nasional JKN-KIS. Alokasi dana yang disediakan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 43,976,797,285,-. Pada tahun 2020 jumlah masyarakat miskin yang menerima manfaat program jaminan Kesehatan daerah sebanyak 94.013 jiwa dengan total realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp. 30,215,748,000.
2. Pengembangan fasilitas kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis, pembangunan Rumah Sakit Tipe C Kawali Tahap V, peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan Kesehatan, dan standarisasi fasilitas Kesehatan.

Melalui kebijakan tersebut Pemerintah Kabupaten Ciamis berkomitmen meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, sehingga berdampak pada meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Ciamis. Oleh karenanya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi salah satu sasaran strategis daerah yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dilakukan melalui indikator Usia Harapan Hidup (UHH). UHH adalah angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur atau rata-rata perkiraan banyak tahun

yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penyebab panjangnya umur manusia, tergantung dari penyakit bawaan dari lahir. Mereka yang diberi berkah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjalani hidup lebih panjang adalah orang-orang yang terkait dengan rendahnya penyakit degeneratif, yaitu penyakit-penyakit yang mengancam kehidupan manusia, seperti penyakit kanker, jantung koroner, diabetes dan stroke lingkungan tempat tinggal, stress atau tekanan.

Pada dasarnya Usia Harapan Hidup manusia saat lahir didefinisikan sama, yaitu rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Usia Harapan Hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. UHH dihitung menggunakan aplikasi Mortpack Metode Trussel Model West berdasarkan input Data Anak Lahir Hidup dan Anak Masih Hidup. UHH negara berkembang, khususnya di negara Indonesia cenderung lebih rendah dibandingkan UHH negara-negara maju karena UHH dipengaruhi oleh tingkat kematian bayi.

Hasil perhitungan realisasi dan capaian kinerja indikator sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.5**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	71.32	99,78	71,57	100,25	71,83	71,83	100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut di atas dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Target Usia Harapan Hidup (UHH) tahun 2020 yang merupakan indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat adalah sebesar 71,83 tahun, dengan realisasi kinerja mencapai 71,83 tahun. Ini menunjukkan capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100% (tercapai sesuai target).
- b. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2020 dengan beberapa tahun lalu menunjukkan bahwa:

- 1) Realisasi kinerja UHH tahun 2020 (71,83 tahun) mengalami peningkatan sebanyak 0,22 tahun jika dibandingkan dengan tahun 2019 (71,57 tahun) dan apabila dibandingkan dengan realisasi UHH 2018 (71,32 tahun) maka terdapat peningkatan UHH sebanyak 0,51 tahun.
- 2) Capaian kinerja UHH tahun 2020 (100%) berada di bawah capaian kinerja tahun 2019 (100,25%) sebesar 0,25 %. Hal ini terjadi dikarenakan target Perjanjian Kinerja Tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan target Perjanjian Kinerja tahun 2019 serta adanya pandemi Covid19 sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja tahun 2020 dengan adanya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 (99,78), capaian kinerja tahun 2020 lebih tinggi dari capaian kinerja tahun 2018 sebesar 0,22 %.

Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2020 dengan target jangka menengah tahun 2020 yang tercantum dalam RPJMD 2019-2024 menunjukkan bahwa realisasi kinerja tahun 2020 (71,83 tahun) lebih tinggi dan melampaui target jangka menengah RPJMD (71,57 tahun) dengan capaian kinerja sebesar 100,36 % sebagaimana tabel di bawah ini:

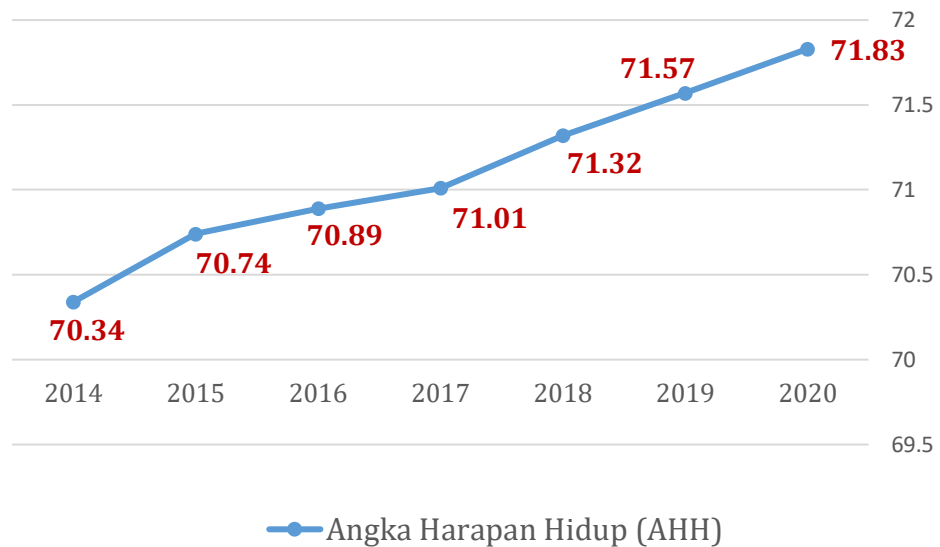
**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Tahun 2020**  
**Dengan Target RPJMD**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja (%)
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	71,57	71,83	100,36

Sebagaimana pada tabel 3.6, Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Ciamis tahun 2020 adalah sebesar 71,83 tahun. Angka tersebut merupakan capaian tertinggi dalam perkembangan UHH Kabupaten Ciamis sejak tahun 2014. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:



**Grafik 3.5**  
**Perkembangan Usia Harapan Hidup di Kabupaten Ciamis**  
**Tahun 2014 - 2020**



Berdasarkan grafik di atas, UHH Kabupaten Ciamis sepanjang tahun 2014-2020 mengalami peningkatan 1,49 tahun, yaitu dari sebesar 70,34 tahun pada tahun 2014 menjadi sebesar 71,83 tahun pada tahun 2020. Peningkatan capaian UHH ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat serta semakin meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Faktor-faktor yang mempengaruhi UHH diantaranya adalah faktor lingkungan, pelayanan kesehatan, keturunan dan perilaku masyarakat. Strategi yang dilakukan untuk mempertahankan target Usia Harapan Hidup yaitu melalui pemahaman/edukasi mengenai PHBS yang menjadi pangkal utama pencegahan penyakit, mengatur kebutuhan gizi makanan dan kesehatan lingkungan.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui 13 (tiga belas) program, yaitu :

- 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- 2) Program Pengembangan/Standarisasi Sumber Daya dan Pembiayaan Kesehatan
- 3) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
- 4) Program pengendalian penyakit
- 5) Program Pelayanan Kesehatan

- 6) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan
- 7) Program Bantuan Operasional Kesehatan
- 8) Program Pengembangan /standarisasi Sumber Daya dan Pembiayaan Kesehatan di RSUD Ciamis
- 9) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata di RSUD Ciamis
- 10) Program kemitraaan peningkatan pelayanan kesehatan
- 11) Program Pelayanan Kesehatan di RSUD
- 12) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
- 13) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Penyerapan/realisasi anggaran dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat sebesar Rp 324.769.391.801,- atau sebesar 85,70 % dari total pagu anggaran Rp 378.942.729.539,- dengan capaian output sebesar 97,93 % dan capaian outcome sebesar 92,64 %.

### Sasaran 3

#### Meningkatkan Peran Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan serta Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak

Pemuda memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan yang berkualitas. Pemuda merupakan generasi penerus, penanggung jawab dan pelaku pembangunan masa depan. Kekuatan bangsa di masa mendatang tercermin dari kualitas sumber daya pemuda saat ini. Selain itu, pemuda juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya karena proporsi jumlah penduduk usia muda yang relatif lebih besar dibanding penduduk lain pada saat ini.

Selain peran pemuda, keterlibatan dan peran perempuan dalam pembangunan juga diperlukan. Kesetaraan akses bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang merupakan suatu capaian yang menjadi salah satu tujuan dalam pembangunan. Dengan begitu, setiap gender mendapat akses yang sama,

dapat berpartisipasi dan bersama-sama mempunyai kesempatan dalam penetapan keputusan dan menikmati manfaat pembangunan secara bersama-sama.

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu (1) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan (2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dengan hasil pengukuran kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.7**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatkan Peran Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan**  
**serta Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Poin	N/A	N/A	N/A	N/A	0,558	0,557	99,82
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	63,67	100	64,54	101,37	64,66	64,66	100
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>		<b>%</b>		<b>100</b>		<b>101,37</b>			<b>99,81</b>

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kinerja sasaran meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak perempuan dan anak tahun 2020 diukur melalui 2 (dua) indikator, dengan target dan realisasi kinerja sebagai berikut:
  - 1) Indeks Pembangunan Pemuda, target 0,558 poin, terealisasi sebesar 0,557 poin, menunjukkan capaian kinerja sebesar 99,81 %.
  - 2) Indeks Pemberdayaan Gender, target 64,66 poin, terealisasi sebesar 64,66 poin, menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 %.

Capaian kinerja sasaran yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja dari setiap indikator menunjukkan bahwa indikator Indeks Pembangunan Pemuda tidak mencapai target sedangkan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sesuai target yang ditetapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 99,81 %.

- b. Realisasi kinerja indikator Indeks Pembangunan Pemuda tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2019 dan 2018) karena tidak ada target pada PK tahun tersebut (N/A) dan mulai ditargetkan dalam PK tahun 2020.
- c. Perbandingan antara realisasi kinerja indikator Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2020 dengan tahun sebelumnya, menunjukkan Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2020 (64,66 poin) meningkat sebesar 0,14 poin dari realisasi tahun 2019 (64,54 poin) dan meningkat sebesar 0,99 poin dibandingkan realisasi tahun 2018 (63,67 poin).

Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2020 dengan target jangka menengah tahun 2020 yang tercantum dalam RPJMD 2019-2024 menunjukkan bahwa sasaran meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak perempuan dan anak tahun 2020 untuk indikator Indeks Pembangunan Pemuda memiliki target RPJMD sebesar 0,533 poin dengan realisasi sebesar 0,557 poin. Sedangkan target RPJMD tahun 2020 untuk indikator Indeks Pemberdayaan Gender adalah sebesar 63,77 poin dengan realisasi sebesar 64,66 poin. Dengan demikian, masing-masing indikator memiliki capaian kinerja yang melebihi target dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 102,95 %.

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Realisasi Capaian Sasaran**  
**Meningkatnya Peran Pemuda dan Perempuan Dalam Pembangunan serta**  
**Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Tahun 2020 Dibandingkan dengan**  
**Target RPJMD**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Poin	0,533	0,557	104,50
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	63,77	64,66	101,40
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>		<b>%</b>			<b>102,95</b>

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak perempuan dan anak tahun 2020 dilaksanakan melalui 8 (delapan) program yaitu :

- 1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
- 3) Program Pembinaan Kepemudaan
- 4) Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
- 5) Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan
- 6) Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
- 7) Program Peningkatan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama)
- 8) Program Pendidikan Politik Masyarakat

Penyerapan realisasi anggaran program secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 4.107.356.224,- atau sebesar 96,75 % dari total pagu anggaran Rp 4.245.208.400,- dengan capaian output sebesar 96,35 % dan capaian outcome sebesar 104,01 %.

Analisa capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut:

### 1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dapat dilakukan dengan menggunakan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

Pembangunan pemuda sendiri dapat ditelisik melalui tiga lapisan, yakni pengembangan individu, pengembangan penghidupan, serta pengembangan partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam lapisan pengembangan individu, IPP menyertakan 'pendidikan (TD1)' serta 'kesehatan dan kesejahteraan (TD2)' sebagai domainnya. Sementara itu, dalam lapisan pengembangan penghidupan, IPP memasukkan 'lapangan dan kesempatan kerja (TD3)' sebagai domain berikutnya. Selanjutnya adalah pengembangan partisipasi, yang di dalamnya IPP mempertimbangkan 'partisipasi dan kepemimpinan (TD4)' serta 'gender dan diskriminasi (TD5)' sebagai dua domain terakhir.

Rumus perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebagai berikut :

$$IPP = \frac{(TD1+TD2+TD3+TD4+TD5)/5}{100}$$

*Keterangan : TD = Transformasi Domain , dihitung dengan rumus :*

$$TD = \frac{\text{Jumlah Nilai Transformasi tiap Domain}}{\text{Nilai Maksimum Domain}}$$

### 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dilakukan melalui indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Pada dasarnya IDG merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam pembangunan. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan. Sehingga IDG difokuskan pada

partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.

IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen yaitu keterwakilan perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; dan sumbangan pendapatan.

1. Keterwakilan di parlemen, dimensi ini menggambarkan seberapa besar proporsi keterwakilan di parlemen antara laki-laki dan perempuan
2. Pengambilan keputusan, dimensi ini menjangkau kepada area seberapa banyak proporsi dari suatu pekerjaan mulai dari level manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi antara laki-laki dan perempuan;
3. Distribusi pendapatan, dimensi ini mendeskripsikan nilai/jumlah upah buruh non-pertanian antara laki-laki dan perempuan.

Rumus perhitungan *Indeks Development Gender* (IDG) adalah sebagai berikut :

$$IDG = \frac{1}{3} [Ipar + IDM + Linc - dis]$$

Keterangan :

Ipar : indeks keterwakilan di parlemen

IDM : Indeks pengambilan keputusan

Linc-dis : indeks distribusi pendapatan

#### Sasaran 4 Meningkatnya kualitas dan kuantitas peserta KB dan ketahanan keluarga

Program KB merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik. Program KB juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki dan menanggulangi masalah yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun psikososial keluarga. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas dan kuantitas peserta KB dan ketahanan

keluarga menjadi penting dilaksanakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran kualitas dan kuantitas peserta KB dan ketahanan keluarga dilakukan melalui indikator *Total Fertility Rate* (TFR). TFR atau Angka Kelahiran Total yaitu rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya, jika wanita tersebut mengikuti angka fertilitas pada tahun yang bersangkutan. Jadi TFR merupakan jumlah *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) dengan catatan bahwa umur dinyatakan 1 tahun. Perhitungan TFR dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan berikut :

$$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR \quad (i = 1,2,\dots,7) \quad \text{ASFR} = \text{angka kelahiran menurut kelompok umur } i = \text{kelompok umur 5 tahun, dimulai dari 15 - 49 tahun.}$$

Hasil perhitungan realisasi dan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas peserta KB dan ketahanan keluarga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.9**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Peserta KB dan Ketahanan Keluarga**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	Angka	2,056	99,81	2,055	100	2,05	2,05	100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut di atas diketahui bahwa :

- a. Target indikator kinerja *Total Fertility Rate* (FTR) Tahun 2020 adalah 2,05 dengan realisasi kinerja tercapai sesuai target yaitu sebesar 2,05 sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 %.
- b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019 menunjukkan realisasi yang sama yaitu 2,05 dan capaian kinerja yang sama yaitu 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya, jika



wanita tersebut mengikuti angka fertilitas mencapai 2,05 orang dan tidak mengalami peningkatan atau penurunan dari tahun 2019. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2018, mengalami peningkatan sebesar 0,01.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah tahun 2020 yang tercantum dalam RPJMD 2019-2024 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.10**

**Perbandingan Realisasi Capaian Sasaran  
Meningkatnya kualitas dan kuantitas peserta KB dan Ketahanan Keluarga  
Tahun 2020 Dibandingkan dengan Target RPJMD**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja (%)
1	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	Angka	2,05	2,05	100

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2020 sebesar 2,05 sesuai target jangka menengah yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2020 sebesar 2,05, sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 %.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya *Total Fertility Rate (TFR)* dilaksanakan melalui 6 (enam) program, yaitu :

- 1) Program Keluarga Berencana
- 2) Program Pengendalian Penduduk
- 3) Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- 4) Program Penataan Pelayanan Pencatatan Sipil
- 5) Program Penataan Data Kependudukan
- 6) Program Pemanfaatan Data Kependudukan

Penyerapan/realisasi anggaran dalam upaya pencapaian sasaran adalah sebesar Rp 9.404.827.198,- atau sebesar 98,64 % dari total pagu anggaran sebesar Rp 9.534.063.800,- dengan capaian output sebesar 105,29 % dan capaian outcome sebesar 115,96 %.

## Sasaran 5 Berkurangnya jumlah penduduk miskin

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (*Bappenas, 2004*). Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan merupakan program utama pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Program penanggulangan kemiskinan yang sudah diluncurkan antara lain program pendidikan untuk siswa miskin, bantuan layanan kesehatan masyarakat miskin, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial PKH, BLT, Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kube perkotaan dan perdesaan, UEP dan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran berkurangnya jumlah penduduk miskin diukur melalui indikator persentase penduduk miskin. Indikator persentase penduduk miskin dihitung dari jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Hasil pengukuran realisasi dan capaian kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.11**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase Penduduk Miskin	%	7,22	103,81	6,65	98,86	7,64	7,62	100,26

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut, diketahui bahwa:

- a. Target jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ciamis tahun 2020 adalah sebesar 7,64 % dengan realisasi kinerja sebesar 7,62 % (melebihi dari target jumlah penduduk miskin yang ditetapkan). Sehingga capaian kinerja sasaran berkurangnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ciamis tahun 2020 sebesar 100,26 %.
- b. Realisasi kinerja indikator persentase penduduk miskin tahun 2020 (7,62 %) tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,97 % jika dibandingkan persentase penduduk miskin tahun 2019 (6,65 %). Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2018 (7,22 %), persentase penduduk miskin tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,4 %.

Perbandingan realisasi kinerja sasaran berkurangnya jumlah penduduk miskin tahun 2020 dengan target jangka menengah tahun 2020 yang tercantum dalam RPJMD 2019-2024 adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.12**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran**  
**Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2020 Dengan Target RPJMD**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase penduduk miskin	%	7,0	7,62	91,14

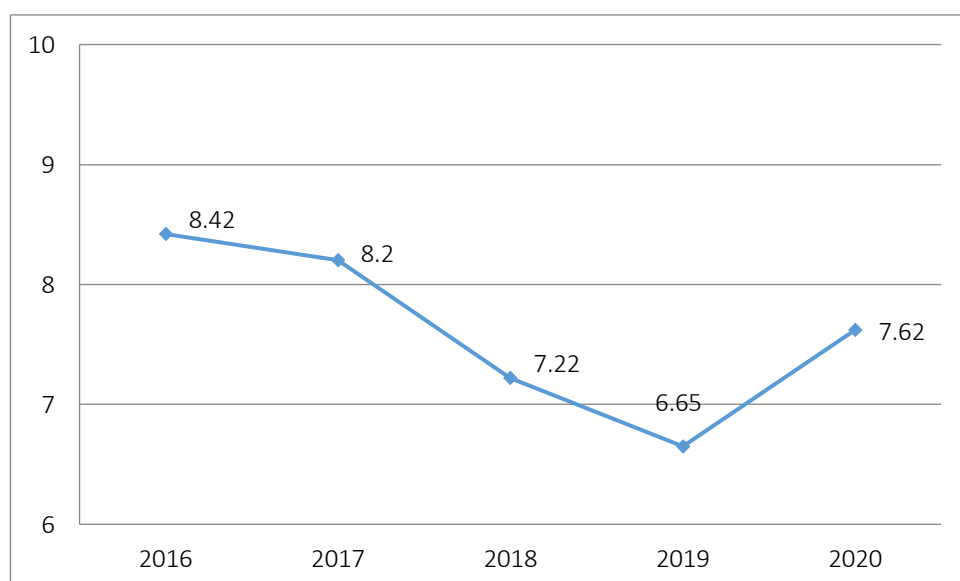
Dari tabel di atas diketahui bahwa target RPJMD untuk sasaran berkurangnya jumlah penduduk miskin adalah sebesar 7,0 %, dengan realisasi kinerja tahun 2020 sebesar 7,62 % sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 91,14 %.

Dalam rangka penanganan dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Ciamis melakukan akselerasi dalam penanggulangan kemiskinan dengan membentuk lembaga layanan terpadu penanggulangan kemiskinan yang disebut dengan LTPKD (Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah) yang

merupakan wadah pelayanan terpadu lintas sektoral dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan, dengan tugas membantu Bupati dalam percepatan dan penguatan secara terpadu dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian terhadap pelaksanaan pelayanan dan penanganan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ciamis. Keberadaan LTPKD saat ini sudah berjalan selama 7 (tujuh) tahun dan telah dilakukan perbaikan/pembenahan baik berupa restrukturisasi organisasi maupun penguatan regulasi.

Namun sebagaimana data pada grafik 3.6 mengenai perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Ciamis, terlihat bahwa setelah terus mengalami penurunan dalam rentang waktu tahun 2016-2019, pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan diantaranya karena terjadinya bencana alam di beberapa wilayah yang menyebabkan rusaknya beberapa fasilitas termasuk rumah penduduk sehingga menyebabkan penduduk berkurang harta kekayaannya, serta adanya pandemi Covid-19 yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan tetapi juga pada semakin berkurangnya penghasilan masyarakat. Oleh karena itu, perlu penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dari tingkat Pusat dan Daerah agar permasalahan kemiskinan dapat diatasi bersamaan dengan penanganan Pandemi Covid-19.

**Grafik 3.6**  
**Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (%)**  
**Kabupaten Ciamis Tahun 2016 - 2020**



Upaya pencapaian sasaran berkurangnya jumlah penduduk miskin dilaksanakan melalui 4 (empat) program, yaitu :

- 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya
- 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- 3) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- 4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Penyerapan realisasi anggaran dalam upaya pencapaian sasaran menurunnya tingkat kemiskinan adalah sebesar Rp 1.350.421.000,- atau sebesar 99,60 % dari total pagu anggaran Rp. 1.355.831.000,- dengan capaian output sebesar 94,61 % dan capaian outcome sebesar 67,59 %.

## Sasaran 6 Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja

Tenaga kerja memiliki peran penting dan menjadi faktor kunci dalam proses pembangunan ekonomi. Tenaga kerja yang berdaya saing dapat diartikan sebagai kemampuan angkatan kerja (15-64 tahun) untuk mencapai peningkatan produktivitas atau peningkatan nilai output yang dihasilkan oleh seorang tenaga kerja. Mengingat semakin tinggi daya saing tenaga kerja di suatu daerah, menandakan semakin tinggi juga daya saing perekonomian daerah itu, maka meningkatnya daya saing tenaga kerja menjadi target sasaran yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya daya saing tenaga kerja dilakukan melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka. Perhitungan indikator tersebut dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk pengangguran}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja}} \times 100$$

Hasil pengukuran realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.13**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,60	100	5,16	88,65	5,67	5,66	100,18

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut di atas diketahui bahwa :

- a. Target indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020 adalah sebesar 5,67 % dengan realisasi kinerja tercapai sebesar 5,66 % sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 100,18 %.
- b. Perbandingan realisasi kinerja indikator Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa realisasi kinerja tahun 2020 (5,66 %) meningkat 0,50 % dari realisasi tahun 2019 (5,16 %). Sedangkan dibandingkan dengan tahun 2018 (4,60 %), realisasi kinerja tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,06 %. Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2020 terus mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi capaian kinerja tahun 2020 merupakan angka tertinggi (100,18 %) dibandingkan capaian kinerja tahun 2019 (88,65 %) dan tahun 2018 (100 %).

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah tahun 2020 yang tercantum dalam RPJMD 2019-2024 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.14**  
**Perbandingan Realisasi Capaian Sasaran**  
**Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja Tahun 2020 Dibandingkan dengan**  
**Target RPJMD**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,55	5,66	75,60

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2020 sebesar 5,66 % tidak mencapai target jangka menengah yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2020 sebesar 4,55 %, sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 75,60 %.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Ciamis sejak tahun 2018-2020 terus mengalami kenaikan. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa selama tahun 2020, penduduk Kabupaten Ciamis yang termasuk angkatan kerja yang dapat diserap pasar kerja mengalami penurunan jumlahnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut semakin diperparah akibat adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan meningkatnya pengangguran. Kondisi yang sama dialami oleh seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya daya saing tenaga kerja dilaksanakan melalui 4 (empat) program, yaitu :

- 1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- 2) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- 3) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
- 4) Program Transmigrasi Regional

Penyerapan/realisasi anggaran dalam upaya pencapaian sasaran adalah sebesar Rp. 491.840.000,- atau sebesar 97,66 % dari total pagu anggaran Rp. 503.645.000,- dengan capaian output sebesar 84,42 % dan capaian outcome sebesar 52,44 %.

## Sasaran 7 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Transportasi

Infrastruktur transportasi menjadi hal vital yang harus diperhatikan. Infrastruktur transportasi yang berkualitas dapat mempermudah dan mempercepat mobilitas orang maupun suplai barang dan jasa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mengingat sangat pentingnya infrastruktur transportasi yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Ciamis berupaya untuk mewujudkan sasaran tersebut.

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi dilakukan melalui 1 (satu) indikator yaitu: kemantapan jalan dan jembatan kabupaten. Kemantapan jalan dan jembatan kabupaten adalah perbandingan antara panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan kabupaten secara keseluruhan. Perhitungan indikator kemantapan jalan dan jembatan kabupaten dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$= \frac{(\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap})}{(\text{Total panjang jalan kabupaten})} \times 100\%$$

Pada tahun 2020, panjang jalan Kabupaten Ciamis dalam kondisi mantap adalah 614,251 km, sedangkan panjang jalan kabupaten secara keseluruhan berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 620/KPTS.588-Huk/2014 tentang Jalan Kabupaten, yang ditetapkan pada tanggal 11 Nopember 2014, adalah sepanjang 848,296 km. Berdasarkan data dan perhitungan tersebut, maka realisasi (capaian nyata) kemantapan jalan pada tahun 2020 adalah sebesar 72,41 % sebagaimana terlihat pada tabel berikut :



**Tabel 3.15**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Transportasi**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Kemantapan jalan dan jembatan kabupaten	%	70,826	100,462	71,716	100,230	72,22	72,41	100,263

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas, diketahui bahwa :

- a. Target meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi tahun 2020 adalah sebesar 72,22 % dengan realisasi kinerja sebesar 72,41 %. Sehingga capaian kinerja tercapai melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 100,263 %.
- b. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu menunjukkan bahwa realisasi kinerja tahun 2020 (72,41 %) dan capaian kinerja tahun 2020 (100,263 %) mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2019 (71,716 %) dan capaian kinerja tahun 2019 (100,230 %). Realisasi kinerja tahun 2020 juga mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018 (70,826 %).

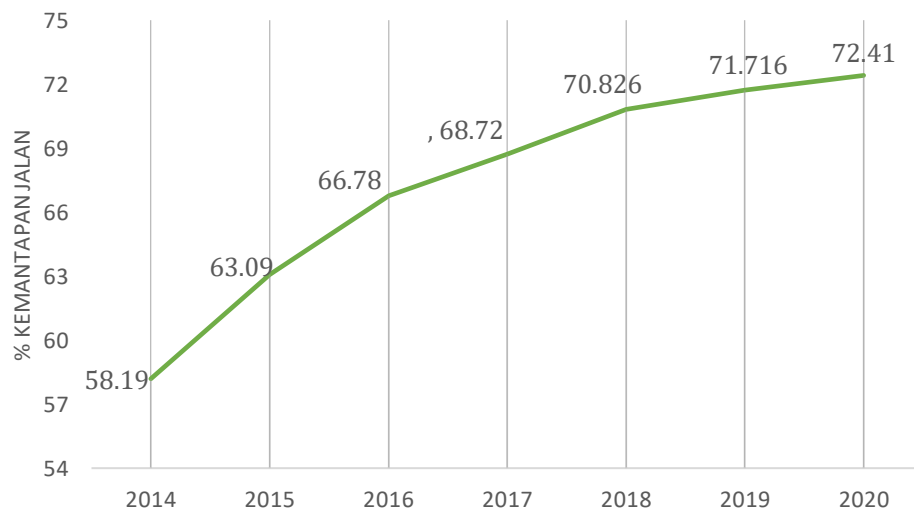
Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2020 dengan target jangka menengah tahun 2024 yang tercantum dalam RPJMD 2019-2024 bahwa untuk indikator kinerja menunjukkan realisasi kinerja melebihi target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 101,627 % sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.16**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Transportasi Tahun 2020**  
**dengan Target RPJMD**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja (%)
1	Kemantapan jalan dan jembatan kabupaten	%	71,251	72,41	101,627

Grafik perkembangan persentase capaian kemantapan jalan dan jembatan kabupaten di Kabupaten Ciamis selama 7 (tujuh) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

**Grafik 3.7**  
**Persentase Capaian Kemantapan Jalan dan Jembatan Kabupaten**  
**Tahun 2014 - 2020**



Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa persentase capaian kemantapan jalan dan jembatan kabupaten di Kabupaten Ciamis terus mengalami kenaikan. Kondisi tersebut menunjukkan semakin baiknya kondisi jalan dan jembatan kabupaten yang dapat menunjang lancarnya mobilitas masyarakat untuk berbagai kepentingan.

Faktor yang mendukung peningkatan kemantapan jalan dan jembatan kabupaten selain dipengaruhi oleh besarnya kenaikan anggaran yang cukup

signifikan setiap tahunnya, juga dipengaruhi oleh terjadinya perubahan status jalan kabupaten yang semula sepanjang 772,31 km, kemudian menjadi sepanjang 478,11 km dan akhirnya menjadi sepanjang 848,296 km, disamping itu juga karena pada tahun 2014 sampai dengan 2020 banyak pekerjaan penanganan jalan yang menggunakan konstruksi aspal *hotmix* dan *rigid* (beton).

Untuk mencapai indikator kemantapan jalan dan jembatan kabupaten dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) program yaitu:

- 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- 2) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
- 3) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;
- 4) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
- 6) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
- 7) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
- 8) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
- 9) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas;
- 10) Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum;
- 11) Program Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor;
- 12) Program Peningkatan Promosi Keselamatan LLAJ;
- 13) Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
- 14) Program Peningkatan Sarana/Prasarana Pemerintah;
- 15) Program Perencanaan Tata Ruang;
- 16) Program Pemanfaatan Ruang;
- 17) Program Peningkatan Jalan Lingkungan di Kawasan Permukiman Perkotaan/Perdesaan.

Penyerapan/realisasi anggaran dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi adalah sebesar Rp. 216.117.595.945,- atau 98,15 % dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp. 220.193.445.504,- dengan rata-rata capaian output sebesar 91,89 % dan outcome sebesar 151,64 %.

**Sasaran 8  
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air**

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air dilakukan melalui 1 (satu) indikator yaitu: persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik. Perhitungan indikator tersebut dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$= \frac{\text{(Luas area daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik)}}{\text{(Total luas area daerah irigasi kabupaten)}} \times 100\%$$

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis tahun 2020, luas area daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah 8.265,075 m/ha sedangkan total luas area daerah irigasi kabupaten adalah 16.350,29 m/ha. Berdasarkan data dan rumus perhitungan, maka capaian kinerja persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2020 adalah sebesar 50,550 % sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.17**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	29,950	100,167	34,561	112,940	49,548	50,550	102,022

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran di atas, diketahui bahwa :

- a. Realisasi kinerja tahun 2020 untuk indikator kinerja sasaran tercapai melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 102,022 %.

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu menunjukkan bahwa realisasi tahun 2020 (50,550) lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2019 (34,561) dan realisasi tahun 2018 (29,950).

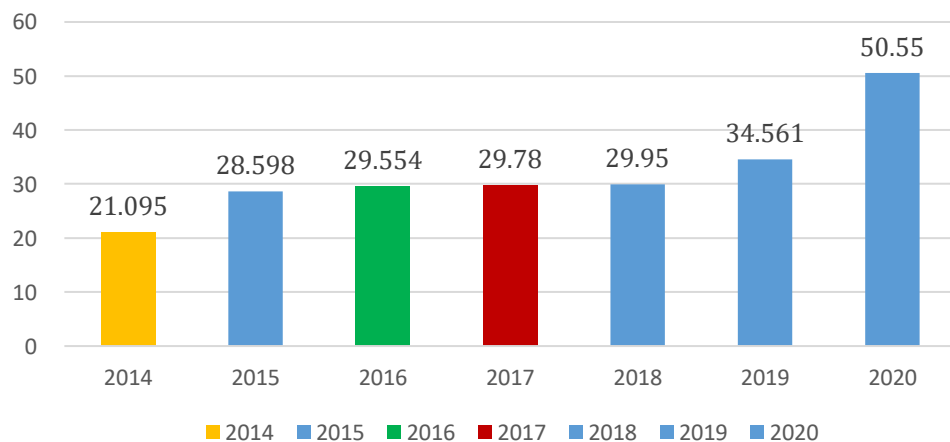
Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2020 dengan target jangka menengah tahun 2020 yang tercantum dalam RPJMD 2019-2024 bahwa untuk indikator kinerja menunjukkan realisasi kinerja melebihi target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 102,022 % sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.18**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber**  
**Daya Air Tahun 2020 dengan Target RPJMD**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	49,548	50,550	102,022

Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik terus mengalami kenaikan setiap tahunnya sebagaimana tersaji dalam grafik berikut:

**Grafik 3.8**  
**Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kabupaten Ciamis**  
**Tahun 2014 - 2020**



Perkembangan yang cukup positif ini disebabkan karena jaringan irigasi khususnya irigasi teknis selalu mendapatkan penanganan operasional dan pemeliharaan (OP), serta beberapa jaringan irigasi teknis yang mengalami kerusakan telah dilaksanakan rehabilitasi dan perbaikan, walaupun di beberapa area jaringan irigasi banyak yang mengalami kerusakan karena bencana alam, tetapi kebanyakan terjadi pada area irigasi yang sebelumnya telah mengalami kerusakan, tetapi karena yang dihitung hanya area dalam kondisi baik, maka capaian rasio nyata mengalami peningkatan. Selain itu, besarnya kenaikan anggaran yang cukup signifikan di setiap tahunnya juga cukup mempengaruhi.

Untuk mencapai indikator sasaran rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yaitu

- 1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
- 2) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
- 3) Program Pengendalian Daya Rusak Air.

Penyerapan/realisasi anggaran dalam upaya pencapaian sasaran adalah sebesar Rp. 31.960.635.938,- atau sebesar 95,97 % dari total pagu anggaran Rp. 33.303.383.800,- dengan capaian output sebesar 91,56 % dan capaian outcome sebesar 92,56 %.

## Sasaran 9 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui 1 (satu) indikator yaitu: Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). LPE adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat, yang digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan. Diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional/daerah. LPE dapat dihitung dengan rumus :

$$R = \frac{\text{PDRBAdHKt} - \text{PDRBAdHKt1}}{\text{PDRBAdHKt1}} \times 100$$

Keterangan :

R = pertumbuhan ekonomi tahunan pada tahun t terhadap tahun t-1

PDRBAdHKt = Produk Domestik Regional Brutto atas dasar Harga Konstan tahun t

PDRBAdHKt1 = Produk Domestik Regional Brutto atas dasar Harga Konstan tahun t-1

Hasil pengukuran LPE sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 3.19**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	LPE	%	5,44	107,72	5,38	98,35	1,65-2,96	-0,14	-8,48

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas, dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- Kinerja sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diukur melalui indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dengan target sebesar 1,65 % dan realisasi kinerja sebesar -0,14 % dengan capaian kinerja sebesar -8,48 %.
- Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dengan tahun lalu menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator LPE tahun 2020 (-0,14 %) mengalami kontraksi sebesar 5,52 % dibandingkan LPE tahun 2019 (5,38 %) dan kontraksi sebesar 5,58 % dibandingkan LPE tahun 2018 (5,44 %). Sedangkan capaian kinerja tahun 2020 (-8,48 %) mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan capaian kinerja tahun 2019 (98,35 %) dan capaian kinerja tahun 2018 (107,72%).

Perbandingan realisasi kinerja sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dengan target jangka menengah tahun 2020 yang tercantum dalam RPJMD 2019-2024 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 3.20**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 Dengan Target RPJMD**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja (%)
1	LPE	%	5,53	-0,14	-2,53

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2020 tidak mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan dan menunjukkan capaian kinerja sebesar -2,53 %.

Dampak COVID-19 menyebabkan hampir seluruh sektor lapangan usaha mengalami kontraksi terutama pada sektor transportasi dan pergudangan, konstruksi, perdagangan serta penyediaan akomodasi makanan dan minuman akibat adanya pembatasan mobilitas masyarakat. Sektor yang tumbuh positif diantaranya pertanian, kehutanan dan perikanan, pengadaan air, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, *real estate* dan jasa pendidikan.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program, yaitu :

- 1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- 2) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- 3) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- 4) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- 5) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- 6) Program Pengembangan Industri Kecil Kawasan Agropolitan
- 7) Program Fasilitasi dan Pengembangan Kebijakan Perekonomian dan SDA



Penyerapan/realisasi anggaran dalam upaya pencapaian sasaran adalah sebesar Rp. 10.909.823.860,- atau sebesar 97,54 % dari total pagu anggaran Rp. 11.185.275.810,- dengan capaian output sebesar 95,11 % dan capaian outcome sebesar 104,62 %.

### Sasaran 10 Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat

Kesenjangan atau disparitas pendapatan adalah kondisi dimana terjadi suatu ketimpangan pendapatan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Tidak meratanya distribusi pendapatan dapat memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Distribusi pendapatan secara regional maupun nasional yang tidak merata tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum. Pada prinsipnya distribusi pendapatan baik secara regional maupun nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya.

Pengukuran kinerja sasaran menurunnya disparitas pendapatan dilakukan melalui indikator Indeks Gini. Indeks Gini adalah suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 hingga 1, menjelaskan kadar pemerataan (ketimpangan) distribusi pendapatan nasional. Semakin kecil (semakin mendekati nol) koefisiennya, pertanda semakin baik atau merata distribusi. Di lain sisi, koefisien yang kian besar (semakin mendekati satu) mengisyaratkan distribusi yang kian timpang. Angka rasio Gini dapat ditaksir secara visual langsung dari kurva *lorenz*, yaitu perbandingan luas area yang terletak diantara kurva *lorenz* dan diagonal terhadap luas area segitiga OBC, semakin melengkung kurva *lorenz*, akan semakin luas area yang dibagi, rasio Gininya akan semakin besar, menyiratkan distribusi pendapatan yang kian timpang.

Hasil pengukuran terhadap realisasi kinerja dan capaian kinerja menurunnya disparitas pendapatan yang dilakukan melalui indikator Indeks Gini sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 3.21**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Gini	Poin	0,31	100	0,354	83,87	0,35	0,336	104,00

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran tersebut di atas, dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Target kinerja menurunnya disparitas pendapatan yang diukur dari indikator Indeks Gini tahun 2020 adalah sebesar 0,35 poin dengan realisasi sebesar 0,34 poin sehingga menunjukkan capaian kinerja melebihi target yaitu sebesar 104,00 %.
- b. Perbandingan realiasi kinerja tahun 2020 dengan beberapa tahun lalu menunjukkan bahwa realisasi kinerja tahun 2020 (0,336 poin) lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2019 (0,354 poin) dan lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018 (0,31 poin).
- c. Capaian kinerja tahun 2020 (104,00 %) mengalami kenaikan sebesar 20,13 % dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 (83,87 %) dan mengalami kenaikan sebesar 4,00 % dibandingkan dengan tahun 2018 (100 %).

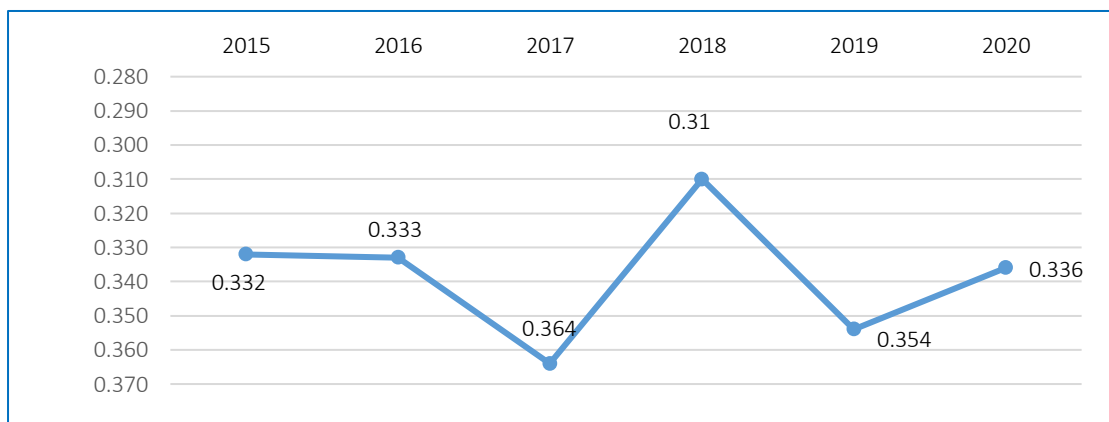
Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2020 dengan target jangka menengah yang tercantum dalam RPJMD 2019-2024 menunjukkan bahwa Indeks Gini tahun 2020 melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 104,00 % sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 3.22**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran**  
**Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Tahun 2020 Dengan Target RPJMD**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Gini	Poin	0,35	0,336	104,00

Capaian Indeks Gini Kabupaten Ciamis tahun 2020 tercatat sebesar 0,336 atau turun 0,018 poin dari kondisi tahun 2019 yang saat itu sebesar 0,354. Hal ini menunjukkan penurunan ketimpangan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan masyarakat. Ini menandakan ketimpangan ekonomi di Kabupaten Ciamis semakin rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

**Grafik 3.9**  
**Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Ciamis**  
**Tahun 2014 - 2020**



Adapun beberapa faktor yang mendukung tercapainya kinerja sasaran adalah :

1. Inflasi yang terhitung rendah, dimana pendapatan uang bertambah dan diikuti dengan penambahan produksi barang-barang yang cukup proporsional;
2. Pembangunan antar wilayah mulai merata;
3. Investasi yang terkendali, sehingga persentase pendapatan modal dari kerja tambahan lebih kecil dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja yang mengakibatkan berkurangnya pengangguran;
4. Mobilitas sosial mulai berkembang dengan baik;

5. Mulai bangkitnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga dan lain-lain.

Strategi dan upaya untuk memicu menurunnya kesenjangan pendapatan adalah :

- a. Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan dan memprioritaskan anggaran atau belanja langsung untuk kemajuan sektor yang didasarkan pada karakteristik daerah atau sektor unggulan. Pengembangan sektor unggulan ini mempunyai peranan penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan peluang bagi berkembangnya sektor terkait lainnya.
- b. Strategi kebijakan terkait pengembangan sektor yang menjadi karakteristik Kabupaten Ciamis atau sektor unggulan yang dapat meningkatkan tenaga kerja, pada sektor pertanian dibarengi dengan pengembangan industri pengolahannya. Begitupun sektor unggulan lainnya sehingga dapat melibatkan masyarakat lokal dalam menyerap tenaga kerja.
- c. Terdapat hubungan yang positif antara pendapatan per kapita terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Maka penyediaan kesempatan kerja yang seluas-luasnya merupakan kebijakan untuk mengurangi tingkat pengangguran yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Upaya pencapaian sasaran menurunnya kesenjangan pendapatan dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan dengan penyerapan/realisasi anggaran program secara keseluruhan sebesar Rp. 738.378.000,- atau sebesar 99,73 % dari total pagu anggaran Rp. 740.348.000,- dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 128,36 %.

### Sasaran 11 Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Sasaran ini memberikan gambaran bahwa Kabupaten Ciamis sebagai daerah agraris mempunyai kontribusi yang besar dalam produksi pertanian dan penyediaan pangan dalam rangka pembangunan pada aspek pertanian di Jawa Barat. Peningkatan kesejahteraan petani merupakan salah satu dari empat sukses

pembangunan pertanian, salah satu metode pengukuran sejauh mana tingkat kesejahteraan petani adalah besaran Nilai Tukar Petani (NTP).

Konsep Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani ( $I_t$ ) dengan indeks harga yang dibayar petani ( $I_b$ ), serta Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) yang merupakan ukuran kemampuan rumah tangga pertanian dalam memenuhi kebutuhan usaha pertaniannya. Selain NTP, banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan petani, diantaranya adalah data konsumsi dan pengeluaran rumah tangga pertanian yang diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yaitu melalui proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan pada rumah tangga dengan sumber utama pendapatannya dari pertanian. Perhitungan Nilai Tukar Petani (NTP) berdasarkan rumus BPS adalah :

$$NTP = \frac{\text{Indeks harga yang diterima petani } (I_t)}{\text{Indeks harga yang dibayar petani } (I_b)} \times 100$$

Berdasarkan data pada tahun 2020, indeks harga yang diterima petani ( $I_t$ ) adalah sebesar 153,85 dan indeks harga yang dibayar petani ( $I_b$ ) sebesar 137,45, maka berdasarkan rumus perhitungan di atas dapat dihitung besaran Nilai Tukar Petani (NTP) adalah sebesar 111,93 poin.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya kesejahteraan petani tahun 2020 yang diukur melalui indikator Nilai Tukar Petani (NTP) adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 3.23**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Kesejahteraan Petani**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Nilai Tukar Petani	Poin	112,77	100,67	113,07	102,79	112,80	111,93	99,23

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut di atas, dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Target kinerja meningkatnya kesejahteraan petani yang diukur dari indikator Nilai Tukar Petani tahun 2020 adalah sebesar 112,80 poin dengan realisasi sebesar 111,93 poin sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 99,23%.
- b. Perbandingan realiasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2020 dengan beberapa tahun lalu menunjukkan bahwa realisasi kinerja tahun 2020 (111,93 poin) lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 (113,07 poin) dan tahun 2018 (112,77 poin). Capaian kinerja tahun 2020 (99,23%) dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 (102,79%) mengalami penurunan sebesar 3,56%.

Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2020 dengan target jangka menengah tahun 2020 yang tercantum dalam RPJMD 2019-2024 menunjukkan bahwa realisasi kinerja tahun 2020 (111,93 poin) lebih rendah dari target RPJMD (112,8 poin) dengan capaian kinerja sebesar 99,23 %, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

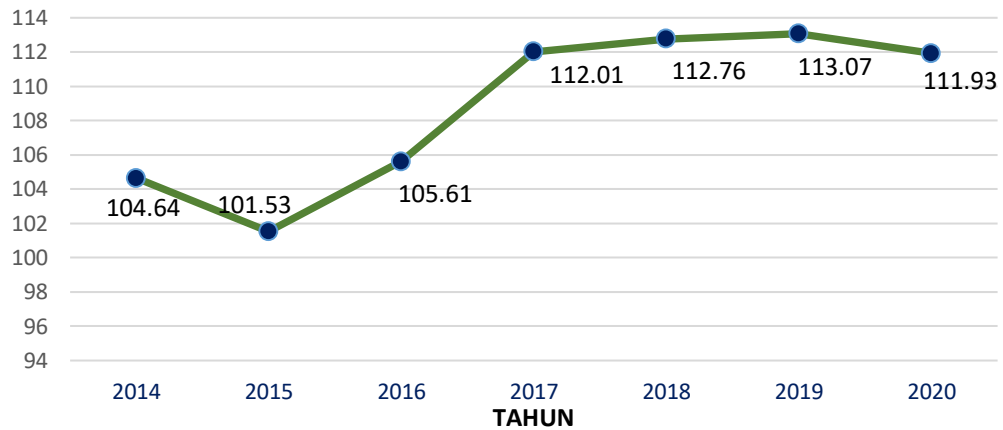
**Tabel 3.24**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Kesejahteraan Petani Tahun 2020 Dengan Target RPJMD**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja (%)
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	112,8	111,93	99,23

Pada Tahun 2020 Nilai Tukar Petani berada pada kondisi yang cukup sejahtera, meskipun Nilai Tukar Petani tersebut lebih rendah target dari yang direncanakan sebesar 112,8 poin. Hal tersebut menggambarkan komponen pengeluaran rumah tangga tani atau yang disebut indeks yang dibayar oleh petani umumnya pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga lebih kecil dibandingkan pengeluaran untuk biaya usaha tani (biaya produksi dan penambahan barang modal). Hal ini menunjukkan apabila terjadi kenaikan harga kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga yang lebih besar akan cepat mempengaruhi indeks yang

dibayar petani. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Ciamis sejak tahun 2014 -2020 dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

**Grafik 3.10**  
**Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Ciamis**  
**Tahun 2014 - 2020**



Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target NTP adalah Penurunan permintaan produk pertanian pada saat Pandemi Covid-19 sebagai akibat dari terganggunya proses distribusi dan penurunan daya beli. Meskipun demikian, NTP masih menunjukkan kondisi yang baik (>100). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya NTP diantaranya adalah :

1. Luas lahan garapan yang dikuasai oleh petani, semakin tinggi luas garapan yang dikerjakan oleh petani akan semakin tinggi biaya produksi yang dikeluarkan;
2. Besarnya hasil produksi pertanian yang dijual;
3. Harga jual produk di pasaran yang menjadi variable penting dan berpengaruh nyata;
4. Harga pupuk dan pestisida yang terjangkau oleh petani sehingga mengurangi beban produksi.

Hambatan yang dikhawatirkan timbul dari lahan tersebut diantaranya potensi alih fungsi lahan yang cukup tinggi terutama dikaitkan dengan kebutuhan perumahan bagi masyarakat yang cukup tinggi serta alih fungsi ke bidang lainnya misalnya industry dan perdagangan serta fasilitas umum lainnya yang berpotensi terhadap berkurangnya areal pertanian. Selain itu, rendahnya produktifitas

pertanian dan harga dasar gabah yang tidak proporsional selalu menjadi ancaman bagi para petani dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Strategi/upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam rangka mengantisipasi potensi masalah tersebut diantaranya yaitu adanya kebijakan tentang penyelenggaraan pertanian pangan berkelanjutan, pengendalian alih fungsi lahan secara terkoordinasi, penerapan system insentif dan disinsentif serta optimalisasi kegiatan-kegiatan penunjang lainnya di bidang pertanian.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya kesejahteraan petani dilaksanakan melalui 13 (tiga belas) program yaitu :

- 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- 2) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- 3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan;
- 4) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan;
- 5) Program peningkatan produksi, produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan;
- 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian;
- 7) Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
- 8) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
- 9) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
- 10) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
- 11) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;
- 12) Pengembangan Agropolitan Bidang Perikanan;
- 13) Pengembangan Agropolitan Bidang Peternakan.

Penyerapan/ realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp. 14.539.129.786,- atau sebesar 99,04 % dari total pagu anggaran Rp. 14.679.885.226,- dengan capaian output sebesar 104,62 % dan capaian outcome sebesar 108,53 %.



## Sasaran 12 Meningkatnya Investasi di Daerah

Investasi atau penanaman modal merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian suatu daerah. Meningkatnya investasi menjadi salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Investasi yang dilakukan secara tepat dapat menciptakan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Oleh sebab itu untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Ciamis berupaya meningkatkan investasi di daerah.

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya investasi di daerah dilakukan melalui 1 (satu) indikator yaitu: Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN. Perhitungan indikator tersebut dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$\frac{\text{Realisasi PMDN Tahun Evaluasi} - \text{Realisasi PMDN Tahun Sebelum Evaluasi}}{\text{Realisasi PMDN Sebelum Tahun Evaluasi}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.25**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Investasi di Daerah**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Kenaikan/Penurunan nilai realisasi PMDN	Persentase	N/A	N/A	5,5	N/A	5,5	-9,8	-178,2

Keterangan: N/A (*Not Available*) Capaian kinerja tidak diketahui (tidak bisa diukur) karena tidak ada target pada PK tahun tersebut dan mulai ditargetkan dalam PK tahun 2020

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran di atas, diketahui bahwa Nilai Realisasi PMDN tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya mencapai minus (-) 9,8 %. Investasi termasuk sektor yang mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19.

Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2020 dengan target jangka menengah tahun 2020 yang tercantum dalam RPJMD 2019-2024 menunjukkan bahwa realisasi kinerja tahun 2020 (199,590 Milyar) lebih rendah dari target RPJMD (230 Milyar) dengan capaian kinerja sebesar 86,78 %, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.26**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Investasi di Daerah Tahun 2020 Dengan Target RPJMD**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah Nilai realisasi PMDN	Milyar	230	199,590	86,78

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya investasi di daerah dilaksanakan melalui 4 (empat) program, yaitu :

- 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
- 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
- 3) Program peningkatan pelayanan perizinan;
- 4) Program Peningkatan Pelayanan Penanganan Pengaduan dan Advokasi.

Penyerapan/realisasi anggaran dalam upaya pencapaian sasaran adalah sebesar Rp. 932.418.493,- atau sebesar 98,73 % dari total pagu anggaran Rp. 944.441.000,- dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 100,80 %.

### Sasaran 13 Meningkatnya Daya Saing Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan modal penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, meningkatnya daya saing pariwisata selain secara positif berpengaruh pada pertumbuhan kunjungan, dapat juga menjadi tumpuan pemerintah dalam pengembangan potensi unggulan daerah dan menjadi daya tarik bagi investasi.

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya daya saing pariwisata dilakukan melalui indikator Indeks Daya Saing Pariwisata. Perhitungan Indeks Daya Saing Pariwisata dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan:

$$\text{Jumlah kunjungan wisatawan} / \text{Target kunjungan} \times 100$$

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya daya saing pariwisata sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.27**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Daya Saing Pariwisata**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Daya Saing Pariwisata	Poin	N/A	N/A	N/A	N/A	85	93,05	109,47

Keterangan: N/A (*Not Available*) Capaian kinerja tidak diketahui (tidak bisa diukur) karena tidak ada target pada PK tahun tersebut dan mulai ditargetkan dalam PK tahun 2020

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran di atas, diketahui bahwa target kinerja meningkatnya daya saing pariwisata yang diukur dengan indikator Indeks Daya Saing Pariwisata adalah sebesar 85 poin dengan realisasi kinerja sebesar 93,05 poin sehingga menunjukkan capaian kinerja melebihi target yaitu sebesar 109,47 %.

Perbandingan capaian kinerja sasaran Tahun 2020 dengan target jangka menengah tahun 2020 yang tercantum dalam RPJMD 2019-2024 menunjukkan bahwa realisasi kinerja tahun 2020 (93,05 poin) lebih tinggi dan melampaui target jangka menengah RPJMD (85 poin) dengan capaian kinerja sebesar 109,57 % sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 3.28**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Tahun 2020 dengan Target RPJMD**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Daya Saing Pariwisata	Poin	85	93,05	109,47

Capaian kinerja sasaran meningkatnya daya saing pariwisata yang melebihi target Perjanjian Kinerja maupun target RPJMD 2019-2024 tersebut diperoleh karena adanya dukungan program dan kegiatan yang digulirkan di bidang pariwisata yang diintegrasikan dan didukung oleh bidang lain diantaranya pertanian, peternakan, kehutanan.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya daya saing pariwisata dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, yaitu :

- 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- 3) Program Pengembangan Kemitraan.

Penyerapan/realisasi anggaran dalam upaya pencapaian sasaran adalah sebesar Rp. 5.618.285.500,- atau sebesar 97,76 % dari total pagu anggaran Rp. 5.746.810.000,- dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 85,66 %.

**Sasaran 14  
Terwujudnya Ketahanan Pangan Menuju Kemandirian Pangan**

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran terwujudnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dilakukan melalui indikator skor Pola Pangan Harapan (PPH). Perhitungan skor PPH dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan berikut:

$$\text{Skor PPH} = \text{Skor PPH Padi-padian} + \text{Skor PPH Umbi-umbian} + \text{Skor PPH Pangan Hewani} + \text{Skor PPH Minyak \& Lemak} + \text{Skor PPH Buah/Biji berminyak} + \text{Skor PPH Kacang-kacangan} + \text{Skor PPH Gula} + \text{Skor PPH Sayur \& Buah} + \text{Skor PPH Kelompok Lain-lain.}$$

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran terwujudnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.29**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Terwujudnya Ketahanan Pangan Menuju Kemandirian Pangan**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Skor PPH	Skor	89,8	117,38	89,4	116,10	77,50	91,5	118,06

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut di atas diketahui bahwa : target kinerja terwujudnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan yang diukur dari indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan target 77,50 poin dapat dicapai dengan realisasi sebesar 91,5 poin sehingga menunjukkan capaian kinerja 118,06%.

Perbandingan realiasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2020 dengan beberapa tahun lalu menunjukkan bahwa realisasi kinerja tahun 2020 (91,5 poin) lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 (89,4 poin) dan tahun 2018 (89,8 poin). Capaian kinerja tahun 2020 (118,06%) dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 (116,10%) mengalami kenaikan sebesar 1,96%.

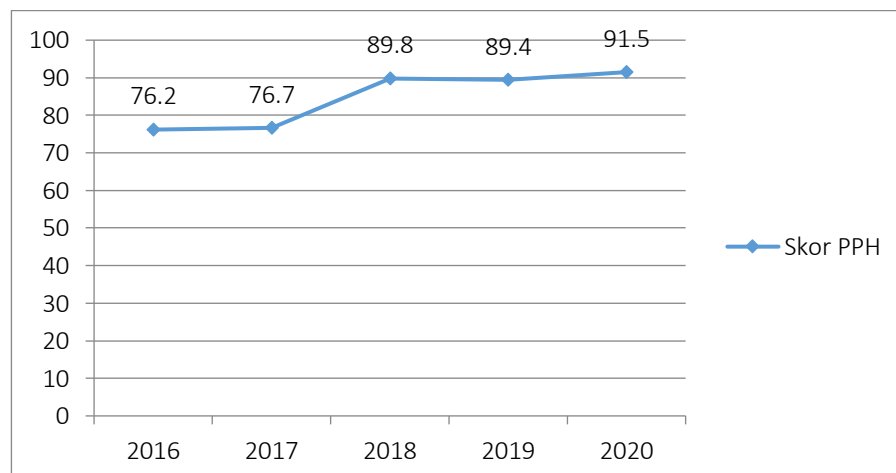
Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2020 dengan target jangka menengah tahun 2020 yang tercantum dalam RPJMD 2019-2024 bahwa untuk indikator kinerja menunjukkan bahwa realisasi kinerja tahun 2020 (91,5 poin) lebih tinggi dari target RPJMD (77,5 poin) dengan capaian kinerja sebesar 118,06 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.30**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran**  
**Terwujudnya Ketahanan Pangan Menuju Kemandirian Pangan Tahun 2020**  
**dengan Target RPJMD**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja (%)
1	Skor PPH	Skor	77,5	91,5	118,06

Pada Tahun 2020 skor PPH sebagai indikator terwujudnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan menunjukkan nilai yang cukup tinggi. Skor PPH tersebut melampaui target dari yang direncanakan sebesar 77,5 poin. Hal tersebut menggambarkan pola konsumsi masyarakat Kabupaten Ciamis sudah cukup baik dan masyarakat sudah mengkonsumsi pangan secara B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman). Perkembangan Skor PPH Kabupaten Ciamis sejak tahun 2016 -2020 dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

**Grafik 3.11**  
**Perkembangan Skor Pola Pangan harapan (PPH) Kabupaten Ciamis**  
**Tahun 2016 - 2020**



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/tercapainya indikator kinerja Skor PPH diantaranya adalah :

1. Pemanfaatan Pangan

Pemanfaatan pangan dilakukan dengan pengembangan pola konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA), pengembangan jejaring dan informasi pangan, dan peningkatan pengawasan keamanan pangan.

2. Perbaikan Gizi Masyarakat

Perbaikan gizi masyarakat dapat dilakukan dengan perbaikan pola konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman, Pemenuhan kebutuhan gizi bagi remaja, ibu hamil, dan balita, Penguatan sistem surveilan pangan dan gizi, penguatan program gizi lintas sektor.

Permasalahan yang terjadi adalah konsumsi karbohidrat penduduk Kabupaten Ciamis masih didominasi oleh kelompok padi-padian terutama beras dengan nilai konsumsi 335,4 gram/kap/hari lebih tinggi dibandingkan standar yang dianjurkan yaitu 275 gram/kap/hari meskipun trennya semakin menurun. Sedangkan konsumsi kelompok umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, buah biji berminyak, masih di bawah angka standar sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan konsumsi kelompok pangan tersebut agar konsumsi pangan menjadi lebih beragam dan berimbang.

Strategi/upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam rangka mengantisipasi potensi masalah tersebut diantaranya yaitu :

- 1) Internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan dengan melakukan advokasi, kampanye, promosi, dan sosialisasi kepada aparat dan masyarakat, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan melalui jalur formal dan non formal;
- 2) Pengembangan bisnis dan industri pangan berbasis sumber daya lokal dengan memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta melaksanakan advokasi, sosialisasi, dan penerapan standar

mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha rumah tangga, UMKM, dan koperasi;

- 3) Peningkatan akses pangan keluarga dengan memanfaatkan pekarangan dan media lainnya untuk budidaya aneka tanaman, ternak, dan ikan;
- 4) Pemberdayaan masyarakat dengan menggalakkan program gizi sebagai bagian dari 10 kegiatan pokok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
- 5) Peningkatan pola makan bergizi seimbang dan aman dengan melakukan sosialisasi, promosi, dan edukasi kepada masyarakat.

Upaya pencapaian sasaran terwujudnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dilaksanakan melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Penyerapan/ realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp. 321.782.430,- atau sebesar 95,26 % dari total pagu anggaran Rp. 337.800.000,- dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 168,17 %.

### Sasaran 15 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Meningkatnya kualitas lingkungan adalah keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah. Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah. Perhitungan IKLH dilakukan melalui 3 (tiga) variabel yaitu Indeks Pencemaran Air (IPA), Indeks Pencemaran Udara (IPU) dan Indeks Tutupan Hutan/atau Indeks Tutupan Vegetasi (ITV), dengan rumus perhitungan:

$$IKLH = 30\% \text{ Indeks Pencemaran Air} + 30\% \text{ Indeks Pencemaran Udara} + 40\% \text{ Indeks Tutupan Hutan/Lahan.}$$

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:



**Tabel 3.31**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	Poin	73,22	105,23	55,21	100,40	54,99	62,13	112,98

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut di atas, diketahui bahwa :

- a. Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebesar 54,99 poin dan terealisasi sebesar 62,13 poin, sehingga capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup tahun 2020 menunjukkan tingkat keberhasilan yang melebihi target yaitu sebesar 112,98 %.
- b. Apabila dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja sasaran tahun lalu, maka capaian kinerja tahun 2020 (112,98 %) lebih tinggi dari pada capaian kinerja tahun 2019 (100,40) dan tahun 2018 (105,23).

Perbandingan capaian kinerja sasaran Tahun 2020 dengan target jangka menengah tahun 2020 yang tercantum dalam RPJMD 2019-2024 menunjukkan bahwa realisasi kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup tahun 2020 (62,13) lebih tinggi dibandingkan dengan target dalam RPJMD (55,03) dengan capaian kinerja sebesar 112,90 % sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 3.32**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020**  
**dengan Target RPJMD**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	%	55,03	62,13	112,90

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Ciamis selama 6 (enam) tahun terakhir mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

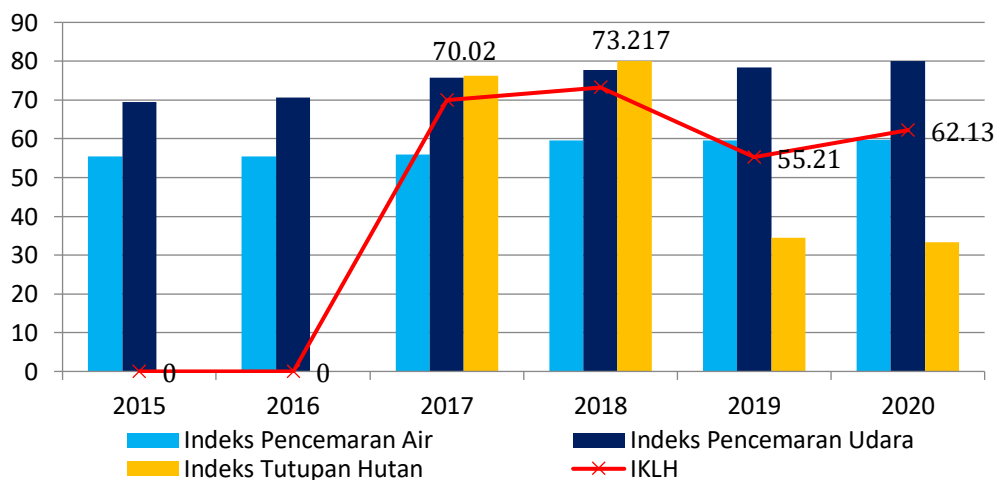
**Tabel 3.33**

**IKLH Kabupaten Ciamis Tahun 2015 – 2020 Berdasarkan Variabel**

Variabel IKLH	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Indeks Pencemaran Air	55,38	55,42	56,00	59,60	59,60	59,67
Indeks Pencemaran Udara	69,45	70,61	75,81	77,79	78,35	79,99
Indeks Tutupan Hutan/ Tutupan Vegetasi	N/A	N/A	76,22	80	34,54	33,34
IKLH	-	-	70,03	73,217	55,21	62,13

**Grafik 3.12**

**Perkembangan IKLH Kabupaten Ciamis  
Tahun 2015 - 2020**



Faktor yang menjadi pendukung meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang diukur pada aspek kualitas air, udara dan lahan mencakup kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, penegakan hukum lingkungan, dan kesadaran masyarakat.

Beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup, antara lain :

1. Hasil pemantauan kualitas air yang dilakukan belum menggambarkan keterwakilan kondisi kualitas air (*frekuensi* , titik lokasi dan jumlah sungai yang ada)
2. Belum adanya kebijakan penetapan kelas air semua sungai di Kabupaten Ciamis;
3. Sulitnya penanganan pencemaran dari sumber pencemaran UMKM;
4. Sulitnya pengendalian perubahan alih fungsi lahan;
5. Beberapa komponen tutupan lahan belum dijadikan dasar perhitungan IKTL (hutan Rakyat, Perkebunan);
6. Meningkatnya sumber emisi bergerak dan tidak bergerak antara *Pressure* dan *Respon* kurang seimbang;

Adapun strategi dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengurangi hambatan-hambatan yang ada diantaranya adalah:

1. Upaya dalam melakukan peningkatan kualitas air melalui:
  - a. Sosialisasi pengendalian pencemaran dari sumber pencemaran tertentu (*point source*) dan tidak tertentu (*non-point / diffuse source*);
  - b. Sosialisasi pengendalian pencemaran air bagi IKM;
  - c. Fasilitasi pembangunan IPAL / Biogas Komunal IKM / peternakan / domestik;
  - d. Sosialisasi pengendalian pencemaran air bagi usaha kegiatan menengah besar, hotel dan rumah sakit;
  - e. Gerakan Bersih sungai;
  - f. Gerakan Pungut Sampah
  - g. Sekolah Sungai;
  - h. Fasilitasi sarana prasarana pengelolaan sampah
2. Upaya dalam melakukan peningkatan kualitas udara melalui:
  - a. Penanaman tanaman penyerap emisi di pinggir jalan;
  - b. Penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Taman-Taman kota;
  - c. *Car freeday* dan pembukaan jalur sepeda;
  - d. Penerapan jalur transportasi satu arah;
  - e. Pengendalian lalu lintas secara terpadu dengan ATCS (*Area Traffic Control System*)

3. Upaya dalam melakukan peningkatan kualitas tutupan lahan di bagi menjadi 3 (tiga) yaitu :
  - a. Pencegahan ;
    - Penetapan kawasan berfungsi lindung dalam RTRW;
    - Peningkatan Kesadaran dan kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap lingkungan hidup;
    - Pengurangan laju *Deforestasi*;
  - b. Pemulihan :
    - Rehabilitas Hutan dan lahan;
    - Pembangunan Taman Kehati, Kebun Raya, dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau;
    - Reklamasi lahan bekas tambang;
  - c. Kelembagaan :
    - Pengembangan kemitraan dengan para pemangku kepentingan;
    - Pembentukan kelembagaan pengelola lingkungan hidup;
    - Penguatan lembaga pengelola lahan pasca pemulihan.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dilaksanakan melalui 9 (sembilan) program, yaitu :

- 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- 4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- 5) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- 6) Program Pengembangan Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 7) Program Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Limbah B3
- 8) Program Kawasan Kumuh Perkotaan
- 9) Program Pengembangan Perumahan

Realisasi penyerapan anggaran secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 19.823.197.785,- atau 89,60 % dari total pagu anggaran Rp. 22.123.854.600,- dengan capaian output sebesar 95,84 % dan capaian outcome sebesar 109,62 %.

**Sasaran 16**

**Meningkatnya Ketahanan dan Adaptasi terhadap Bencana**

Meningkatnya ketahanan dan adaptasi terhadap bencana menjadi suatu keharusan dalam upaya penanganan kebencanaan. Semakin meningkatnya ketahanan dan adaptasi terhadap bencana pada suatu daerah maka semakin tinggi pula kapasitas atau kemampuan masyarakat untuk menanggulangi bencana, mengurangi ancaman, mengurangi dampak, mempersiapkan diri secara tepat bila terjadi ancaman, merespon, dan pulih dengan cepat dari dampak bencana.

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya ketahanan dan adaptasi terhadap bencana dilakukan melalui indikator Indeks Risiko Bencana. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.34**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Ketahanan dan Adaptasi Terhadap Bencana**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Risiko Bencana	Poin	N/A	N/A	156,20	107,57	168,00	141,60	115,71

*Keterangan: N/A (Not Available) Capaian kinerja tidak diketahui (tidak bisa diukur) karena tidak ada target pada PK tahun tersebut dan mulai ditargetkan dalam PK tahun 2019*

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran tersebut di atas, dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Target kinerja meningkatnya ketahanan dan adaptasi terhadap bencana yang diukur dengan indikator Indeks Risiko Bencana adalah sebesar 168,00 poin dengan realisasi kinerja sebesar 141,60 poin sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 115,71 %.

- b. Capaian kinerja sasaran meningkatnya ketahanan dan adaptasi terhadap bencana yang diukur dengan indikator Indeks Risiko Bencana dibandingkan dengan tahun lalu menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2020 (115,71 %) lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja tahun 2019 (107,57 %). Ini menunjukkan adanya penurunan Indeks Risiko Bencana Tahun 2020 (141,60 poin) sebesar 14,6 poin jika dibandingkan dengan tahun 2019 (156,20 poin). Adanya penurunan Indeks Risiko Bencana ini menunjukkan adanya peningkatan ketahanan dan adaptasi terhadap bencana di Kabupaten Ciamis.

Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2020 dengan target jangka menengah tahun 2020 yang tercantum dalam RPJMD 2019-2024 menunjukkan bahwa realisasi kinerja tahun 2020 (141,60 poin) lebih tinggi dibandingkan dengan target jangka menengah RPJMD (168 poin), dengan capaian kinerja sebesar 115,71 %, sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 3.35**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran**  
**Meningkatkan Ketahanan dan Adaptasi Terhadap Bencana Tahun 2020**  
**dengan Target RPJMD**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Risiko Bencana	Poin	168	141,60	115,71

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya ketahanan dan adaptasi terhadap bencana dilaksanakan melalui 6 (enam) program yaitu :

- 1) Program Mitigasi Bencana;
- 2) Program Penyebarluasan Informasi kebencanaan dan Penguatan Peran Masyarakat;
- 3) Program Penanganan Darurat dan Evakuasi Korban Bencana;
- 4) Program Pengelolaan Logistik dan Peralatan Penunjang Penanganan Bencana;
- 5) Program Pemulihan Pasca Bencana;
- 6) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

Penyerapan realisasi anggaran dalam upaya meningkatkan ketahanan dan adaptasi terhadap bencana adalah sebesar Rp 7.283.249.070,- atau sebesar 99,71 % dari total pagu anggaran Rp 7.304.660.800,- dengan capaian output sebesar 106,04 % dan capaian outcome sebesar 233,02 %.

### Sasaran 17 Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah

Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah dilakukan melalui 6 (enam) indikator kinerja, yaitu (1) Hasil Penilaian SAKIP, (2) Hasil Evaluasi LPPD, (3) Opini BPK, (4) Indeks Kepuasan Masyarakat, (5) Maturitas SPIP, dan (6) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.36**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Penilaian SAKIP	Predikat	B	100	B	100	B *)	B *)	100 *)
2	Predikat Penilaian LPPD	Predikat	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi **)	Sangat Tinggi **)	100 **)
3	Opini BPK	Predikat	WTP	100	WTP	100	WTP	WTP	100
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	80,92	91,84	81,93	99,85	82,66	84,00	101,62
5	Maturitas SPIP	Level	N/A	N/A	3,00	N/A	3,00	3,00	100
6	Indeks SPBE	Poin	N/A	N/A	2,35	N/A	1,66	2,64	159,04
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>				<b>97,96</b>		<b>99,96</b>			<b>110,11 (***)</b>

Keterangan: \*) Data Sangat Sementara, merupakan hasil evaluasi SAKIP tahun 2020 untuk penilaian akuntabilitas tahun 2019

\*\*) Data Sangat Sementara, merupakan hasil evaluasi LPPD tahun 2020 untuk penilaian LPPD tahun 2019

\*\*\*) Data Sangat Sementara

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut di atas, diketahui beberapa hal sebagai berikut :

- a. Kinerja sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah tahun 2020 diukur melalui 6 (enam) indikator dengan target dan realisasi kinerja sebagai berikut:
  - 1) Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020 untuk penilaian akuntabilitas tahun 2019 adalah B dengan capaian kinerja 100 %.
  - 2) Hasil Evaluasi LPPD Tahun 2020 untuk penilaian LPPD tahun 2019 adalah “Sangat Tinggi” dengan capaian kinerja 100 %.
  - 3) Opini BPK Tahun 2020 dengan target WTP, realisasi WTP, menunjukkan capaian kinerja sesuai target yaitu 100%. Pencapaian ini sama dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2019 dan 2018.
  - 4) Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 target 82,66 poin, realisasi 84,00 poin dan capaian kinerja melebihi target yaitu sebesar 101,62 %. Terjadi peningkatan IKM sebesar 2,07 % jika dibandingkan dengan tahun 2019 (81,93 %) dan peningkatan sebesar 3,08 % dibandingkan tahun 2018 (80,92 %).
  - 5) Maturitas SPIP Tahun 2020 dengan target level 3,00, realisasi mencapai level 3,00 sehingga menunjukkan capaian kinerja sesuai target yaitu 100 %. Pencapaian ini sama dengan realisasi kinerja tahun 2019.
  - 6) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan target 1,66 poin, realisasi 2,64 poin dan capaian kinerja melebihi target yaitu sebesar 159,04 %. Terjadi peningkatan Indeks SPBE sebesar 0,29 poin jika dibandingkan realisasi tahun 2019 (2,35 poin).
- b. Capaian kinerja masing-masing indikator yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi, semuanya tercapai sesuai target yang ditetapkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 adalah sebesar 110,11 %.

Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2020 dengan target jangka menengah tahun 2020 yang tercantum dalam RPJMD 2019-2024 adalah sebagaimana tabel berikut ini:



**Tabel 3.37**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah Tahun 2020**  
**Dengan Target RPJMD**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja (%)
1	Penilaian SAKIP	Predikat	B	B *)	100 *)
2	Predikat penilaian LPPD	Predikat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi **)	100 **)
3	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	100
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	82,66	84,00	101,62
5	Maturitas SPIP	Level	3,00	3,00	100
6	Indeks SPBE	Poin	N/A***)	159,04	N/A***)
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>		<b>%</b>			<b>100,324 ****)</b>

Keterangan: \*) Data Sangat Sementara, merupakan hasil evaluasi SAKIP tahun 2020 untuk penilaian akuntabilitas tahun 2019  
 \*\*) Data Sangat Sementara, merupakan hasil evaluasi LPPD tahun 2020 untuk penilaian LPPD tahun 2019  
 N/A \*\*\* (Not Available) Merupakan indikator tambahan yang tidak di targetkan dalam RPJMD tetapi diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020  
 \*\*\*\*) Data Sangat Sementara

Dari tabel tersebut diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2020 menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,324 %.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah dilaksanakan melalui 50 (lima puluh) program, yaitu :

- 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) Program Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian
- 3) Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya
- 4) Program Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
- 5) Program Penelitian Pengembangan dan Inovasi daerah
- 6) Program Penyelamatan dan pelestarian arsip daerah
- 7) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

- 8) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- 9) Program Pengembangan Kompetensi Aparatur
- 10) Program Pelayanan Fasilitasi KDH/WKDH
- 11) Program Penilaian Kinerja dan Pembinaan Disiplin Aparatur
- 12) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 13) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 14) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 15) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- 16) Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
- 17) Program Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Daerah
- 18) Program Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan
- 19) Program Peningkatan Kerja Sama Daerah
- 20) Program Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan Rakyat Daerah
- 21) Program Fasilitasi Kegiatan Keprotokolan
- 22) Program Penegasan Batas Daerah
- 23) Program Penganggaran Keuangan Daerah
- 24) Program Pelaporan Keuangan Daerah
- 25) Program Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
- 26) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 27) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 28) Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah
- 29) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 30) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
- 31) Program Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 32) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa
- 33) Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Konflik
- 34) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- 35) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan
- 36) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- 37) Program Penataan Administrasi Kependudukan

- 38)Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- 39)Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- 40)Program Pemberdayaan Organisasi Masyarakat untuk Mewujudkan Kondusifitas Daerah
- 41)Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- 42)Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- 43)Program Pengembangan Karier, Mutasi dan Kepangkatan
- 44)Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
- 45)Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
- 46)Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- 47)Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (PPIPD)
- 48)Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
- 49)Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- 50)Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Penyerapan realisasi anggaran dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah adalah sebesar Rp 152.187.269.409,28,- atau sebesar 92,69 % dari total pagu anggaran Rp 164.182.217.631,- dengan capaian output sebesar 106 % dan capaian outcome sebesar 108,10 %.

Analisa penjelasan capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut:

## **1. Hasil Evaluasi SAKIP**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Ciamis senantiasa melaksanakan perbaikan-perbaikan yang mendasar dan penguatan dari berbagai aspek terkait dengan pembenahan dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Yang dimaksud dengan indikator Penilaian SAKIP adalah evaluasi/penilaian atas implementasi SAKIP berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KemenPANRB. Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2020 untuk penilaian akuntabilitas tahun 2019 meraih predikat B (Baik) dengan nilai 66,26. Sedangkan untuk evaluasi dan penilaian SAKIP tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Ciamis mendapatkan nilai sebesar 65,39 atau kategori B (Baik) dan sebesar 62,23 atau kategori B (Baik) pada tahun 2017. Sampai dengan laporan ini disusun, data penilaian SAKIP untuk tahun 2020 belum tersedia.

Meningkatnya nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam beberapa tahun terakhir tentunya melalui penguatan beberapa aspek/komponen SAKIP seperti perencanaan dan pengukuran kinerja serta evaluasi internal di lingkungan pemerintah daerah. Selain itu, mulai munculnya komitmen dari pimpinan daerah maupun pimpinan SKPD untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja menjadi motivasi tersendiri dan geliat untuk menjadi lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan roda pemerintahan.

Namun, disamping beberapa hal yang dikemukakan diatas, masih terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh evaluator yang menunjukkan bahwa kelemahan utama yang menjadi penyebab kurang maksimalnya nilai SAKIP terletak pada kelemahan penyusunan dokumen perencanaan. Kelemahan ini tentu saja akan membawa dampak yang besar terhadap siklus selanjutnya. Dokumen perencanaan yang disusun pada umumnya belum memuat sasaran dan indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan atau kegagalan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian pengukuran kinerja, yaitu membandingkan antara target dengan realisasi, tidak bisa dilakukan. Indikator kinerja dan target yang

ditetapkan adalah hal yang paling krusial dalam penilaian akuntabilitas instansi pemerintah. Proses akuntabilitas tidak mungkin bisa dilaksanakan jika instansi pemerintah belum menetapkan apa yang ingin dicapai dengan indikator kinerja yang obyektif dan terukur. Hasilnya, dokumen perencanaan hanya memuat program dan kegiatan sebagai pelaksanaan janji-janji kepala daerah yang sulit untuk diukur keberhasilan pertanggungjawabannya.

Untuk mencapai indikator sasaran penilaian SAKIP dilaksanakan melalui 8 (delapan) program yaitu :

- 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) Program Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian;
- 3) Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya;
- 4) Program Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 5) Program Penelitian Pengembangan dan Inovasi daerah;
- 6) Program Penyelamatan dan pelestarian arsip daerah;
- 7) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah;
- 8) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Penyerapan Realisasi anggaran sebesar Rp. 4.801.173.093,- atau 96,84 % dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp 4.958.090.293,- dengan capaian output sebesar 99,52 % dan outcome sebesar 105,37 %.

## **2. Hasil Evaluasi LPPD**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota adalah Laporan Wajib Kepala Daerah kabupaten/kota yang disusun setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud Pasal 69 dan 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Capaian kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan atau hasil EKPPD oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap LPPD Kabupaten Ciamis Tahun

2018 yang dilaporkan pada tahun sebelumnya memperoleh skor sementara sebesar 2,9495 atau kategori prestasi Tinggi (T), setelah dilakukan evaluasi dan validasi oleh Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kementerian Dalam Negeri kemudian ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-8840 Tahun 2018 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2017, capaian kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis memperoleh skor 3,0165 atau dengan kategori prestasi Sangat Tinggi (ST).

Sedangkan hasil evaluasi LPPD tahun 2020 untuk penilaian LPPD tahun 2019 mencapai predikat “Sangat Tinggi”, dan telah mencapai target yang ditetapkan. Tercapainya sasaran predikat penilaian terhadap LPPD dimaksud merupakan sebuah gambaran bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Ciamis telah berjalan dengan lancar serta kerjasama dan koordinasi antar susunan pemerintahan di Kabupaten Ciamis terjalin dengan baik. Selain itu dukungan, kebersamaan dan kekompakan seluruh SKPD dalam pengumpulan dan kelengkapan data pendukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tataran pengambil kebijakan, pelaksanaan kebijakan maupun pelaksanaan urusan konkuren yang meliputi urusan wajib dan pilihan dapat difasilitasi dengan valid, lengkap dan akuntabel.

Untuk mencapai indikator sasaran predikat penilaian LPPD dilaksanakan melalui 14 (empat belas) program yaitu :

- 1) Program Pengembangan Kompetensi Aparatur;
- 2) Program Pelayanan Fasilitasi KDH/WKDH;
- 3) Program Penilaian Kinerja dan Pembinaan Disiplin Aparatur;
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 6) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 7) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
- 8) Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- 9) Program Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Daerah;
- 10) Program Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan;
- 11) Program Peningkatan Kerja Sama Daerah;

- 12) Program Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan Rakyat Daerah;
- 13) Program Fasilitasi Kegiatan Keprotokolan;
- 14) Program Penegasan Batas Daerah.

Dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 52.056.966.860,- atau 93,56 % dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp 55.641.125.833,- dengan capaian output sebesar 123,54 % dan outcome sebesar 118,66 %.

### 3. Opini BPK

Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Target Perjanjian Kinerja sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah yang diukur dengan Indikator Opini BPK adalah WTP. Sedangkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Ciamis tahun 2020 mendapat penilaian/opini WTP dari BPK. Ini menunjukkan bahwa realisasi Indikator Opini BPK telah sesuai target yaitu WTP dengan capaian kinerja sebesar 100%, sama dengan capaian kinerja tahun 2018 dan tahun 2019.

WTP menyatakan bahwa laporan keuangan dengan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Faktor yang mempengaruhi pencapaian opini WTP adalah pengelolaan keuangan daerahnya semakin akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Dengan kata lain, semua pencatatan keuangan daerahnya dilakukan secara wajar, termasuk didalamnya penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah/aset tetap. Sehingga laporan keuangan itu bisa menjadi alat pengambilan keputusan yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik. Selain itu faktor yang mempengaruhi pencapaian opini WTP adalah Komitmen Pimpinan Daerah,

Pengguna Anggaran dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Keuangan serta Pemberian *Reward and Punishment*.

Untuk mencapai indikator sasaran tersebut, telah dilaksanakan kegiatan melalui program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah melalui kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD serta Perubahan APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Penatausahaan Akuntansi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Peningkatan Penerimaan dan Penyelesaian Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan Barang Milik Daerah serta didukung oleh Kegiatan Pelatihan SDM aparatur pengelola keuangan, pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan terintegrasi.

Hambatan/masalah yang ditemui adalah jumlah aset yang dimiliki Kabupaten Ciamis yang sangat banyak dan tersebar di setiap unit kerja. Penatausahaan barang milik daerah serta persediaan barang sangatlah kompleks karena menyangkut pengelolaan barang daerah mulai dari pendataan sampai dengan mutasi, penyusutan, dan penghapusan aset tetap. Dalam penatausahaan dan pelaporan aset tetap ini disadari masih terdapat kekurangan yang perlu dibenahi dan dilengkapi terutama dalam Pengamanan Aset, selain itu hambatan yang ditemui yaitu kurang berperannya tugas Verifikasi pertanggungjawaban keuangan oleh Pejabat Pengelola Keuangan SKPD.

Strategi dan upaya pemecahan masalah terkait dengan penatausahaan aset tetap yang belum optimal, Pemerintah Kabupaten Ciamis berupaya terus meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan aset tetap dan segera menertibkan penatausahaan aset tetap pada masing-masing SKPD sesuai tanggungjawab setiap SKPD dengan melakukan inventarisasi, penilaian, dan kodefikasi aset tetap yang melibatkan seluruh unit kerja dan pengurus barang. Pemerintah Kabupaten Ciamis telah melaksanakan rekonsiliasi barang daerah terhadap seluruh SKPD setiap bulan dan pengembangan serta pendampingan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Aset dengan dilaksanakannya pelatihan penatausahaan aset tetap terhadap para pengurus



barang seluruh SKPD, selain itu diperlukan pengembangan sistem pengelolaan aset yang berbasis *web base* sehingga dapat diakses oleh unit kerja terkecil yang ada di pelosok-pelosok. Terkait dengan Permasalahan kurangnya berperannya tugas PPK-SKPD dalam memverifikasi Pertanggungjawaban keuangan yaitu dengan dilaksanakannya pelatihan serta meningkatkan Sistem Pengendalian Intern bagi tiap SKPD.

Untuk mencapai indikator sasaran tersebut, telah dilaksanakan beberapa kegiatan melalui 8 (delapan) program yaitu :

- 1) Program Penganggaran Keuangan Daerah;
- 2) Program Pelaporan Keuangan Daerah;
- 3) Program Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- 4) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 6) Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah;
- 7) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 8) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.

Penyerapan realisasi anggaran program untuk pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui Indikator Opini BPK adalah sebesar Rp. 68.019.115.349,28,- atau sebesar 89,91 % dari total pagu anggaran Rp. 75.649.471.055,- dengan capaian output sebesar 98,98 % dan capaian outcome sebesar 100,76 %.

#### **4. Indeks Kepuasan Masyarakat**

Dalam rangka mendorong pencapaian sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Ciamis secara rutin menyelenggarakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan salah satu metode yang umumnya digunakan untuk mendapatkan *feed back*/umpan balik atas kinerja/kualitas pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada masyarakat sebagai bahan perbaikan/peningkatan kinerja/kualitas pelayanan secara berkesinambungan.

Pada tahun 2015-2017 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Selanjutnya sejak tahun 2018, Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Indikator ini merupakan angka yang menunjukkan hasil dari pengukuran kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Nilai IKM digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Semakin tinggi nilai IKM maka penyelenggaraan pelayanan publik semakin baik. IKM Kabupaten Ciamis diperoleh dari nilai rata-rata nilai IKM seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

$$IKM = \frac{\text{Jumlah Total Nilai IKM Seluruh OPD yang melaksanakan SKM}}{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan SKM}}$$

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah yang diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.38**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah Diukur Melalui IKM**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	80,92	91,84	81,93	99,85	82,66	84,00	101,62

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah tahun 2020 yang diukur dari indikator nilai IKM menunjukkan realisasi sebesar 84,00 poin dengan mutu pelayanan B (Baik) dan capaian kinerja sebesar 101,62 %. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja IKM Tahun 2019 (81,93 poin) dengan mutu pelayanan B (Baik) maka nilai IKM tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 2,07 poin. Faktor pendukung pencapaian nilai IKM tersebut antara lain adalah:

- a. Adanya kejelasan mengenai produk/jenis pelayanan publik.
- b. Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pendampingan penyusunan dokumen standar pelayanan publik.
- c. Tersusunnya dokumen standar pelayanan publik.
- d. Terinformasikannya standar pelayanan publik.

Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2020 di masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik yang tersebar di 55 OPD dengan keseluruhan jumlah responden sebanyak 5.436 orang, dengan menggunakan metode kuesioner yang memuat 10 (sepuluh) buah pertanyaan terkait unsur pelayanan publik yaitu:

- 1) Persyaratan;
- 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
- 3) Waktu Penyelesaian;
- 4) Biaya/Tarif;
- 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
- 6) Kompetensi Pelaksana;
- 7) Perilaku Pelaksana;
- 8) Pungutan Tidak Resmi;
- 9) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan
- 10) Sarana dan Prasarana.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat masing-masing OPD berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah di Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.39**  
**Nilai IKM Setiap OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis**  
**Tahun 2020**

NO	NAMA OPD	NILAI IKM	MUTU PELAYANAN
1	Sekretariat Daerah	86,39	B
2	Sekretariat DPRD	85,29	B
3	Inspektorat	84,33	B
4	Dinas Pendidikan	82,40	B
5	Dinas Kesehatan	81,52	B
6	Dinas Sosial	86,30	B
7	Dinas Tenaga Kerja	88,00	B
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	82,84	B
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	78,41	B
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	80,33	B
11	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	86,84	B
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	77,10	B
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	84,15	B
14	Dinas Koperasi, Ukm Dan Perdagangan	77,27	B
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	87,23	B
16	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	84,81	B
17	Dinas Peternakan Dan Perikanan	84,55	B
18	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga	83,40	B

NO	NAMA OPD	NILAI IKM	MUTU PELAYANAN
19	Dinas Pariwisata	85,60	B
20	Dinas Perhubungan	84,31	B
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	81,46	B
22	Satuan Polisi Pamong Praja	85,00	B
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	82,71	B
24	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	93,42	A
25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	85,88	B
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	82,41	B
27	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	86,20	B
28	Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis	82,64	B
29	Kecamatan Ciamis	84,42	B
30	Kecamatan Baregbeg	82,72	B
31	Kecamatan Cikoneng	82,85	B
32	Kecamatan Sadananya	79,99	B
33	Kecamatan Cijeungjing	82,75	B
34	Kecamatan Sindangkasih	78,44	B
35	Kecamatan Cihaurbeuti	88,17	B
36	Kecamatan Panumbangan	77,77	B
37	Kecamatan Panjalu	87,06	B
38	Kecamatan Sukamantri	86,79	B
39	Kecamatan Panawangan	84,76	B
40	Kecamatan Lumbung	85,05	B
41	Kecamatan Kawali	85,29	B

NO	NAMA OPD	NILAI IKM	MUTU PELAYANAN
42	Kecamatan Jatinagara	85,44	B
43	Kecamatan Rajadesa	86,88	B
44	Kecamatan Rancah	90,60	A
45	Kecamatan Tambaksari	88,23	B
46	Kecamatan Sukadana	86,17	B
47	Kecamatan Cipaku	82,09	B
48	Kecamatan Cisaga	83,99	B
49	Kecamatan Cimaragas	86,92	B
50	Kecamatan Cidolog	76,67	B
51	Kecamatan Pamarican	82,61	B
52	Kecamatan Banjarsari	81,50	B
53	Kecamatan Banjaranyar	88,00	B
54	Kecamatan Lakbok	82,80	B
55	Kecamatan Purwadadi	81,32	B
<b>IKM Kabupaten Ciamis (Nilai Rata-Rata IKM)</b>		<b>84,00</b>	<b>B</b>

Sumber : Bagian Organisasi Setda kabupaten Ciamis, Tahun 2020

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik)	: 88,31 – 100
B (Baik)	: 76,61 – 88,30
C (Kurang Baik)	: 65,00 – 76,60
D (Tidak Baik)	: 25,00 – 64,99

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah Baik (B) dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat setelah dikonversi sebesar 84,00. Berdasarkan hasil analisis terhadap unsur pelayanan

publik yang dinilai dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), diperoleh informasi sebagai berikut :

- a. Unsur pelayanan yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah Biaya/Tarif (U4) dan Pungutan Tidak Resmi (U8). Kondisi ini mengindikasikan bahwa Pelayanan Publik di Kabupaten Ciamis bebas dari pungutan liar dan umumnya pelayanan diberikan secara gratis/sangat murah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Unsur pelayanan yang memiliki nilai rata-rata terendah adalah Waktu Penyelesaian (U3) dan Sarana dan Prasarana (U10).

Berdasarkan hal tersebut, maka secara umum terkait dengan waktu penyelesaian pelayanan dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik perlu mendapat perhatian/perbaikan.

Indikator capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik tahun 2020 yang tercantum dalam rencana jangka menengah RPJMD 2019-2024 adalah persentase SKPD yang melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Data pada tabel di bawah ini memperlihatkan bahwa capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Persentase SKPD yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat) adalah sebesar 101,62 %.

**Tabel 3.40**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Diukur Melalui IKM**  
**Dengan Target RPJMD**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Target RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (Persentase SKPD yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat)	%	84,00	82,66	101,62

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah yang diukur dengan indikator IKM dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) program, yaitu :

- 1) Program Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- 2) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa
- 3) Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Konflik
- 4) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- 5) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan
- 6) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- 7) Program Penataan Administrasi Kependudukan
- 8) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- 9) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- 10) Program Pemberdayaan Organisasi Masyarakat untuk Mewujudkan Kondusifitas Daerah

Penyerapan realisasi anggaran program untuk pencapaian sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah yang diukur dengan indikator IKM adalah sebesar Rp. 15.195.301.648,- atau sebesar 96,95 % dari total pagu anggaran Rp. 15.673.751.000,- dengan capaian output sebesar 97,13 % dan capaian outcome sebesar 96,14 %.

## **5. Maturitas SPIP**

Salah satu indikator untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah adalah tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atau disebut tingkat maturitas SPIP sesuai dengan Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Maturitas SPIP menunjukkan derajat kematangan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan penganggaran dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada tahun 2020, Indikator Level Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Ciamis telah berhasil mencapai level 3 (dari skala level 0-5). Pencapaian ini telah sesuai target pada Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yaitu level 3 sehingga menunjukkan capaian kinerja sebesar 100 %.



Secara umum dengan berada pada level Terdefinisi (level 3) mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis telah melaksanakan praktek pengendalian intern. Pemerintah Kabupaten Ciamis telah melaksanakan 5 (lima) unsur kriteria penilaian SPIP yaitu penilaian terhadap lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta unsur pemantauan.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah yang diukur dengan indikator Maturitas SPIP dilaksanakan melalui 4 (empat) program, yaitu :

- 1) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
- 2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
- 3) Program Pengembangan Karier, Mutasi dan Kepangkatan;
- 4) Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;

Penyerapan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.365.856.459,- atau 98,87 % dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp 8.461.808.450,- dengan capaian output sebesar 92,67 % dan outcome sebesar 91,65 %.

## **6. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Pengguna SPBE yang dimaksud adalah instansi pusat, pemerintah daerah, Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, tata kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu dan efisien. Unsur-unsur tersebut diantaranya rencana induk SPBE, proses bisnis, anggaran dan belanja SPBE, data dan informasi elektronik, pusat data terpadu, jaringan intra pemerintah, sistem penghubung layanan pemerintah, aplikasi SPBE, keamanan informasi pemerintah dan layanan SPBE baik layanan administrasi maupun layanan publik.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah yang diukur melalui indikator Indeks SPBE Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.41**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah Diukur Melalui SPBE**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks SPBE	Poin	N/A	N/A	2,35	N/A	1,66	2,64	159,04

Keterangan: N/A (*Not Available*) Capaian kinerja tidak diketahui (tidak bisa diukur) karena tidak ada target pada PK tahun tersebut dan mulai ditargetkan dalam PK tahun 2020

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah tahun 2020 yang diukur dari indikator Indeks SPBE menunjukkan realisasi sebesar 2,64 poin (Predikat Baik) dengan capaian kinerja melebihi target yaitu sebesar 159,04 %. Jika dibandingkan dengan realisasi Indeks SPBE Tahun 2019 (2,35 poin), realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,29 poin.

Realisasi kinerja sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah tahun 2020 yang diukur melalui indikator Indeks SPBE tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2020 yang tercantum dalam RPJMD 2019-2024 dikarenakan merupakan indikator tambahan yang yang tidak di targetkan dalam RPJMD tetapi diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga capaian kinerja tidak dapat diukur.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya kinerja pemerintah daerah yang diukur dengan indikator SPBE dilaksanakan melalui 6 (enam) program, yaitu :

- 1) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
- 2) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- 3) Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (PPIPD)
- 4) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

- 5) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- 6) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Penyerapan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.748.856.000,- atau sebesar 98,71 % dari total pagu anggaran Rp. 3.797.971.000,- dengan capaian output sebesar 106,79 % dan capaian outcome sebesar 127,78 %.

### Sasaran 18 Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Desa, Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat Desa

Desa secara esensial merupakan tingkatan paling dasar yang menjadi pondasi dalam struktur pemerintahan di Indonesia sekaligus masyarakat desa merupakan entitas komunitas yang terkecil (inti). Oleh karena itu, meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa, kesejahteraan dan kemandirian desa menjadi target sasaran yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis. Untuk menuju desa yang maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa dalam rangka mensejahterakan kehidupan desa.

Pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa, kesejahteraan dan kemandirian desa dilakukan melalui indikator Indeks Desa Membangun (IDM). IDM merupakan indeks komposit yang dihasilkan dari rata rata Indeks Ketahanan Ekologi (IKL), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) setiap desa. Perhitungan IDM dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan:

$$IDM = 1/3 (IKL + IKE + IKS)$$

*Keterangan:*

*IDM : Indeks Desa Membangun*

*IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi)*

*IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi*

*IKS : Indeks Ketahanan Sosial*

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa, kesejahteraan dan kemandirian desa dengan indikator IDM, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.42**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Desa, Kesejahteraan dan Kemandirian Desa**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	Poin	N/A	N/A	N/A	N/A	0,6300	0,713	113,175

*Keterangan: (N/A, Not Available) Capaian Kinerja tidak diketahui (tidak bisa diukur) karena tidak ada target pada PK tahun tersebut dan mulai ditargetkan dalam PK tahun 2020*

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran di atas, diketahui bahwa target meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa, kesejahteraan dan kemandirian desa di Kabupaten Ciamis tahun 2020 adalah sebesar 0,6300 poin dengan realisasi kinerja melebihi target yaitu sebesar 0,713 poin. Sehingga capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa, kesejahteraan dan kemandirian desa di Kabupaten Ciamis tahun 2020 adalah sebesar 113,175 %.

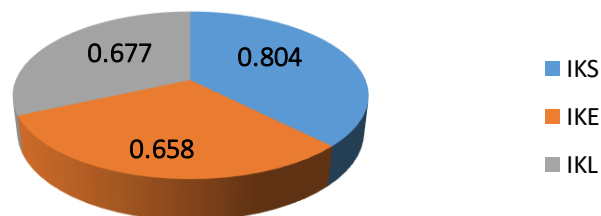
Perbandingan capaian kinerja sasaran Tahun 2020 dengan target jangka menengah tahun 2020 yang tercantum dalam RPJMD 2019-2024 menunjukkan bahwa realisasi kinerja tahun 2020 (0,713 poin) lebih tinggi dan melampaui target jangka menengah RPJMD (0,6300 poin) dengan capaian kinerja sebesar 113,175 % sebagaimana tabel di berikut ini:

**Tabel 3.43**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Desa, Kesejahteraan dan**  
**Kemandirian Desa Tahun 2020 Dibandingkan dengan Target RPJMD**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja (%)
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	Poin	0,6300	0,713	113,175

IDM Kabupaten Ciamis tahun 2020 yang mencapai 0,713 poin merupakan indeks komposit yang dihasilkan dari rata rata Indeks Ketahanan Ekologi (IKL), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) dengan rincian persentase tiap dimensinya tersaji pada grafik berikut:

**Grafik 3.13**  
**Persentase Dimensi Indeks Desa Membangun**  
**di Kabupaten Ciamis Tahun 2020**



Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2020 yang melebihi target menunjukkan telah tercapainya Misi Kelima yaitu penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa.

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa, kesejahteraan dan kemandirian desa, dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program, yaitu :

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- 2) Program Peningkatan Pembangunan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna
- 3) Program Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa

- 4) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Kecamatan
- 5) Program Penguatan Otonomi Desa
- 6) Program Peningkatan Koordinasi Pembangunan Kewilayahan
- 7) Program Peningkatan Pembangunan Kelurahan

Penyerapan/realisasi anggaran dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya layanan kesehatan sebesar Rp. 12.053.631.020,- atau sebesar 98,02 % dari total pagu anggaran Rp. 12.297.046.260,- dengan capaian output sebesar 100 % dan capaian outcome sebesar 98,50 %.

### 3.3 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut didukung dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis Tahun 2020 dengan alokasi anggaran belanja langsung urusan wajib dan non urusan sebesar Rp 1.107.270.364.834,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.023.660.197.308,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 92,45 %. Adapun komposisi Belanja APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.44**  
**Komposisi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung**  
**APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2020**

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	1.682.892.328.079,00	1.642.655.476.758,00	97,61
2.	Belanja Langsung	1.107.270.364.834,00	1.023.660.197.308,00	92,45
	<b>Jumlah</b>	<b>2.790.162.692.913,00</b>	<b>2.666.315.674.066,00</b>	<b>95,56</b>

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 *Un-Audited* BPK RI

Dilihat dari komposisi Belanja APBD Tahun 2020, Belanja Tidak Langsung memberikan kontribusi sebesar 61,61 % dari realisasi belanja Kabupaten Ciamis tahun 2020 dan sisanya sebesar 38,39 % merupakan Belanja Langsung. Adapun pagu anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.45**  
**Anggaran Untuk Mewujudkan Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis**  
**Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

No	Sasaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia			
	01. Terwujudnya SDM yang cerdas, kreatif dan inovatif serta berakhlak mulia	219.629.718.464	211.050.124.349	96,09
	02. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	378.942.729.539	324.769.391.801	85,70
	03. Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak perempuan dan anak	4.245.208.400	4.107.356.224	96,75
	04. Meningkatnya kualitas dan kuantitas peserta KB dan ketahanan keluarga	9.534.063.800	9.404.827.198	98,64
	05. Berkurangnya jumlah penduduk miskin	1.355.831.000	1.350.421.000	99,60
	06. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	503.645.000	491.840.000	97,66
2.	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah			
	07. Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi	220.193.445.504	216.117.595.945	98,15
	08. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pengelolaan Sumber Daya Air	33.303.383.800	31.960.635.938	95,97
3.	Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal			
	09. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	11.185.275.810	10.909.823.860	97,54
	10. Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat	740.348.000	738.378.000	99,73
	11. Meningkatnya	14.679.885.226	14.539.129.786	99,04

No	Sasaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
	kesejahteraan petani			
	12. Meningkatnya Investasi di Daerah	944.441.000	932.418.493	98,73
	13. Meningkatnya daya saing pariwisata	5.746.810.000	5.618.285.500	97,76
	14. Terwujudnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan	337.800.000	321.782.430	95,26
4.	Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan			
	15. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	22.123.854.600	19.823.197.785	89,60
	16. Meningkatnya ketahanan dan adaptasi terhadap bencana	7.304.660.800	7.283.249.070	99,71
5.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien			
	17. Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	164.182.217.631	152.187.269.409,28	92,69
6.	Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa			
	18. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa, Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat Desa	12.297.046.260	12.053.631.020	98,02
<b>Jumlah Total</b>		<b>1.107.270.364.834</b>	<b>1.023.660.197.308</b>	<b>92,45</b>

Dari tabel di atas diketahui besaran dan rincian alokasi anggaran yang disediakan untuk mewujudkan kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis pada setiap sasaran kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.107.270.364.834,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.023.660.197.308,- atau 92,45 % dari total anggaran yang dialokasikan untuk semua sasaran.

Berdasarkan alokasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis, menunjukkan bahwa secara keseluruhan anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 terealisasi dibawah alokasi anggaran yang disediakan (< 100%). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan



memiliki efektifitas yang baik dalam mewujudkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi realisasi penggunaan anggaran dalam pencapaian target sasaran (kinerja) yang telah ditetapkan, berikut ini disajikan capaian kinerja setiap sasaran beserta realisasi anggaran yang digunakan serta efisiensi anggaran pada masing-masing sasaran sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 3.46**  
**Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Dalam Pencapaian Kinerja**  
**Pemerintah Kabupaten Ciamis**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi Anggaran (%)
			Jumlah (Rp)	%	
1.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia				
	01. Terwujudnya SDM yang cerdas, kreatif dan inovatif serta berakhlak mulia	100,36	211.050.124.349	96,09	3,91
	02. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	100	324.769.391.801	85,70	14,30
	03. Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak perempuan dan anak	99,81	4.107.356.224	96,75	3,25
	04. Meningkatnya kualitas dan kuantitas peserta KB dan ketahanan keluarga	100	9.404.827.198	98,64	1,36
	05. Berkurangnya jumlah penduduk miskin	100,26	1.350.421.000	99,60	0,40
	06. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	100,18	491.840.000	97,66	2,34

No	Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi Anggaran (%)
			Jumlah (Rp)	%	
2.	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah				
	07. Meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi	100,263	216.117.595.945	98,15	1,85
	08. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pengelolaan Sumber Daya Air	102,022	31.960.635.938	95,97	4,03
3.	Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal				
	09. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	-8,48	10.909.823.860	97,54	2,46
	10. Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat	104	738.378.000	99,73	0,27
	11. Meningkatkan kesejahteraan petani	99,23	14.539.129.786	99,04	0,96
	12. Meningkatkan Investasi di Daerah	-178	932.418.493	98,73	1,27
	13. Meningkatkan daya saing pariwisata	109,47	5.618.285.500	97,76	2,24
	14. Terwujudnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan	118,06	321.782.430	95,26	4,74
4.	Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan				
	15. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	112,98	19.823.197.785	89,60	10,40
	16. Meningkatkan ketahanan dan adaptasi terhadap bencana	115,71	7.283.249.070	99,71	0,29
5.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien				
	17. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah	110,11	152.187.269.409,28	92,69	7,31

No	Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi Anggaran (%)
			Jumlah (Rp)	%	
6.	Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa				
18.	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan desa, Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat Desa	113,175	12.053.631.020	98,02	1,98
Jumlah Rata-Rata		83,29	1.023.660.197.308	92,45	7,55

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat mengenai efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mewujudkan pencapaian target kinerja pada masing-masing sasaran. Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 1.107.270.364.834,- terealisasi sebesar Rp. 1.023.660.197.308,- atau 92,45 % dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang dihasilkan secara keseluruhan sebesar 83,29 %. Dengan demikian terdapat efisiensi/sisa anggaran Rp. 83,610,167,526,- atau sebesar 7,55 % dari total anggaran yang ada.

### 3.4 PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada tahun 2020 Kabupaten Ciamis terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dalam berbagai aspek. Berbanding lurus dengan upaya dan kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis, maka berbagai prestasi di berbagai bidang telah diraih, baik di tingkat Provinsi, maupun Nasional. Daftar prestasi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.47**

**Daftar Prestasi dan Penghargaan yang Diraih Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020**

NO	NAMA PRESTASI YANG DIPEROLEH	PERINGKAT KE	BIDANG	DIPEROLEH/ DIANUGRAHKAN DARI	ATAS NAMA
<b>A. TINGKAT PROVINSI</b>					
1.	Marching Band (Pekan Pemuda Nasional)	1	Keolahragaan	Perkumpulan Pemuda Indonesia	Pemkab Ciamis
2.	Marching Band (Asian Virtual Championships 2020)	II	Keolahragaan	(AMBC) ASIAN MARCHING BAND CONFEDERATION	PEMKAB. CIAMIS
3.	Kumite 75 Kg Junior Putra (Karate)	II	Keolahragaan	Kejurda Provinsi Jawa Barat	Ahdiat Junjun Saepudin (Pencab Ciamis)
4.	Kumite Perorangan-59 Junior Putri (Karate)	II	Keolahragaan	Kejurda Provinsi Jawa Barat	Jauza Najla Naurah (Pencab Ciamis)
5.	Kata Perorangan Senior Putra (Karate)	III	Keolahragaan	Kejurda Provinsi Jawa Barat	Moch Isnaeni (Pencab Ciamis)
6.	Kumite-54 Kadet Putri (Karate)	III	Keolahragaan	Kejurda Provinsi Jawa Barat	Salsabila Agustin (Pencab Ciamis)
7.	IMI (Balap Motor)	I	Keolahragaan	Jabar Open Road Race Team Championship Part2 Tahun 2020	Ahmad (Pencab Ciamis)
8.	IMI (Balap Motor)	III	Keolahragaan	Jabar Open Road Race Team Championship Part2 Tahun 2020	Farel (Pencab Ciamis)

NO	NAMA PRESTASI YANG DIPEROLEH	PERINGKAT KE	BIDANG	DIPEROLEH/ DIANUGRAHKAN DARI	ATAS NAMA
9.	Giri 50 LC Meter Bifins Fuslatda	I	Keolahragaan	Kejuaraan Selam Antar Pengcab se-Jawa Barat 2020	Dheya Nazhira (Pengcab Ciamis)
10.	Kwarcab Tergiat	IV	Kepemudaan	KWARTIR DAERAH JAWA BARAT	PEMKAB. CIAMIS
11.	Kwarcab Tergiat	I	Kepemudaan	KWARTIR DAERAH JAWA BARAT	PEMKAB. CIAMIS
12.	Pinilih Pentas Daring Taman Budaya Jawa Barat	I	Kebudayaan	Taman Budaya Jawa Barat	Sanggar Galuh Pakuan
13.	Pentas Virtual Tari Kontemporer	-	Kebudayaan	Disparbud Jawa Barat	Studio Titik Dua
14.	Juara 2 Lomba Artikel Populer – Bank Indonesia Wil. Tasikmalaya	II	Kebudayaan	Bank Indonesia Wilayah Tasikmalaya	Ridwan Hasyimi
15.	Raksaprasada/ Sekolah Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata Tingkat Provinsi)		Lingkungan Hidup	Provinsi Jawa Barat (Gubernur Jawa Barat)	MI Andalan Kec. Cijeungjing
16.	Raksaprasada/ Sekolah Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata Tingkat Provinsi)		Lingkungan Hidup	Provinsi Jawa Barat (Gubernur Jawa Barat)	SDN 4 Kertasari Kec. Ciamis
17.	Raksaprasada/ Sekolah Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata Tingkat Provinsi)		Lingkungan Hidup	Provinsi Jawa Barat (Gubernur Jawa Barat)	MTsN 1 Ciamis Kec. Ciamis
18.	Raksaprasada/ Sekolah Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata Tingkat Provinsi)		Lingkungan Hidup	Provinsi Jawa Barat (Gubernur Jawa Barat)	MTsN 11 Ciamis Kec. Sukamantri
19.	Lomba Poster COVID-19	I	PPPA	FAD Provinsi Jawa Barat	Forum Anak Daerah (FAD) Kab. Ciamis

NO	NAMA PRESTASI YANG DIPEROLEH	PERINGKAT KE	BIDANG	DIPEROLEH/ DIANUGRAHKAN DARI	ATAS NAMA
20.	Tenaga Penggerak Desa	I	DALDUK PP	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat	Eti Carkiti, S.IP
21.	Jingle Bangga Kencana	I	KBKKK DALDUK PP	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat	Sabila Azzahra
22.	Bina Keluarga Remaja	I	KBKKK	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat	BKR Madani
23.	Kampung KB Terbaik	I	DALDUK PP	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat	Kampung KB Mawar
24.	Inovasi Kelompok BKR	I	KBKKK	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat	BKR Bunga Tanjung
25.	KB Lestari 15 Tahun Teladan	II	DALDUK PP	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat	Nunung Nur Hasanah/Ija Kustija
26.	Bhakti Ikatan Bidan Indonesia	II	KBKKK	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat	Dinas PPKBPPPA Kab. Ciamis
27.	Pencapaian Akseptor Baru dalam Kegiatan Pelayanan Sejuta Akseptor	II	KBKKK	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat	Dinas PPKBPPPA Kab. Ciamis

NO	NAMA PRESTASI YANG DIPEROLEH	PERINGKAT KE	BIDANG	DIPEROLEH/ DIANUGRAHKAN DARI	ATAS NAMA
28.	PLKB Teladan	Harapan I	DALDUK PP	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat	Abdul Hanan, S.IP
29.	KB Lestari 20 Tahun Teladan	Harapan I	DALDUK PP	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat	Eruk Rukayati/Tatang
30.	Pengelola Pencatatan dan Pelaporan BangsaKencana	Harapan II	DALDUK PP	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat	Kecamatan Lumbung
31.	Duta Remaja GENRE Pria	Harapan I	KBKKK	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat	Mulyadi Ariansyah
32.	Penghargaan Duta Remaja GENRE Wanita Kategori Paper Terbaik	-	KBKKK	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat	Amik Maltina
33.	Tertib Administrasi Terbaik Kelompok PIK Remaja	-	KBKKK	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat	PIK-R PERISAI BANGSA
34.	10 Terbaik PIK Remaja Kategori RAP Unggulan	-	KBKKK	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat	PIK-R TANJUNG MANGGU OKE
35.	10 Terbaik PIK Remaja Kategori TIKTOK Unggulan	-	KBKKK	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat	PIK-R TANJUNG MANGGU OKE

NO	NAMA PRESTASI YANG DIPEROLEH	PERINGKAT KE	BIDANG	DIPEROLEH/ DIANUGRAHKAN DARI	ATAS NAMA
36.	10 Terbaik PIK Remaja Kategori Video Dokumen Unggulan	-	KBKKK	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat	PIK-R JAYA KUSUMA
<b>B. TINGKAT NASIONAL</b>					
1.	Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD T.A 2019		Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis
2.	<i>Innovative Government Award (IGA)</i> untuk Kategori Kabupaten Sangat Inovatif		Inovasi Daerah	Kementerian Dalam Negeri RI	Pemerintah Kab. Ciamis
3.	Pembinaan Proklim Terbaik 2020		Lingkungan Hidup	Kemen LHK - RI	Pemerintah Kab. Ciamis
4.	Sertifikat Proklim Utama 2020		Lingkungan Hidup	Kemen LHK - RI	Dusun Antralina Desa Sumberjaya Kec. Cihaurbeuti
5.	Sertifikat Proklim Utama 2020		Lingkungan Hidup	Kemen LHK - RI	Dusun Pasirpeuteuy Desa Pawindan Kec. Ciamis
6.	Sertifikat Proklim Utama 2020		Lingkungan Hidup	Kemen LHK - RI	Dusun Pasirtamiang Tonggoh Desa Pasirtamiang Kec. Cihaurbeuti
7.	Lomba Cipta Puisi Tingkat Nasional Pena Artas Part VI	IV	Kebudayaan	Pena Artas VI	Yuyus Supriatna
8.	5 Besar SouthAsian Dance Festival	V	Kebudayaan	South Asian Dance Festival	Sanggar Galuh Pakuan
9.	Lomba Essai Kemeparekraf RI	III	Kebudayaan	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI	Ridwan Hasyimi
10.	Pentas Virtual Kemeparekraf RI	-	Kebudayaan	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI	a. Jaro X Yus b. Gardu Teater c. Novina Nur Manggala (Padepokan Seni Renggana nis) d. Very Virgiansyah (Sanggar Galuh Pakuan)



NO	NAMA PRESTASI YANG DIPEROLEH	PERINGKAT KE	BIDANG	DIPEROLEH/ DIANUGRAHKAN DARI	ATAS NAMA
					e. R. Rahmayanti N. (Studio Titik Dua)
11.	Penghargaan dalam Kegiatan Pelayanan Sejuta Akseptor 2020	-	KBKKK	KEPALA BKKBN PUSAT	BUPATICIAMIS
12.	Penghargaan dalam Kegiatan Pelayanan MKJP pada Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2020	-	KBKKK	KEPALA BKKBN PUSAT	KABUPATEN CIAMIS

## BAB IV

# PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Ciamis Tahun 2020 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tujuan pelaporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi dan gambaran kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai dan yang seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan kinerja ke depannya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 3 Oktober 2019. Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 menggambarkan kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Ciamis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Ciamis Tahun 2020.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020, terdapat 18 (delapan belas) sasaran dengan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja yang menunjukkan rata-rata capaian kinerja dari seluruh sasaran adalah sebesar 83,29 %.

Hasil pengukuran pencapaian setiap sasaran menunjukkan capaian kinerja sebagai berikut:

- Sebanyak 14 sasaran (77,78 %) tercapai sesuai dan melebihi target ( $\geq 100\%$ )
- Sebanyak 4 sasaran (22,22 %) tidak tercapai sesuai target ( $< 100\%$ ).

Sedangkan rincian ketercapaian setiap indikator kinerja menunjukkan capaian kinerja sebagai berikut:

- Sebanyak 13 indikator atau sebesar 52 % tercapai melebihi target ( $> 100\%$ );
- Sebanyak 8 indikator atau sebesar 32 % tercapai sesuai target ( $= 100\%$ );
- Sebanyak 4 indikator atau sebesar 16 % tidak mencapai target ( $< 100\%$ ).

Untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD lingkup Kabupaten Ciamis, dialokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis Tahun 2020 sebesar Rp 1.107.270.364.834,00- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.023.660.197.308,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 92,45 %.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran, secara umum telah dapat terpenuhi sesuai harapan dan menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020. Namun demikian masih terlihat adanya sebagian kecil sasaran dan indikator sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan karena adanya beberapa permasalahan dan hambatan, salah satunya bencana pandemi *Covid-19* yang cukup berdampak pada sektor perekonomian. Hal tersebut menjadi catatan dan bahan evaluasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam upaya memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan kinerja di masa mendatang.

Keberhasilan yang diraih merupakan hasil kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Ciamis memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk mewujudkan **“Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera untuk Semua”**.

